

**MANAJEMEN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
INKLUSIF DI SEKOLAH DASAR NEGERI 131
KOTA JAMBI**



TESIS

Oleh:

RIKA SYAF PUTRI

NIM P2A221017

**PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN PENDIDIKAN
JURUSAN ILMU PENDIDIKAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
PASCASARJANA UNIVERSITAS JAMBI**

2023

**MANAJEMEN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
INKLUSIF DI SEKOLAH DASAR NEGERI 131
KOTA JAMBI**



TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Magister
pada Program Studi Manajemen Pendidikan
Pasca Sarjana Universitas Jambi**

Oleh:

Rika Syaf Putri

NIM P2A221017

**PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN PENDIDIKAN
JURUSAN ILMU PENDIDIKAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIK
PASCASARJANA UNIVERSITAS JAMBI**

2023

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia tesis ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh(Magister) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU Nomor 20 Tahun 2002 Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).

Jambi, Januari 2023

Rika Syaf Putri, S.Pd

NIM P2A221017

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis ini yang berjudul “*Manajemen Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di SDN 131 Kota Jambi*” yang disusun oleh : Rika Syaf Putri, NIM : P2A221017, disetujui pembimbing untuk diujikan.

Jambi, Januari 2023

Pembimbing I

Dr. Mohamad Muspawi, S.Pd.I., M.Pd.I

NIP. 198110062008121002

Jambi, Januari 2023

Pembimbing II

Dr. Mulyadi, S.Ag., M.Pd.I.

NIP: 19760428201001101

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis dengan judul : *Manajemen Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di SDN 131 Kota Jambi*, yang disusun oleh:

Nama : Rika Syaf Putri

NIM : P2A221017

Jenjang Pendidikan : Strata Dua (S2)

Program Studi : Magister Manajemen Pendidikan

Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi

Telah di uji dan dipertahankan didepan dewan penguji pada sidang Ujian Tesis Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi pada tanggal 3 Januari 2023.

Jambi, Januari 2023
Mengetahui

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Mohamad Muspawi, S.Pd.I., M.Pd.I,

NIP: 198110062008121002

Dr. Mulyadi, S.Ag., M.Pd.I.

NIP: 197604282010011010

Mengesahkan,

Krtua Program Studi

Magister Manajemen Pendidikan

Dr. Mohamad Muspawi, S.Pd.I., M.Pd.I,

NIP: 198110062008121002

MOTTO

“Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah. Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya,”

(QS Al-A'laq: 1-5)

“Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu yang ketika ditimpa musibah mereka mengucapkan: sungguh kita semua ini milik Allah dan sungguh kepadaNya lah kita kembali”.

(QS Al-Baqarah: 155-156)

“Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman”.

(QS Ali Imran: 139)

“bersabarlah dan kuatkanlah kesabaran dan tetaplah senantiasa bertakwa kepada Allah SWT”

(Penulis)

Tesis ini aku persembahkan kepada kedua orang tuaku bapak (Sarjudin Abasri) dan ibundaku (Suarni) tercinta yang tidak pernah lelah membesarkan dan membimbingku dengan penuh kasih sayang serta memberi dukungan, perjuangan dan pengorbanan yang tidak terhingga dalam hidup ini. Besar harapanku untuk dapat menjadi anak yang berbakti dan membanggakan. Aku bersyukur kepada tuhan yang telah menghadirkan orang tua yang sangat hebat dan luar biasa seperti bapak dan ibuku.

Terimakasihku

Rika Syaf Putri

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, yang telah memberikan kesempatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul “Manajemen Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di SDN 131 Kota Jambi”.

Sholawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat-sahabat-Nya yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang menerang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Penulisan dan penyusunan Tesis ini dimaksudkan untuk melengkapi dari keseluruhan kegiatan perkuliahan yang telah dicanangkan oleh Universitas Jambi, serta untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Strata 2 (Sarjana Manajemen Pendidikan).

Dalam penulisan skripsi ini, penulis sangat menyadari kekurangan dan keterbatasan untuk mencapai kesempurnaan sehingga keberhasilan akan sulit tercapai tanpa adanya bimbingan, arahan, bantuan, dan motivasi dari berbagai pihak. Selanjutnya, segala kerendahan hati, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Drs. H. Sutrisno, M.Sc, Ph.D, selaku rektor Universitas Jambi.
2. Prof. Dr. M. Rusdi, S.Pd., M.Sc, selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang memfasilitasi dengan kebijakan-kebijakannya,
3. Dr. K.A. Rahman, M.Pd.I, selaku Ketua Jurusan Ilmu Pendidikan, FKIP Universitas Jambi, atas kesempatan yang telah diberikan

untuk melakukan penelitian.

4. Dr. Mohamad Muspawi, M.Pd.I, selaku Ketua Program Studi Manajemen Pendidikan, Jurusan Ilmu Pendidikan FKIP Universitas Jambi dan selaku Pembimbing I yang telah membimbing dan mengarahkan penulis mulai dari awal sampai selesai Tesis ini.
5. Dr. Mulyadi, S.Ag., M.Pd.I., selaku pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis mulai dari awal sampai selesai Tesis ini.
6. Dr. Rd. M Ali, S.Pd., selaku Pembimbing Akademik saya yang telah telah memberikan saya semangat dan motivasi saya dari awal perkuliahan sampai saat ini.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Manajemen Pendidikan, Jurusan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi yang selama perkuliahan telah memberikan banyak ilmu kepada saya.
8. Staff Program Studi Manajemen Pendidikan Universitas Jambi yang telah banyak membantu saya dalam keperluan perkuliahan saya.
9. Yang teramat mulia untuk kedua orang tuaku ayah (Sarjudin Abasri), dan Ibu (Suarni) yang sangat amat berjasa dalam kehidupan saya, yang tidak henti-hentinya memberikan semangat kepada saya.
10. Suami saya (Radopal, S.Or) yang selalu memberikan semangat, motivasi, dan dukungan yang amat baik kepada penulis dalam mencapai kesuksesan.
11. Yang saya cintai kakak-kakak saya uda (Samsul Bahri), abang (syafriadi), kakak perempuan saya (Yeni Marlina), dan abang bungsu saya (Rudi Maydinto) yang selalu memberi semangat dan

motivasi kepada saya.

12. Yang istimewa teman-teman Program Studi Manajemen Pendidikan angkatan 2021 yang telah memberikan banyak kenangan, dan pengalaman kepada penulis.

13. Kepada sahabat yang telah kebersamai selama dibangku perkuliahan (Fitriana) yang selalu ada dalam keadaan susah maupun senang.

Berkat rahmat dan nikmat Allah SWT penulis dapat menyelesaikan Tesis ini. Dengan segala kekurangan dan kesalahan dalam penulisan penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat membangun dari semua pihak sangat diharapkan

Jambi, Januari 2023

Penulis

ABSTRAK

Rika Syaf Putri, (2023) *Manajemen Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di SDN 131 Kota Jambi*. Tesis. Program studi Magister Manajemen Pendidikan, Jurusan Ilmu Pendidikan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jambi, Pembimbing Tesis: (I) Dr. Mohamad Muspawi, S.Pd.I., M.Pd.I., (II) Dr. Mulyadi, S.Ag., M.Pd.I.

Kata Kunci: Manajemen, Pendidikan Inklusif.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang Manajemen Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di SDN 131 Kota Jambi dan faktor pendukung dan penghambat manajemen kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif di SDN 131 Kota Jambi. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Subjek dalam penelitian ini adalah kepala sekolah dan beberapa guru yang mengajar di kelas inkklusif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Teknik analisis penyajian data yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Sedangkan uji keabsahan data menggunakan kriteria derajat kepercayaan, keteralihan, ketergantungan dan kepastian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) manajemen penyelenggaraan pendidikan inklusif di SDN 131 Kota Jambi sudah bisa dikatakan baik. Dapat dilihat dari proses manajemen dilakukan dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi. (2) faktor pendukung yaitu undang-undang yang mengatur tentang pendidikan inklusif, dan faktor penghambat yaitu belum memadainya sarana prasarana dan guru pendamping yang belum lulusan pendidikan inklusif.

ABSTRACT

Rika Syaf Putri, (2023) *Management for Implementing Inclusive Education at SDN 131 Jambi City*. Thesis. Master of Education Management study program, Department of Education, Faculty of Teacher Training and Education, Jambi University, Thesis Advisor: (I) Dr. Mohamad Muspawi, S.Pd.I., M.Pd.I., (II) Dr. Mulyadi, S.Ag., M.Pd.I.

Keywords: Management, Inclusive Education.

This study aims to describe the Policy Management for Implementing Inclusive Education at SDN 131 Jambi City and the supporting and inhibiting factors for implementing inclusive education policy management at SDN 131 Jambi City. This research is a qualitative descriptive study with a phenomenological approach. The subjects in this study were school principals and several teachers who teach in inclusive classes. Data collection techniques using interviews, observation, and documentation studies. The analysis technique of presenting data is data reduction, data presentation and drawing conclusions. While testing the validity of the data using the criteria for the degree of trust, transferability, dependence and certainty. The results of the study show that (1) the policy management for implementing inclusive education at SDN 131 Jambi City can be said to be good. It can be seen from the management process carried out by planning, organizing, implementing, and evaluating. (2) supporting factors, namely laws that regulate inclusive education, and inhibiting factors, namely inadequate infrastructure and accompanying teachers who have not graduated from inclusive education.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Asumsi Penelitian.....	6
1.5 Manfaat Penelitian.....	7
1.6 Batasan Penelitian	8
1.7 Definisi Istilah	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Landasan Teori	10
2.1.1 Konsep Manajemen	10
2.1.2 Pendidikan Inklusif.....	13
2.1.3 Tujuan Pendidikan Inklusif	20
2.1.4 Model pendidikan inklusif.....	24
2.1.5 Upaya Kepala Sekolah dan Guru dalam Implementasi PendidikanInklusi.....	27
2.1.6 Aspek-Aspek Penting Dalam Manajemen Kebijakan PendidikanInklusif.....	27
2.1.7 Manajemen Kebijakan Pendidikan Inklusif.....	29
2.2 Studi Sebelumnya	34

2.3	Kerangka Pemikiran	42
BAB III METODE PENELITIAN		44
3.1	Metode dan Rancangan Penelitian	44
3.2	Lokasi dan Akses Penelitian.....	46
3.3	Prosedur Sampling dan Peserta Penelitian	46
3.4	Prosedur Pengumpulan Data	47
3.4.1	Observasi	48
3.4.2	Wawancara	48
3.4.3	Dokumen	49
3.5	Kredibilitas Data.....	50
3.5.1	Derajat kepercayaan (Credibility)	50
3.5.2	Keteralihan	52
3.5.3	Ketergantungan	52
3.5.4	Kepastian	52
3.6	Analisis Data	53
3.7	Penyajian Hasil Data	55
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		56
4.1	Deskripsi Lokasi/Objek Penelitian	56
4.1.1	profil SDN 131 Kota Jambi.....	56
4.1.2	Struktur organisasi.....	57
4.1.3	Data Pendidik dan Kependidikan SDN 131 Kota Jambi.....	58
4.1.4	Deskripsi Partisipan Penelitian.....	59
4.2	Deskripsi Temuan Penelitian.....	61
4.2.1	Manajemen Kebijakan Pendidikan Inklusif Dilihat Dari Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan, dan Evaluasi.....	64
4.2.2	Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Manajemen Kebijakan Pendidikan Inklusif di SDN 131 Kota Jambi	79
4.3	Pembahasan	80
4.3.1	Manajemen kebijakan pendidikan inklusif di SDN 131 Kota Jambi yang Ditinjau Dari Aspek Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan dan Evaluasi.	81

4.3.2	Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Manajemen Kebijakan Pendidikan Inklusif di SDN 131 Kota Jambi.	91
BAB V PENUTUP.....		96
5.1	Kesimpulan.....	96
5.2	saran.....	97
Daftar Pustaka.....		100
Lampiran		104

DAFTAR TABEL

<u>Tabel 3.1 Jadwal Penelitian</u>	45
<u>Tabel 4. 1 Data Tenaga Pendidik dan Kependidikan</u>	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Alur Kerangka Pemikiran.....	43
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Observasi	104
Lampiran 2 Pedoman Wawancara	105
Lampiran 3 Surat Undangan Peserta Penelitian	108
Lampiran 5 Demografik Peserta Penelitian	114
Lampiran 7 Surat Telah Melakukan Penelitian.....	116
Foto siswa ABK.....	119
(Pedoman wawancara kepala sekolah)	125
(Pedoman wawancara beberapa guru)	129

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap manusia mempunyai kebutuhan mendasar akan pendidikan untuk menjamin kelangsungan hidupnya dan untuk mengangkat derajatnya. Oleh karena itu, negara berkewajiban memberikan layanan pendidikan yang bermutu tinggi kepada seluruh warga negara, tanpa memandang adanya kesenjangan kemampuan (disabilitas). mengembangkan potensi dirinya serta kepribadian, kecerdasan, akhlak, dan sifat-sifat lain yang dibutuhkan oleh masyarakat, negara, dan negara. (UUSPN No. 20 tahun 2003 Bab I, pasal1).

Pendidikan inklusif merupakan konsekuensi dari kebijakan *global Education for All* yang dicanangkan pada tahun 1990. Tujuan dari program “pendidikan untuk semua” adalah untuk melaksanakan proklamasi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1949 bahwa semua orang berhak atas pendidikan. Semua anak berhak atas pendidikan yang bebas dari hambatan berdasarkan geografi, etnis, agama, bahasa, jenis kelamin, atau kemampuan akademik. Ini adalah hasil alami dari hak ini. Pada Konferensi Dunia Pendidikan untuk Siswa Berkebutuhan Khusus di Salamanca, Spanyol, dan Forum Pendidikan Dunia di Dakar, Senegal, pendidikan inklusif dideklarasikan sebagai pendekatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan semua anak, remaja, dan orang dewasa dengan fokus pada mereka yang terpinggirkan dan dikucilkan. Sebagai wujud kepedulian dan keseriusan pemerintah terhadap anak yang berkebutuhan khusus melalui Implementasi pendidikan inklusif di Indonesia, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas Jakarta

mengeluarkan surat edaran Nomor: 380/C.C6/MN/2003 tanggal 20 Januari 2003. Setiap kabupaten dan kota di Indonesia seharusnya merencanakan dan membuat setidaknya empat program pendidikan inklusif, mulai dari tingkat SD, SMP, dan SMA. (Mukhlis, 2011).

Untuk mencapai pemerataan pendidikan, pemerintah sebagai pengambil keputusan utama di bidang ini menerapkan pendidikan inklusif. Tujuan dari pendidikan inklusif adalah untuk memberikan pendidikan kepada semua warga negara, termasuk mereka yang berkebutuhan khusus dan anak-anak muda yang sedang berkembang, sehingga mereka dapat bersekolah dan menerima pendidikan yang layak yang akan mempersiapkan mereka untuk sisa hidup mereka. Dalam dunia pendidikan Indonesia, pendidikan luar biasa kini diselenggarakan oleh pemerintah untuk anak-anak yang memiliki kekhususan yang disebut pendidikan inklusi. Sejak *World Summit on Education for All* pada tahun 1990, yang disusul dengan pernyataan tentang pendidikan inklusi pada tahun 1994, istilah pendidikan inklusi dan inklusi menjadi lebih umum. (Hizriyani, 2018).

Pendidikan inklusif adalah pengajaran yang dibangun di atas sikap ramah untuk melibatkan semua orang dalam pembelajaran. Pendidikan inklusif adalah penerapan pendidikan dari perspektif multikultural yang dapat membantu peserta didik dalam memahami, menerima, dan menghormati mereka yang memiliki berbagai latar belakang ras dan etnis, tradisi budaya, keyakinan moral, kepribadian, serta kemampuan fisik dan mental. Isu tidak semua warga mendapatkan layanan pendidikan menjadi pemicu penyelidikan ini. terutama warga negara yang dibatasi dalam beberapa hal. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan solusi terhadap persoalan bagaimana sistem penyelenggaraan pendidikan inklusif dapat menjangkau setiap orang tanpa

mempertimbangkan kerentanan dan kekurangan mereka.

Dalam pengertian yang lebih luas, pendidikan inklusif dapat dipahami sebagai suatu bentuk reformasi pendidikan yang mengutamakan keadilan, persamaan hak dan kesempatan untuk semua, perlawanan terhadap diskriminasi, dan peningkatan akses pendidikan sekaligus peningkatan standar pengajaran. Selain itu, pendidikan inklusi bukanlah satu-satunya strategi untuk mendidik siswa berkelainan dalam sistem pendidikan khusus di Indonesia dalam upaya menggantikan pendidikan segregated. Sebaliknya, itu adalah sebuah alternatif untuk segregasi sekolah, yang telah dipraktekkan selama lebih dari satu abad, serta pilihan, inovasi, atau terobosan/pendekatan baru.

Menurut Pasal 1 Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009, yang berkaitan dengan pendidikan inklusif bagi peserta didik penyandang disabilitas dan potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa, pendidikan inklusif adalah sistem penyampaian pengajaran yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik penyandang disabilitas dan potensi untuk kecerdasan dan/atau bakat khusus untuk berpartisipasi dalam pembelajaran atau melakukannya di lingkungan di mana siswa pada umumnya berada. Menurut Pasal 2, pendidikan inklusif bercita-cita memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada semua anak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas, tanpa memandang apakah mereka memiliki tantangan fisik, emosional, mental, atau sosial atau kemampuan untuk menjadi cerdas atau memiliki bakat tertentu. Setiap peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, atau sosial dan/atau yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa perlu memperoleh layanan pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan haknya. Hal ini berarti mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keberagaman dan tidak diskriminatif. Untuk

mempromosikan pendidikan inklusif, pemerintah harus menjaga keseimbangan dengan dukungan dari berbagai pihak. sehingga prosedur pelaksanaannya dapat mengikuti pedoman yang dituangkan dalam kebijakan yang dibuat. Pendidikan inklusif ini disusun untuk menjawab keterbatasan anak berkebutuhan khusus (ABK) dan untuk memenuhi kebutuhan mereka secara keseluruhan. Dikarenakan kemampuan logika dan penalaran mereka yang cukup berbeda dengan siswa atau siswa biasa, sangat menantang bagi siswa tunagrahita untuk menggabungkan pembelajaran dalam satu kelas dengan siswa normal seperti pada pendidikan inklusif.

Manajemen dan Pelaksanaan Pendidikan masalah-masalah berikut muncul ketika pelaksanaan pendidikan inklusi menghadapi berbagai tantangan yang ditemui pada saat observasi awal tanggal 5-7 september 2022 diantaranya:

Pertama, Dalam praktiknya, Standarisasi sarana dan prasarana dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan inklusi di sekolah negeri atau sekolah reguler tidaklah tepat karena sekolah yang akan menyelenggarakan pendidikan inklusi harus mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku, persyaratan, dan kriteria tertentu. Standardisasi yang dimaksud adalah barang berwujud, khususnya sistem sumber daya dan infrastruktur di sekolah yang memungkinkan peserta didik Penyandang Disabilitas (ABK) berpartisipasi dalam proses pendidikan.

Kedua, Karena masih adanya disparitas antara anak berkebutuhan khusus (ABK) dan anak-anak pada umumnya, pembatasan aksesibilitas dapat mengakibatkan tindakan diskriminatif terhadap ABK. Kurangnya penerimaan dan perlakuan yang adil terhadap siswa berkebutuhan khusus (ABK) di sekolah dalam

hal ini menunjukkan masalah aksesibilitas.

Ketiga, kurangnya pengetahuan para guru di sekolah biasa tentang bagaimana menangani siswa berkebutuhan khusus dan bagaimana mempromosikan pendidikan inklusif. Penyelenggaraan pendidikan sebagian besar dilakukan oleh pendidik dan tenaga kependidikan lainnya. Tidak semua orang dapat memahami dan menerima sistem penyelenggaraan pendidikan inklusif. Ini adalah hasil dari ketidaktahuan pendidik dan staf pendukung tentang pendidikan inklusif. Mungkin menantang bagi guru untuk mengintegrasikan anak-anak berkebutuhan khusus dan siswa biasa di kelas reguler baik di tingkat akademik maupun sosial.

Keempat, Ini mungkin menantang bagi individu yang membutuhkan data karena kurangnya organisasi dalam pengelolaan pengumpulan data dari kantor yang terhubung untuk pendidikan inklusif. Agensi tidak mengumpulkan data secara online, jadi jika Anda ingin mengetahui informasi yang akurat dan terkini, Anda harus datang langsung ke kantor yang sesuai. Salah satu tugas utama yang diselesaikan oleh dinas adalah pendataan, yang membantu mengidentifikasi dengan jelas keadaan yang ada di wilayah tersebut melalui jumlah yang diperoleh dari hasil pendataan. Selain itu, sangat penting bagi layanan untuk fokus pada manajemen penyimpanan data sehingga data yang diperoleh dapat diarsipkan dan digunakan oleh layanan untuk analisis tidak adanya organisasi dalam penyelenggaraan pendataan dari data tahun sebelumnya yang dikaitkan dan dibandingkan dengan data yang ada pada tahun berikutnya karena data yang akurat dan dapat diverifikasi diperlukan untuk pembangunan yang terencana, terarah, dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil latar belakang di atas, maka peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana Manajemen Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di SDN 131 Kota Jambi. Dengan harapan akan memberikan masukan dan jawaban atas beberapa pertanyaan dan permasalahan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian yaitu:

- 1.2.1 Bagaimana manajemen penyelenggaraan pendidikan inklusif yang terfokus kepada perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi di SDN 131 Kota Jambi?
- 1.2.2 Faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat manajemen penyelenggaraan pendidikan inklusif di SDN 131 Kota Jambi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian diatas, maka tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui:

- 1.3.1 manajemen penyelenggaraan pendidikan inklusif yang terfokus kepada perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi di SDN 131 Kota Jambi; dan
- 1.3.2 faktor pendukung dan penghambat manajemen Penyelenggaraan pendidikan inklusif di SDN 131 Kota Jambi.

1.4 Asumsi Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah tentang manajemen penyelenggaraan pendidikan inklusif di SDN 131 Kota Jambi, maka peneliti berasumsi bahwa belum optimalnya manajemen penyelenggaraan pendidikan inklusif di SDN 131 Kota Jambi.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Disorganisasi dalam pengelolaan akuisisi data dari sumber yang terhubung diharapkan penelitian ini akan memajukan bidang ilmu. Temuan penelitian ini juga dapat membantu untuk memajukan pengetahuan di bidang yang terkait dengan pendidikan inklusif. Dan dapat bermanfaat sebagai bahan kajian tambahan dalam ranah akademik.

1.5.2 Praktis

Dalam pengelolaan akuisisi data dari sumber yang terhubung Studi ini diperkirakan akan bermanfaat dalam penyediaan informasi untuk:

a. Terhadap Sekolah

Studi ini dapat menawarkan pengetahuan dan saran untuk meningkatkan standar lingkungan belajar, pendidik, dan sekolah.

b. Terhadap kepala sekolah

Kajian ini memberikan informasi kepada kepala sekolah yang bersangkutan yang dapat digunakan untuk melaksanakan salah satu tanggung jawab kepemimpinannya sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan sekolah.

c. Terhadap Guru

Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan umpan balik dan informasi kepada guru untuk membantu mereka meningkatkan kualitas pengajaran mereka serta pemantauan dan kontrol terhadap siswa untuk membantu mereka belajar lebih efektif.

d. Terhadap Siswa

Pembelajaran ini dapat meningkatkan kegairahan belajar siswa dan pengetahuan mereka bahwa, baik mereka berkebutuhan khusus atau tidak,

motivasi belajar datang dari diri mereka sendiri.

e. Terhadap peneliti

Dengan maksud dapat membantu masyarakat luas dan memberikan wawasan kepada SDN 131 Kota Jambi, diharapkan penelitian ini dapat menambah pengalaman dan pemahaman para sarjana yang lebih umum mengenai pendidikan inklusi.

1.6 Batasan Penelitian

Batasan masalah dalam penelitian ini dibatasi pada : “Bagaimana Manajemen Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif yang terfokus kepada perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi di SDN 131 Kota Jambi.

1.7 Definisi Istilah

Dalam studi ini, pendidikan inklusif adalah frase operatif. Sedangkan dalam penelitian ini, para peneliti berusaha menguraikan langkah-langkah yang terlibat dalam mempraktekkan kebijakan pendidikan inklusif. Guna menawarkan temuan penelitian yang akan datang tentang bagaimana manajemen Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di SDN 131 Kota Jambi berfokus pada perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi, berikut rumusan istilahnya:

Pendidikan inklusif menurut Alimin (2005) menekankan bahwa meningkatkan keterlibatan dalam pembelajaran, budaya, dan masyarakat serta menurunkan eksklusivitas dalam pendidikan adalah dua cara pendidikan inklusif memenuhi kebutuhan unik semua siswa. Sesuai dengan tuntutan kelompok usia masing-masing anak, pendidikan inklusif meliputi penyesuaian materi,

metodologi, struktur, dan taktik yang digunakan. Dengan tujuan agar baik guru maupun siswa dapat merasa nyaman dalam keragaman dan menganggapnya sebagai tantangan dan pengayaan dalam lingkungan belajar, keragaman bukanlah suatu masalah. Pendidikan inklusif juga dapat dilihat sebagai bentuk kepedulian dalam menanggapi kebutuhan belajar siswa yang lebih luas. Sebagai cerminan dari apa yang sebenarnya terjadi dalam praktik dan realita, pendidikan inklusif juga akan terus berkembang secara perlahan. Bahkan, harus beradaptasi agar pendidikan inklusif dapat terus memberikan solusi sejati terhadap isu-isu yang mempengaruhi pendidikan dan hak asasi manusia. (Hizriyani, 2018).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Konsep Manajemen

Secara teori, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengalokasian sumber daya yang terdapat dalam bidang pendidikan adalah semacam manajemen atau administrasi. Untuk mencapai tujuan pendidikan dalam konteks sosial tertentu, fungsi administrasi pendidikan berfungsi sebagai alat untuk mengintegrasikan peran semua sumber daya. Secara teori, manajemen atau administrasi adalah suatu jenis aplikasi dalam mengendalikan, mengkoordinasikan, dan menugaskan sumber daya yang ada dalam dunia pendidikan. "Manajemen adalah suatu proses yang terdiri dari tindakan-tindakan yang digunakan untuk mencapai tujuan koperasi (administratif) secara efisien." Fungsi administrasi pendidikan bertindak sebagai alat untuk mengintegrasikan peran semua sumber daya untuk mencapai tujuan pendidikan dalam lingkungan sosial tertentu. Manajemen adalah serangkaian langkah-langkah yang diambil dalam upaya memajukan kerjasama (administrasi) yang efektif (Wati, 2014).

Menurut Wiliyanto, (2022). Dalam hal memajemen suatu pendidikan yang perlu diperhatikan adalah ada empat unsur utama dalam memajemen pendidikan yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi (*controlling*).

Karena pengorganisasian, tindakan, dan pengendalian juga harus direncanakan terlebih dahulu, unsur perencanaan merupakan tugas pokok

manajemen. Semua aktivitas, tindakan, dan kebijakan harus direncanakan sedemikian rupa sehingga risikonya minimal. pertama. Rencana untuk Mengelola sumber daya dan memilih strategi atau pendekatan yang dapat digunakan untuk merancang prosedur adalah dua cara untuk mengarahkan tujuan organisasi dan menetapkan prosedur. Membuat penilaian mengenai arah yang harus ditempuh, tindakan yang harus dilakukan, sumber daya untuk diproses, dan teknik atau prosedur yang dipilih untuk digunakan pada dasarnya adalah apa yang diperlukan dalam perencanaan. (Wiliyanto, 2022).

Unsur pengorganisasian, Karena organisasi juga harus direncanakan, maka unsur pengorganisasian yang merupakan fungsi pengorganisasian (pengorganisasian pembagian kerja) sangat erat kaitannya dengan fungsi perencanaan. Proses aktif, pengorganisasian adalah fungsi manajerial. Untuk mengatur pekerjaan, mengkategorikan tugas, menugaskan pekerjaan kepada setiap karyawan, membuat departemen (subsistem), dan membentuk hubungan adalah contoh pengorganisasian. (Wiliyanto, 2022).

Unsur pelaksanaan, Implementasi, dalam konteks peran manajemen, mengacu pada membuat karyawan bekerja dengan tekun untuk menyelesaikan tugas yang diberikan kepada mereka untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tugas dan kewajiban pokok yang diberikan bawahan atau anggota oleh atasan harus dilaksanakan secara penuh, tuntas, dan semaksimal mungkin. Untuk menyelesaikan tugas, harus ada kerjasama yang kuat antara sesama anggota dan dari atasan ke bawahan atau anggota. guna memperoleh hasil yang diinginkan. (Wiliyanto, 2022).

Unsur evaluasi adalah untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mengevaluasi informasi dengan tujuan menggunakannya untuk mengelola organisasi dan

memastikan bahwa anggotanya melakukan tindakan yang diperlukan. Tinjauan tersebut penting dilakukan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara harapan dan (Wiliyanto, 2022).

Seperti dinyatakan Hasbullah, (2015) Penetapan agenda, perumusan kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan adalah beberapa langkah yang saling bergantung satu sama lain dan disusun secara kronologis untuk mewakili aktivitas politik ini sebagai proses pembuatan kebijakan. Kegiatan politik ini terjadi pada saat kebijakan politik sedang dikembangkan.

Senada dengan pendapat di atas, Dunn, (2003) mengilustrasikan secara rinci fase-fase dan karakteristik pembuatan kebijakan:

1. Penetapan agenda adalah tahap pertama, dan selama tahap ini, misalnya, isu dibawa ke perhatian publik oleh pejabat yang dipilih dan diangkat.
2. Langkah kedua adalah pembuatan kebijakan. Pada tahap ini, pihak berwenang dapat membuat sejumlah kebijakan untuk menangani masalah tersebut. Pendekatan kebijakan alternatif menyatakan bahwa ketiga jenis tindakan pemerintah legislasi, putusan pengadilan, dan perintah eksekutif diperlukan.
3. Penerimaan kebijakan merupakan tahap ketiga. Kebijakan alternatif yang telah diterima oleh mayoritas parlemen, kesepakatan di antara direktur kelembagaan, atau keputusan hukum adalah beberapa karakteristik periode ini.
4. Langkah keempat adalah mempraktikkan kebijakan; sebagai ilustrasi,

unit administrasi yang memobilisasi sumber daya manusia dan keuangan mempraktekkan kebijakan yang diberlakukan selama fase ini.

5. Proses terakhir adalah evaluasi kebijakan, yang melibatkan, misalnya, audit pemerintah dan departemen akuntansi yang menentukan apakah organisasi eksekutif, legislatif, dan yudikatif mematuhi standar hukum sambil merumuskan kebijakan dan mencapai tujuan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam memajemen suatu pendidikan yang perlu diperhatikan adalah unsur manajemen itu sendiri yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi. Selain itu dalam kebijakan fase yang harus di perhatikan adalah fase penyusunan agenda, fase formulasi, fase adopsi, fase implementasi, dan terakhir adalah fase penilaian. Semua unsur dan fase dalam manajemen kebijakan harus diperhatikan agar tujuan itu sendiri dapat tercapai.

2.1.2 Pendidikan Inklusif

Tujuan pendidikan inklusif, sebuah paradigma baru, adalah untuk memastikan bahwa semua siswa, tanpa kecuali, memiliki akses ke pengalaman pendidikan berkualitas tinggi, memberikan kesempatan yang sama kepada mereka untuk secara aktif mengembangkan potensi dirinya dalam setting yang sama. Dalam arti yang lebih luas, pendidikan inklusif dapat diartikan sebagai pendidikan untuk semua, atau lebih khusus lagi, sebagai suatu bentuk reformasi pendidikan yang mengutamakan penghapusan diskriminasi, pemajuan keadilan, dan peningkatan akses pendidikan untuk semua. Selain itu, pendidikan inklusif memberikan penekanan yang kuat pada peningkatan standar pengajaran,

melakukan upaya yang disengaja untuk menyelesaikan wajib belajar sembilan tahun, dan bekerja untuk mengubah persepsi masyarakat tentang anak-anak dengan kebutuhan khusus (Sudarto, 2016).

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengamanatkan bahwa setiap orang yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Ini termasuk sekolah untuk anak-anak yang memiliki gangguan fisik, mental, atau kecerdasan.

Menurut ayat 1 Pasal 32 undang-undang yang sama, pendidikan luar biasa mencakup pengajaran bagi siswa yang berjuang secara akademis karena masalah emosional, mental, fisik, atau sosial, atau yang mungkin cerdas atau memiliki kemampuan unik. Inisiatif pemerintah untuk mencegah prasangka pendidikan di Indonesia diwujudkan pada tanggal 8 sampai dengan 14 Agustus 2004 dilaksanakan Deklarasi Bandung dan menghasilkan butir-butir kebijakan dalam implementasi pendidikan inklusif yang ditanda tangani oleh Menteri Pendidikan Nasional, Bank Dunia, IDP Norway, dan EENET Asia. kebijakan tersebut mengimbau pemerintah, lembaga pendidikan, instansi terkait, dunia usaha dan industri, serta masyarakat umum agar mampu:

- a. Untuk memastikan bahwa semua anak penyandang disabilitas dan anak berkebutuhan khusus lainnya memiliki akses yang sama ke semua aspek kehidupan, termasuk yang terkait dengan pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, keamanan, dan bidang lainnya,
- b. Menjamin bahwa semua anak penyandang disabilitas dan kebutuhan khusus lainnya diperlakukan dengan bermartabat sebagai manusia yang unik dan diberi perlakuan yang manusiawi dan pendidikan yang berkualitas tinggi

sesuai dengan kerugian yang ditimbulkan oleh keberadaan mereka dalam kehidupan secara fisik, psikologis, ekonomi, sosiologis, hukum, politik, dan tingkat budaya.

- c. Perencanaan dan pengembangan manajemen pendidikan inklusi dibantu oleh sinergi dan kerjasama yang bermanfaat dari para pemangku kepentingan, terutama pemerintah, lembaga pendidikan, lembaga terkait, dunia usaha dan industri, orang tua, dan masyarakat.
- d. Menciptakan lingkungan yang mendukung kebahagiaan anak-anak penyandang disabilitas dan anak-anak dengan kebutuhan khusus lainnya, memungkinkan mereka untuk mewujudkan potensi individu mereka dengan sebaik-baiknya.
- e. Dengan menghilangkan hambatan dan memastikan bahwa anak berkebutuhan khusus dan penyandang disabilitas bebas berinteraksi dengan siapa saja, kapan saja, dan di mana saja.
- f. Media, forum akademik, pengajaran, dan bentuk pelatihan lainnya harus selalu digunakan untuk mengiklankan dan mendukung layanan pendidikan inklusif.
- g. Kembangkan strategi dengan dana untuk menjamin semua aspek kesejahteraan anak, program pendidikan berkualitas tinggi, dan aksesibilitas fisik dan mental.

Mengikutsertakan siswa penyandang disabilitas di kelas reguler sambil memberikan mereka dukungan yang diperlukan dikenal sebagai inklusivitas. Sebaliknya, pendidikan inklusif mengacu pada lembaga dan program pendidikan yang menyambut semua siswa, termasuk mereka yang berkebutuhan khusus

(MUMBI, 2008).

Istilah "pendidikan inklusif" mengacu pada sejumlah taktik, proyek, dan prosedur yang dimaksudkan untuk memenuhi hak konstitusional setiap orang atas pendidikan berkualitas tinggi yang tepat waktu dan sesuai. Pembelajaran berlangsung di rumah, di masyarakat, dan dalam konteks formal, informal, dan nonformal. Itu dimulai saat lahir dan berlanjut sepanjang hidup. Ini adalah proses dinamis yang terus berubah sebagai respons terhadap keadaan dan budaya. Ini bertujuan untuk menyediakan masyarakat, sistem, dan organisasi dengan alat yang mereka butuhkan untuk menghilangkan hambatan belajar dan keterlibatan bagi semua orang, melawan diskriminasi, merayakan keragaman, dan mendorong partisipasi. Diakui dan dihargai bahwa ada perbedaan berdasarkan usia, jenis kelamin, ras, bahasa, kesehatan, status ekonomi, agama, kecacatan, dan gaya hidup. Ini adalah komponen dari inisiatif yang lebih besar untuk memajukan pembangunan inklusif dengan tujuan membangun dunia yang ditandai dengan perdamaian, toleransi, keberlanjutan sumber daya, dan keadilan sosial, serta pemenuhan kebutuhan dan hak dasar semua orang. Alih-alih memodifikasi siswa agar sesuai dengan sistem, tujuannya adalah mengubah sistem agar lebih sesuai dengan anak-anak. Ini menempatkan "masalah" eksklusi tepat di dalam sistem, bukan individu atau sifat mereka (Stubbs, 2008).

Untuk menjamin hak setiap anak atas pendidikan, untuk memudahkan masyarakat mengakses pendidikan, dan untuk mengakhiri diskriminasi, pendidikan inklusif masih dipandang sebagai upaya untuk mengintegrasikan anak-anak berkebutuhan khusus ke dalam ruang kelas konvensional. Orang tua sering mengeluhkan kegagalan guru untuk bersikap proaktif dan baik kepada semua

siswa, yang membuat anak berkebutuhan khusus menjadi sasaran ejekan. Meskipun didorong oleh visi yang cukup jelas, menerima semua jenis anak berkebutuhan khusus, yang sebagian sudah memiliki guru khusus, mencatat hambatan belajar masing-masing anak, dan memberikan kebebasan baik bagi guru pendidikan umum maupun pendidik khusus untuk melaksanakannya. pengajaran di kelas yang lebih kreatif dan inovatif, kolaborasi dengan pakar, organisasi, atau lembaga terkait masih diperlukan.

Gagasan bahwa keterlibatan orang tua merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam pendidikan inklusif belum sepenuhnya berkembang. Prinsip penting dari pendidikan inklusif mensyaratkan bahwa setiap anak memiliki kesempatan untuk belajar bersama teman sekelas mereka dan memenuhi kebutuhan mereka tanpa diskriminasi mendasar.

Akibatnya, sekolah reguler/umum harus siap untuk mengenali dan memenuhi beragam kebutuhan semua siswa, terutama mereka yang secara historis ditolak akses dan partisipasinya dalam pendidikan. Smith mengklaim bahwa tujuan pendidikan untuk anak penyandang disabilitas adalah agar setiap anak berpartisipasi aktif dalam semua aspek kehidupan sekolah. Penerimaan anak penyandang disabilitas dapat dipandang sebagai inklusi dalam kurikulum, tujuan dan misi sekolah; lingkungan sosial dan konsep diri. Oleh karena itu, pendidikan inklusi mensyaratkan lembaga pembelajaran membuat akomodasi untuk setiap individu siswa dan menanggapi kebutuhan mereka. Sekolah, instruktur, dan semua siswa diperlukan untuk inklusivitas ini.

Alimin (2005) menekankan bahwa meningkatkan keterlibatan dalam pembelajaran, budaya, dan masyarakat serta menurunkan eksklusivitas dalam

pendidikan adalah dua cara pendidikan inklusif memenuhi kebutuhan unik semua siswa. Sesuai dengan tuntutan kelompok usia masing-masing anak, pendidikan inklusif meliputi penyesuaian materi, metodologi, struktur, dan taktik yang digunakan. Keanekaragaman bukanlah masalah selama guru dan siswa sama-sama merasa nyaman dengannya dan menganggapnya sebagai tantangan dan pengayaan bagi lingkungan belajar. Selain itu, pendidikan inklusif dapat dipahami sebagai ungkapan kepedulian terhadap kebutuhan pendidikan siswa yang lebih luas. Agar pendidikan inklusi terus menjadi respons yang tulus terhadap isu-isu yang mempengaruhi pendidikan dan hak asasi manusia, ia juga harus terus beradaptasi secara bertahap agar mencerminkan apa yang terjadi dalam praktik dan kenyataan.

Gagasan di balik pendidikan inklusif sangat berbeda dengan gagasan di balik pendidikan khusus. Pendidikan khusus tidak disebut dengan istilah inklusi atau pendidikan inklusif. Gagasan di balik pendidikan untuk semua dan reformasi sekolah memiliki banyak kesamaan dengan gagasan pendidikan inklusif (Sudarto, 2016).

Pendidikan Inklusif bukan tentang reformasi pendidikan luar biasa juga bukan subspecialisasi pendidikan luar biasa. Pendidikan inklusif adalah tentang mengapa, bagaimana, kapan, di mana dan konsekuensi mendidik semua peserta didik. Ini melibatkan politik pengakuan dan berkaitan dengan masalah serius tentang siapa yang disertakan dan siapa yang dikecualikan dalam pendidikan dan masyarakat pada umumnya (Barton, 2003).

Pendidikan inklusif berarti: pergeseran layanan dari sekadar mencoba menyesuaikan anak menjadi "pengaturan normal"; itu adalah dukungan tambahan untuk disabilitas atau kebutuhan khusus mereka dan mempromosikan perkembangan keseluruhan anak dalam pengaturan yang optimal. Selain itu,

organisasi secara keseluruhan, kurikulum, bagaimana siswa diajar, dukungan untuk pembelajaran, dan pengembangan staf harus diperhitungkan (Mitiku, Alemu, & Mengsitu, 2014).

Menurut Allen, (2000) Anak berkebutuhan khusus harus mengikuti pelajaran reguler di sekolah sekitar bersama teman sebayanya sebagai bagian dari program pendidikan inklusi. Untuk memaksimalkan potensinya, anak berkebutuhan khusus menghabiskan sebagian waktunya bersama siswa reguler (normal) dalam model inklusi. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa anak normal dan anak abnormal (anak berkebutuhan khusus) tidak dapat dipisahkan secara sosial karena kedua jenis anak tersebut ada dalam masyarakat. Selain itu, disebutkan bahwa pendidikan inklusif mengacu pada pengajaran yang melibatkan semua anak. Karena berada dalam suasana kooperatif, mereka memperoleh hasil dari proses pembelajaran dengan layanan pendidikan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan spesifik masing-masing siswa. Dalam program pendidikan ini tidak ada prasangka terhadap peserta didik yang berasal dari latar belakang ras, sosial, ekonomi, politik, keluarga, bahasa, geografis (terpencil), agama, atau fisik atau mental yang beragam.

Berikut adalah definisi sekolah inklusif dari Pernyataan Salamanca dan Kerangka Aksi Pendidikan Kebutuhan Khusus: Prinsip mendasar dari sekolah inklusif adalah, sedapat mungkin, semua anak harus belajar bersama, tanpa memandang kesulitan atau perbedaan. Pendidikan yang baik untuk semua anak harus disediakan oleh sekolah inklusif, yang harus mengidentifikasi dan mengatasi keragaman kebutuhan siswa mereka melalui kurikulum yang sesuai, struktur organisasi, metode pengajaran, penggunaan sumber daya, dan kolaborasi

masyarakat. Harus ada berbagai pilihan layanan dan dukungan alternatif yang dibuat khusus untuk kebutuhan masing-masing institusi (UNESCO & MES, 1994).

Unesco mengembangkan definisi pendidikan inklusif dalam *Guidelines for Inclusion: Ensuring Access to Education for All*, bahwa: “Inklusi dipandang sebagai proses memenuhi berbagai kebutuhan semua siswa melalui peningkatan pembelajaran, partisipasi budaya dan masyarakat, serta menurunkan eksklusi di dalam dan dari sekolah. Dengan visi bersama yang mencakup semua anak dalam rentang usia yang tepat dan pentingnya tanggung jawab dan pengaturan untuk mengajar semua anak, itu membutuhkan perubahan dan revisi dalam isi, pendekatan, struktur, dan strategi (UNESCO 2005).

Sesuai dengan uraian di atas, semua anak berkebutuhan khusus wajib mengikuti kelas reguler, apapun tingkatannya. Ketika layanan pendidikan diberikan kepada anak berkebutuhan khusus dalam batas-batas budaya tradisional, maka dikatakan pendidikan inklusif. Dalam hal ini, pendidikan dilihat dari sudut pandang kebutuhan khusus murid, bukan dari kekurangannya atau sebab-sebab kondisinya. Jelas bahwa mereka memiliki kebutuhan yang berbeda satu sama lain.

2.1.3 Tujuan Pendidikan Inklusif

Perlunya Pendidikan Inklusif Tujuan pendidikan inklusif adalah memberikan layanan pendidikan kepada siswa yang mengalami kesulitan belajar dan siswa yang membutuhkan layanan pendidikan khusus agar potensinya (kognitif, emosional, dan psikomotor) dapat dimaksimalkan dan mereka dapat hidup mandiri dengan orang lain. anak-anak. dapat berkontribusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan prinsip pendidikan (Sudarto, 2016).

Pelibatan penuh anak berkebutuhan khusus dalam kehidupan komunal

merupakan salah satu tujuan pendidikan inklusif. Tujuan lainnya termasuk memberikan setiap anak kesempatan terbaik untuk menerima pendidikan yang mereka butuhkan, mempercepat penyelesaian program wajib belajar secara efektif, meningkatkan standar pendidikan dan menurunkan angka putus sekolah, serta menciptakan lingkungan belajar yang menghargai keragaman dan ramah terhadap semua (Lia & Rina,2019).

Berikut ini adalah informasi lebih lanjut mengenai tiga tujuan pendidikan inklusif, yang mencakup tujuan bagi siswa berkebutuhan khusus, sekolah, staf, dan masyarakat:

1. Untuk anak-anak dengan persyaratan tertentu
 - a) Anak akan mengalami rasa inklusi dalam masyarakat.
 - b) Anak-anak akan memiliki akses ke berbagai sumber untuk membantu mereka belajar dan berkembang.
 - c) Meningkatkan harga diri anak.
 - d) Anak-anak memiliki kesempatan untuk belajar dan bersosialisasi dengan anak-anak lain.
2. Untuk sekolah dulu
 - a) Mengembangkan kemampuan menghadapi berbagai variasi dalam suatu kelas.
 - b) Tumbuhkan pemahaman Anda tentang bagaimana setiap orang memiliki sifat dan keterampilan yang membedakan mereka satu sama lain.
 - c) Menumbuhkan empati terhadap keterbatasan anak dan meningkatkan kepekaan terhadap keterbatasan orang lain.
 - d) Tingkatkan kapasitas Anda untuk membantu dan mengajar setiap

siswa di kelas.

3. Untuk pendidik

- a) Membantu guru dalam memahami kualitas unik setiap anak dan kemampuan yang dimiliki anak berkebutuhan khusus.
- b) Meningkatkan kesadaran di antara semua guru tentang nilai pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus.
- c) Guru akan mengalami tekanan untuk mengembangkan strategi pengajaran baru dan mendorong kerja tim dalam pemecahan masalah.
- d) Mengurangi kebosanan instruksional di antara instruktur.

4. untuk masyarakat

- a) Promosi kesetaraan sosial dan harmoni dalam masyarakat,
- b) promosi kolaborasi dan prinsip-prinsip demokrasi di antara semua warga negara.
- c) Menumbuhkan rasa saling membutuhkan dan solidaritas antar sesama

Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pendidikan menjadi landasan kebijakan Indonesia dalam mengadopsi pendidikan inklusif. Dalam ayat (2) pasal yang sama, dimandatkan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan wajib dibiayai oleh pemerintah. Ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah untuk meringankan beban keuangan orang tua dan mendukung penuntasan wajib belajar sembilan tahun.

Anak-anak penyandang cacat fisik, mental, dan intelektual harus mendapatkan pendidikan Hal itu tertuang dalam UU No. 20 Tahun 2003, ayat 5

ayat (2), bahwa warga negara dari negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Pasal 32 ayat (1) pada halaman yang sama menyebutkan bahwa pendidikan luar biasa diperuntukkan bagi peserta didik yang memiliki ambang stres tinggi selama proses pembelajaran karena kelemahan fisik, emosional, mental, atau sosial, dan/atau yang memiliki potensi kecerdasan dan kecerdasan. kebijaksanaan bawaan.

Pendidikan inklusif adalah konsep yang memungkinkan siswa berkebutuhan khusus ditempatkan dan menerima instruksi di kelas mainstream dan diajar oleh guru mainstream. Menurut Kementerian Pendidikan Malaysia, siswa berkebutuhan khusus adalah mereka yang tunanetra, atau sebagian atau seluruhnya tuli atau menderita ketidakmampuan belajar. Siswa yang telah diidentifikasi menderita kekurangan sensorik fisik dan ketidakmampuan belajar. Kemendikbud menyediakan program pendidikan untuk tiga jenis disabilitas, yaitu, pendengaran, penglihatan dan pembelajaran cacat (Ali, Mustapha , & Jelas, 2006).

Analisis menyeluruh terhadap kebijakan sekolah inklusi di sekolah dasar diperlukan untuk mengetahui apakah program pendidikan inklusi yang telah dilaksanakan berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi kebijakan pendidikan inklusi merupakan langkah dalam proses pembuatan kebijakan publik yang menentukan apakah kebijakan tersebut didukung oleh masyarakat dan sesuai dengan kebutuhan penggunanya.

Dalam hal ini, harus ditekankan bahwa meskipun kebijakan dirancang dengan baik pada tahap perencanaan dan perumusannya, jika tidak ada pertimbangan yang diberikan untuk mengoptimalkan penggunaannya selama tahap implementasi, Analisis menyeluruh terhadap kebijakan sekolah inklusi di sekolah dasar diperlukan untuk mengetahui apakah program pendidikan inklusi yang telah dilaksanakan berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang telah ditetapkan.

Penerapan kebijakan pendidikan inklusi merupakan langkah dalam proses pembuatan kebijakan publik yang menentukan apakah kebijakan tersebut dapat diterima oleh masyarakat dan sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Akibatnya, terlihat bahwa ekspektasi terhadap suatu produk kebijakan menjadi tidak jelas. Akhirnya dapat dikatakan bahwa tahap evaluasi kebijakan akan menghasilkan penilaian bahwa perumusan dan penerapan kebijakan tidak konsisten, penerapan kebijakan tidak seperti yang diharapkan (Nurwan, 2019).

Faktor-faktor yang efektif dalam penerapan pendidikan inklusif adalah, positif sikap guru terhadap dan pengetahuan guru yang memadai tentang pendidikan inklusi antara lain berkontribusi untuk membuat pelaksanaan Pendidikan Inklusi berhasil serta penggunaan pengajaran yang efektif praktik (termasuk membuat adaptasi instruksional) untuk memenuhi kebutuhan siswa penyandang cacat (Alhassan, 2014).

2.1.4 Model pendidikan inklusif

Pendekatan model inklusi komprehensif biasanya digunakan dalam sistem pembelajaran pendidikan inklusif di tingkat sekolah dasar dan menengah, dimana siswa berkebutuhan khusus mengikuti kelas yang sama dengan siswa

tidak berkebutuhan khusus. Kurikulum yang digunakan adalah kurikulum yang disesuaikan yang dibuat dengan mengadaptasi kurikulum satuan pendidikan konvensional dengan gaya belajar anak berkebutuhan khusus. Karena karakteristiknya yang unik, siswa berkebutuhan khusus memerlukan adaptasi kurikuler yang disesuaikan dengan kebutuhannya (Sudarto, 2016).

Dua model utama untuk pendidikan inklusif adalah sebagai berikut. Pertama adalah model inklusi penuh. Anak-anak dengan kebutuhan khusus dapat memperoleh manfaat dari pendidikan individual di kelas reguler berkat ide ini. Yang kedua adalah model inklusi parsial. Model parsial ini memasukkan anak berkebutuhan khusus ke dalam beberapa pembelajaran yang berlangsung di kelas reguler dan ke dalam beberapa pembelajaran yang berlangsung di kelas yang ditarik dengan bantuan instruktur pendamping khusus. Berikut contoh model layanan pendidikan inklusi di Indonesia:

1. Kelas tipikal (inklusi penuh) Anak-anak berkebutuhan khusus menghabiskan sepanjang hari di kelas reguler bersama teman sebayanya yang sedang berkembang, mengikuti kurikulum yang sama.
2. Pelajaran biasa menggunakan kelompok Anak berkebutuhan khusus mengikuti kelas reguler dalam kelompok khusus dimana mereka belajar bersama anak (normal) lainnya.
3. kelas seperti biasa tetapi dengan penarikan Siswa berkebutuhan khusus kadang-kadang meninggalkan kelas reguler untuk belajar di ruang sumber dengan instruktur pembimbing khusus sambil tetap mengikuti kelas utama dengan siswa (biasa) lainnya.
4. Siswa berkebutuhan khusus belajar dalam kelompok khusus di kelas reguler bersama anak-anak (khas) lainnya, kemudian setelah waktu yang

telah ditentukan ditarik dari kelas utama dan dibawa ke ruang sumber untuk belajar dengan instruktur pembimbing khusus .

5. Anak berkebutuhan khusus diintegrasikan dalam kursus khusus di sekolah biasa dengan berbagai cara, tetapi dalam beberapa mata pelajaran mereka dapat mengambil kelas reguler dengan siswa yang biasanya berkembang.
6. Anak berkebutuhan khusus banyak mengikuti kelas pendidikan khusus.

Pendekatan pendidikan inklusif pemerintah Indonesia adalah paradigma pendidikan inklusif sederhana. Dalam hal ini pendidikan inklusi yang mencakup inklusi terpadu dan penuh disebut pendidikan inklusi sedang. Model pengarusutamaan adalah nama yang diberikan untuk pendekatan moderat ini. Paradigma pengarusutamaan pendidikan memadukan pendidikan reguler dengan pendidikan luar biasa (sekolah luar biasa) bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Hanya untuk sementara siswa berkebutuhan khusus diikutsertakan dalam kelas reguler (Sudarto, 2016).

Dasar-dasar pendidikan inklusif sangat berbeda dengan pendidikan khusus. Pendidikan khusus tidak disebut dengan kata inklusi atau pendidikan inklusif. Pendidikan untuk semua dan pertumbuhan sekolah terkait erat dengan gagasan dasar pendidikan inklusif. Suatu jenis strategi inklusi yang disebut pendidikan inklusif bertujuan untuk memberikan layanan pendidikan yang lengkap dan penuh kasih sayang kepada anak-anak berkebutuhan khusus.

Definisi tersebut di atas menunjukkan bahwa, apapun tingkatannya, semua anak berkebutuhan khusus harus ditempatkan di kelas reguler. Dalam pendidikan inklusif, layanan pendidikan disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan khusus anak-anak tertentu dalam kerangka masyarakat tradisional. Dalam hal ini, pendidikan dilihat dari perspektif kebutuhan unik siswa bukan dari kecacatannya

atau alasan kondisinya. Jelas bahwa kebutuhan mereka berbeda satu sama lain.

2.1.5 Upaya Kepala Sekolah dan Guru dalam Implementasi Pendidikan

Inklusi

Dinas pendidikan dan sistem sekolah masih bekerja untuk meningkatkan bagaimana program pendidikan inklusif dilaksanakan. Untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran seluruh orang tua peserta didik di Sekolah Dasar akan dilakukan upaya dalam bidang-bidang sebagai berikut:

1. Sosialisasi;
2. Pelatihan dan lokakarya penanganan anak berkebutuhan khusus;
3. Peningkatan kualitas layanan dalam penyelenggaraan program pendidikan inklusif dan peningkatan kompetensi guru;
4. Pihak sekolah bekerjasama dengan dinas pendidikan mengadakan pelatihan pengembangan model kurikulum dalam upaya reorientasi kurikulum bagi sekolah inklusi;
5. Sekolah terus bekerja sama dengan dinas pendidikan dan pemerintah pusat untuk mencari pendanaan fasilitas sekolah inklusi guna membangun infrastruktur pendukung yang akan meningkatkan layanan pendidikan di sana (Munajah, Marini, & Sumantri, 2021).

2.1.6 Aspek-Aspek Penting Dalam Manajemen Kebijakan Pendidikan Inklusif

Menurut (Prastiyono, 2013) Selain itu, ketika mendirikan sekolah inklusif, faktor penting berikut dalam pengelolaan kebijakan pendidikan inklusif harus diperhatikan:

1. Guru harus memahami cara mengajar siswa dengan berbagai latar belakang dan keterampilan. Keterampilan ini dapat kita kembangkan

dengan berbagai cara, antara lain dengan pelatihan, berbagi pengalaman, lokakarya, membaca buku, mengeksplorasi/mengeksplorasi sumber-sumber lain, dan kemudian mempraktikkannya di kelas.

2. Menurut Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh semua pemerintah nasional di dunia, semua anak memiliki hak atas pendidikan, terlepas dari perbedaan fisik, intelektual, sosial, emosional, bahasa, atau lainnya. kemampuan.
3. Instruktur menghormati setiap siswa di kelas, terlibat dalam percakapan dengan mereka, mendorong interaksi siswa, mencoba membuat pembelajaran menjadi menyenangkan, mempertimbangkan keragaman di kelas, membuat tugas yang dipersonalisasi untuk anak-anak, dan mendorong pembelajaran aktif untuk semua siswa.
4. Setiap orang dalam lingkungan belajar yang inklusif memiliki pemikiran yang sama tentang bagaimana seharusnya anak-anak berkolaborasi, belajar, dan bersenang-senang. Mereka berpikir bahwa pengajaran harus terbuka untuk semua siswa, tidak memihak, dan tanpa bias, peka terhadap semua budaya, dan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari anak-anak.
5. Siswa diajari keterampilan hidup dan bagaimana menjalani gaya hidup sehat dalam lingkungan belajar yang inklusif, yang memungkinkan mereka menggunakan pengetahuan yang telah mereka pelajari untuk melindungi diri dari penyakit dan kerusakan. Selain itu, tidak ada kekerasan fisik atau verbal terhadap anak-anak dan tidak ada hukuman fisik.

Ada 17 indikator untuk mengevaluasi tingkat pendidikan inklusif saat ini di Laos (Grimes, 2010):

1. Setiap siswa merasa betah di kelas
2. Setiap siswa membantu setiap siswa lainnya belajar.
3. Karyawan sekolah memberikan dukungan yang sangat baik untuk semua siswa.
4. Komunikasi yang baik antara orang tua dan pendidik
5. Setiap siswa dihormati sebagai anggota komunitas sekolah yang terhormat.
6. Setiap siswa yakin bahwa pandangan dan pendapatnya dihargai.
7. Setiap siswa memiliki akses ke instruksi di semua pelajaran
8. Seluruh area gedung sekolah dapat diakses oleh semua siswa.
9. Setiap siswa datang ke kelas setiap hari.
10. Semua orang menikmati pelajaran.
11. Setiap mahasiswa mengikuti kegiatan selama perkuliahan.
12. Setiap siswa belajar pada setiap topik sesuai dengan kemampuannya masing-masing.
13. Semua orang belajar bersama
14. Semua siswa memiliki akses ke perawatan medis yang sesuai bila diperlukan
15. Sekolah memastikan semua anak hadir di kelas.
16. Semua anak berisiko mencapai keberhasilan akademik.
17. Lembaga mengembangkan suasana belajar yang mendorong semua siswa untuk belajar.

2.1.7 Manajemen Kebijakan Pendidikan Inklusif

Sebuah metode pendidikan yang dikenal sebagai manajemen pendidikan inklusif memungkinkan semua anak berkebutuhan khusus untuk bersekolah di

sekolah konvensional dan menerima dukungan dan layanan pendidikan yang mereka butuhkan. Semua komponen dan pihak di dalam sekolah terlibat dalam pengelolaan pendidikan inklusi di sekolah reguler (Palupi, 2019).

Menurut Mashun, (2020) Ada empat langkah dalam manajemen suatu kebijakan pendidikan inklusif yaitu:

- 1) Perencanaan (Planning) Menetapkan tujuan dan menyusun penggunaan semua sumber daya yang tersedia—termasuk orang, uang, metode, dan peralatan—untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien merupakan perencanaan untuk pendidikan inklusif. Proses perencanaan dipecah menjadi dua langkah:
 - a) lembaga perencanaan, termasuk visi, misi, peran organisasi, tujuan, dan metode untuk mencapai tujuan tersebut; dan
 - b) merencanakan bagaimana kurikulum akan digunakan dalam pendidikan inklusif. Proses pendidikan berfungsi sebagai panduan untuk konten program, dan kurikulum berfungsi sebagai titik referensi untuk proses pembelajaran,
 - c) mendaftarkan siswa berkebutuhan khusus yang akan mengikuti pendidikan inklusif, dan (infrastruktur untuk mendukung proses pembelajaran),
 - d) mengenalkan anak pada lingkungan tempat mereka belajar,
 - e) Melakukan penilaian pembelajaran inklusi,
 - f) Merencanakan metode pembelajaran inklusi secara umum,

khususnya untuk pembiayaan pendidikan,

g) Merencanakan evaluasi pembelajaran, dan

h) Merencanakan tindak lanjut perolehan hasil evaluasi.

2) Pengorganisasian (Organizing) Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, tugas harus diberikan kepada setiap anggota kelompok saat menyelenggarakan pendidikan inklusif. Dijelaskan bahwa organisasi tersebut meliputi:

a) mengklasifikasikan instruktur PAUD ke dalam kategori yang berbeda berdasarkan peraturan ABK, dan

b) meningkatkan kompetensi guru melalui pendidikan dan pelatihan sesuai dengan persyaratan keahlian pendidik.

3) Pelaksanaan/ Pengelolaan (Actuating) Dalam rangka mewujudkan tujuan sekolah inklusi, kepemimpinan, pelaksanaan supervisi, dan pengelolaan interaksi sekolah dan masyarakat merupakan bagian dari pelaksanaan atau pengelolaan pendidikan inklusi. Ditegaskan bahwa ruang lingkup pengelolaan manajemen pendidikan inklusi sekurang-kurangnya meliputi:

a) Administrasi kesiswaan yang mengutamakan pendidikan anak berkelainan

b) Mengelola kurikulum dengan menyesuaikan kurikulum sekolah konvensional dengan fase perkembangan anak berkebutuhan khusus selama menempuh pendidikan. memperhitungkan sifat dan tingkat spesialisasi mereka; kurikulum harus fleksibel, responsif, dan terintegrasi.

c) Kurikulum yang dapat diadaptasi, sistem manajemen

- pembelajaran yang ramah, dan desain pembelajaran yang fleksibel.
- d) Penilaian manajemen pendidikan inklusi dilakukan untuk melihat apakah semua tindakan yang dilakukan telah berhasil mencapai tujuan yang diinginkan.
 - e) Manajemen pendidik dan tenaga kependidikan, ahli dalam bidang pengajaran, mendidik, memimpin, melatih, dan mengevaluasi peserta didik yang mengikuti program inklusi. Guru, orang tua, wali/pengasuh, dan guru pembimbing khusus semuanya termasuk dalam kategori pendidik. Terapis, tenaga medis, dokter, psikolog, dan staf lab semuanya dianggap sebagai tenaga pendidikan. Guru berinteraksi dengan siswa selama kelas sebagai contoh pembelajaran yang menarik bagi anak berkebutuhan khusus.
 - f) Manajemen fasilitas infrastruktur melibatkan pengawasan peralatan dan perangkat lunak yang diperlukan untuk memastikan pendidikan inklusif berhasil dalam bidang studi tertentu.
 - g) Pemerintah pusat dan daerah, korporasi, lembaga lain, bahkan pemerintah asing dapat menyediakan dana untuk penyelenggaraan pendidikan inklusif.
 - h) Mengelola sumber daya masyarakat, dalam hal ini kontribusi individu dan masyarakat terhadap kemajuan pendidikan melalui pengawasan proses pendidikan di lembaga pendidikan inklusif.
- 4) Pengawasan (Controlling) Rencana yang telah dibuat dengan cermat dan dilaksanakan secara terorganisir tidak menjamin dapat dilaksanakan

dengan sukses. Digarisbawahi bahwa agar suatu rencana dapat dilaksanakan dengan baik, lembaga harus melakukan kontrol atau pengawasan.

Sejalan dengan pendapat di atas menurut Natalia & Mundilarno, (2019) hal yang perlu diperhatikan dalam memanaajemen kebijakan pendidikan inklusif antara lain adalah:

- 1) Perencanaan: berupa pembuatan bahan ajar yang meliputi RPP, PPI, dan silabus. Selain itu, ada program kerja guru pendamping khusus (GPK) yang memuat kegiatan kemahasiswaan selama satu tahun. Kegiatan tersebut meliputi pertemuan kenaikan kelas, musyawarah orang tua, pertemuan rutin koordinator inklusi, guru pendamping khusus (GPK), dan sekolah, serta pembentukan guru pendamping khusus (GPK).
- 2) Pengorganisasian Pembagian kerja yang dilakukan sebagai bagian dari pengorganisasian menjadikan pekerjaan lebih produktif dan efisien.
- 3) pelaksanaan Pengajaran dilakukan oleh guru melalui berbagai kegiatan, seperti:
 - a) menyajikan bahan pelajaran secara jelas dan metodis;
 - b) menumbuhkan lingkungan belajar yang inklusif dan demokratis;
 - c) menjunjung tinggi wibawa guru di dalam kelas; dan
 - d) menggunakan berbagai teknik mengajar.
- 4) Evaluasi dalam program pembelajaran inklusif dilakukan dalam dua bentuk: (1) menindaklanjuti temuan penilaian yang telah dilakukan selama kegiatan belajar mengajar; dan (2) menilai selama kegiatan belajar mengajar, baik secara lisan, tulisan, maupun melalui observasi.mengajar.

2.2 Studi Sebelumnya

1. Penelitian yang dilakukan oleh Zaini Sudarto tahun 2016 dengan judul “Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif” Sistem penyelenggaraan pendidikan yang dikenal dengan pendidikan inklusi memberikan kesempatan kepada semua siswa berkebutuhan khusus untuk mengikuti kelas atau belajar di luar kelas bersama siswa lainnya (Pergub Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011). Dalam implementasi kebijakan pendidikan inklusi di enam sekolah inklusi di tingkat SD dan SMP, ditemukan beberapa permasalahan yang cukup banyak diketahui antara lain kekurangan guru Pendidik Khusus (GPK), kurangnya ruangan yang diperuntukan untuk penanganan anak penyandang disabilitas berkebutuhan khusus (ABK), Kurangnya psikolog atau pembimbing konseling (BK), tidak adanya sosialisasi kepada masyarakat sekitar sekolah tentang pendidikan inklusi, dan ketidaktahuan tentang pendidikan inklusi. Gambaran tentang bagaimana rencana pendidikan inklusif pemerintah telah diterapkan di tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama adalah tujuan dari penelitian ini. Penelitian deskriptif dengan metodologi kualitatif merupakan jenis penelitian yang digunakan. Penelitian ini berfokus pada bagaimana pendidikan inklusif diimplementasikan dengan menggunakan teori Merile S. Grindle, dan data dikumpulkan melalui metode triangulasi, wawancara, dokumentasi, dan observasi. Pergub Jatim Nomor 6 Tahun 2011 telah memenuhi seluruh kepentingan siswa berkebutuhan khusus berdasarkan temuan penelitian pada variabel muatan kebijakan. Semua orang tua anak berkebutuhan

husus merasakan manfaat dari penetapan program penyelenggaraan pendidikan inklusif yang menjadi fokus pembenahan dari gubernur Jawa Timur. yang masih diperebutkan. Diharapkan para pelaksana kebijakan tetap memberikan penyuluhan atau pelatihan kepada guru reguler tentang cara pelaksanaan pendidikan inklusi, melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang cara pelaksanaan pendidikan inklusi, mengalokasikan lebih banyak guru pendidik luar biasa, dan bekerjasama dengan lembaga pendidikan luar biasa untuk mengikuti penelitian peneliti. rekomendasi. dalam melakukannya, pendidik (GPK).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan implementasi peraturan pemerintah seputar pendidikan inklusif di tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, menggambarkan perbedaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Penerapan pendidikan inklusi dengan menggunakan teori Merile S. Grindle menjadi penekanan utama penelitian ini. Persamaan adalah teknik penelitian kualitatif yang mengumpulkan data melalui triangulasi, dokumentasi, wawancara, dan observasi.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Rina Hizriyani tahun 2018 dengan judul “Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif Pada Sekolah Paud Dan Ra” Temuan penelitian ini menunjukkan perlunya model dan pola Pendidikan Anak Usia Dini (TK) yang dapat mengubah tatanan era informasi dan teknologi global untuk mencapai kualitas perkembangan anak yang terintegrasi. Untuk membantu anak tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya dan menyiapkannya untuk bersekolah, tumbuh kembang anak yang diharapkan adalah pembinaan yang diberikan kepada mereka sejak

lahir sampai dengan usia enam (enam) tahun melalui jalur pendidikan nonformal termasuk kelompok bermain dan anak usia dini. fasilitas pendidikan. Tujuan dari pendidikan inklusif adalah untuk mengubah sistem pendidikan dengan menghilangkan segala hambatan yang dapat menghalangi siswa untuk berpartisipasi sepenuhnya. Rintangan yang ada dapat disebabkan oleh masalah dalam keluarga atau faktor lingkungan, psikologis, atau fisik, antara lain. Untuk memaksimalkan potensi setiap siswa, Bersama dengan anak didik yang tumbuh normal, anak berkebutuhan khusus dididik melalui pendidikan inklusi. Karena tahapan kehidupan ini sangat menentukan bagi pertumbuhan dan perkembangan generasi penerus anak, maka pendidikan anak usia dini sangat menentukan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang hebat di usia muda (golden age). Kesehatan, nutrisi, dan stimulasi psikologis juga harus dipupuk sejak usia muda untuk menentukan kualitas manusia. Dalam penulisan kualitatif, metode pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, angket, dokumentasi, dan kombinasi keempatnya (Sugiyono, 2010). Selain itu, beberapa materi berbasis wawancara yang akan penulis gunakan adalah berdasarkan wawancara yang pernah penulis lakukan sebelumnya, ketika penulis sempat melihat mata pelajaran di Universitas Muhammadiyah Cirebon. Untuk melengkapi data makalah ini, penulis juga akan melakukan beberapa wawancara.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji model dan pola penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, yang menyoroti perbedaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti

(TK). Penulisan kualitatif memungkinkan penggunaan observasi, wawancara, angket, dokumentasi, dan kombinasi keempatnya sebagai metode pengumpulan data.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Mukhlis tahun 2011 dengan judul “Kebijakan Pendidikan Inklusif: Implementasinya Pada Satuan Pendidikan Dasar di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia” Sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2008, Di 83 SD di dua belas kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan, kebijakan pendidikan inklusi telah dipraktikkan. Konteks ini menjadi landasan untuk merancang tujuan penelitian, yaitu menilai sejauh mana kebijakan pendidikan inklusif diimplementasikan dengan memperhatikan perilaku kelompok sasaran dan sejauh mana kebijakan diimplementasikan. Seluruh pendidik sekolah dasar di Sulawesi Selatan yang melaksanakan pendidikan inklusif termasuk dalam populasi. Metode sampling acak proporsional bertingkat digunakan untuk mengumpulkan data dari 309 responden, termasuk anggota komite sekolah, guru, dan kepala sekolah. analisis data menggunakan model persamaan struktural (SEM). Menurut temuan penelitian, penerimaan pelaksanaan pendidikan inklusi kurang berhasil dibandingkan dengan penerimaan pelaksanaan secara keseluruhan. Prosedur pelaksanaannya belum dilakukan. Tergantung pada perilaku kelompok sasaran, implementasi. Kebijakan itu efektif. Elemen internal, seperti kebebasan berinteraksi, pemerataan akses, jangkauan, manajemen, dan isi kebijakan, serta faktor eksternal, seperti koordinasi dan suasana yang inklusif, semuanya mempengaruhi bagaimana kebijakan diimplementasikan.

Tujuan penelitian adalah untuk menilai tingkat penerimaan

implementasi kebijakan pendidikan inklusif dari aspek tingkat penerimaan implementasi kebijakan, proses implementasi kebijakan, dan perilaku kelompok sasaran yang menjadi perbedaan penelitian. dari studi sebelumnya. Kemiripannya adalah penelitian-penelitian sebelumnya telah mengkaji variabel-variabel yang mempengaruhi penerapan kebijakan inklusif.

4. Penelitian yang dilakukan oleh (Munajah, Marini, & Sumantri, 2021) dengan judul “Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar” Bagi kepala sekolah dan guru di lembaga pendidikan, sekolah dasar inklusi menghadirkan tantangan yang unik. Sekolah dasar perlu lebih memperhatikan pendidikan inklusi mengingat siswa masih membutuhkan perhatian guru yang luas dan masih terdapat siswa berkebutuhan khusus. Hal ini tentu saja membuat tujuan pembelajaran menjadi sulit tercapai. Tujuan penelitian ini adalah untuk melacak dan mengkaji fenomena yang muncul ketika pendidikan inklusif dipraktikkan di sekolah dasar. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, ditelaah pelaksanaan pendidikan inklusi di sekolah dasar oleh karena itu diputuskan bahwa guru perlu mempelajari lebih lanjut tentang faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pembelajaran. tingkatan akademis. di sekolah dasar, layanan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengamati dan mendeskripsikan kejadian-kejadian yang terjadi selama pelaksanaan pendidikan inklusi di sekolah dasar. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya dalam hal ini. Persamaan yang menganalisis adanya unsur pendorong dan penghambat dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi di sekolah dasar adalah metode kualitatif deskriptif.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Prastiyono tahun 2013 dengan judul “Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif (Studi di Sekolah Galuh Handayani Surabaya). Metodologi dalam penelitian ini adalah kualitatif. Suatu teori yang telah diterima kebenarannya dapat menjadi dasar penelitian kualitatif, yang kemudian dapat disusun berdasarkan data yang terkumpul pada saat penelitian dilakukan. Data mendalam dikumpulkan selama penelitian kualitatif menggunakan metodologi kualitatif, dan data ini relevan. Fokus utama kajian ini adalah pada: a. Melihat bagaimana para pelaksana dari sekolah dan lembaga pendidikan Pemerintah Kota berperilaku ketika mempromosikan praktik pendidikan inklusif. b. Pengamat instruktur di sekolah inklusif Galuh Handayani Surabaya melakukan kegiatan kerja di dalam kelas. c. Mencermati proses pembelajaran pendidikan inklusi yang sedang berjalan. d. Mencermati pengelolaan evaluasi dan monitoring pendidikan inklusi. Analisis juga menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil kajian yang melibatkan informan antara lain birokrat pendidikan, guru, tenaga kependidikan, dan masyarakat menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan inklusi sekolah Galuh Handayani di Surabaya belum sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat. Hal tersebut dikarenakan adanya penanggung jawab dalam menjalankan kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Disabilitas dan Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Khusus. tidak dapat menjelaskan ketentuan-ketentuannya.

Berikut adalah beberapa contoh bagaimana fokus penelitian ini

menonjolkan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti: a. Melihat bagaimana para pelaksana dari sekolah dan lembaga pendidikan Pemerintah Kota berperilaku ketika mempromosikan praktik pendidikan inklusif. b. Pengamat instruktur di sekolah inklusif Galuh Handayani Surabaya melakukan kegiatan kerja di dalam kelas. c. Mencermati proses pembelajaran pendidikan inklusi yang sedang berjalan. d. Mencermati pengelolaan evaluasi dan monitoring pendidikan inklusi. Persamaan tersebut merupakan teknik penelitian kualitatif.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Ery Wati dengan judul “Manajemen Pendidikan Inklusi Di Sekolah Dasar Negeri 32 Kota Banda Aceh” Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi program pendidikan inklusi SD Negeri 32 Kota Banda Aceh, pelaksanaan manajemen pendidikan inklusi, dan tantangan yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Peserta dalam proses pembelajaran meliputi wakil kepala sekolah, wali kelas, guru pendamping khusus, dan orang tua. Temuan penelitian ini menyiratkan bahwa:

- a) Program kepala sekolah untuk melaksanakan pendidikan inklusif dilakukan melalui persiapan guru, penerimaan siswa berkebutuhan khusus, adaptasi kurikulum, dan mengidentifikasi infrastruktur dan fasilitas sekolah yang sesuai dengan kebutuhan siswa.
- b) Tahun pelajaran 2009–2010 terdapat 19 siswa berkebutuhan khusus, 1 (satu) guru pendamping khusus, dan kurikulum yang

disesuaikan dengan kebutuhan anak, menunjukkan penerapan manajemen pendidikan inklusi.

- c) Minimnya dana untuk pendidikan, infrastruktur yang tidak memadai, dan instruktur pendamping khusus menjadi penghambat program pendidikan inklusi.

7. Penelitian yang dilakukan oleh Mashun (2020) yang berjudul “Implementasi Manajemen Pendidikan Inklusi Pada SD Al Firdaus Surakarta dan SDN Karanganyar Yogyakarta: Suatu Evaluasi Program” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konteks, masukan, proses, dan hasil pendidikan inklusif di SD Al Firdaus Surakarta dan SDN Karanganyar Yogyakarta. Konteksnya dibentuk oleh tuntutan lokal dan penerapan program untuk mencapai tujuan. Siswa, fakultas, kurikulum, lingkungan, dan penilaian terdiri dari input. Manajemen pembelajaran, implementasi, dan perencanaan membentuk proses. Hasil akhir berupa hasil belajar agama siswa terkait perkembangan sosial emosional, kognitif, motorik, dan bahasa. Kesimpulan dari penelitian tentang pelaksanaan pendidikan inklusi di SD Al Firdaus Surakarta dan SDN Karanganyar Yogyakarta adalah sebagai berikut: (1) Komponen konteks SD Al Firdaus Surakarta dinilai sangat baik, sedangkan komponen konteks SDN Karanganyar Yogyakarta dinilai baik. (2) SDN Karanganyar Yogyakarta dikategorikan baik, sedangkan SD Al Firdaus Surakarta dinilai memiliki kualitas input yang sangat baik. (3) SDN Karanganyar Yogyakarta dan SD Al Firdaus Surakarta dinilai memiliki proses yang sangat baik. (4) SD Al Firdaus Surakarta termasuk dalam kategori sangat baik, sedangkan SD

Karanganyar Yogyakarta termasuk dalam kategori baik.

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan keseluruhan proses dalam penelitian. Penelitian ini dilakukan guna mengetahui manajemen penyelenggaraan Pendidikan inklusif di Sekolah Dasar Negeri 131 Kota Jambi.

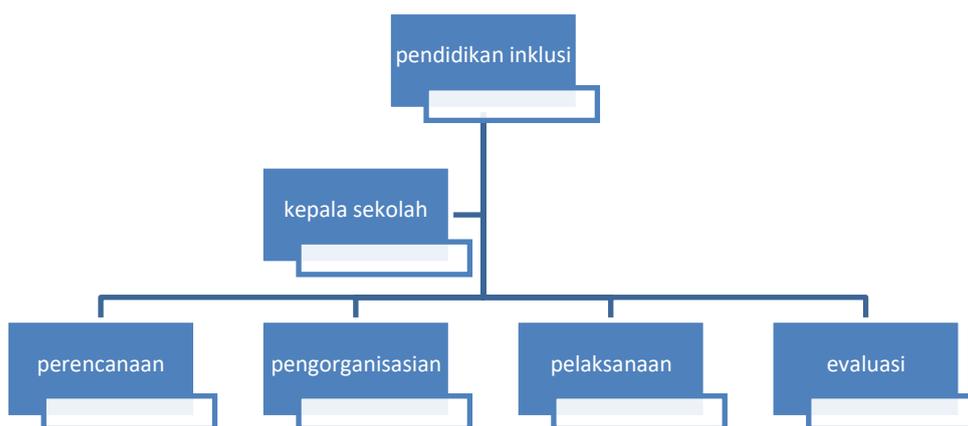
Kepala sekolah memiliki peran paling penting dalam sistem persekolahan. Kepala sekolah mengawasi semua kegiatan sekolah selain bertindak sebagai pemimpinnya. Tugas kepala sekolah termasuk mengelola semua anggota staf, termasuk guru, murid, dan pekerja pendukung. Prinsip tersebut berdampak signifikan terhadap peningkatan kualitas proses pembelajaran di sekolah sebagai penanggung jawab pendidikan/pembelajaran, baik melalui penerapan kurikulum kewirausahaan yang efisien maupun kebijakan dalam peningkatan kompetensi pendidik (Suharsaputra, 2018).

Merujuk pada pandangan diatas, maka sudah sewajarnya kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan berkewajiban dalam membantu guru meningkatkan dan memperbaiki keterampilan mengajar yang dimilikinya. Hal ini penting dilakukan oleh kepala sekolah mengingat guru sebagai pendidik harus senantiasa mengembangkan dan memperbaharui keilmuannya secara berkesinambungan guna mengimbangi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat.

Keberadaan prinsip sekolah mirip dengan kapten kapal, yang mengambil komando, mengarahkan kapal, dan memasang jangkarnya. Serupa dengan pengawas, kepala sekolah memilih tujuan dan jalur yang akan ditempuh lembaganya. Mengelola administrasi kegiatan belajar mengajar, serta bimbingan

dan konseling, kesiswaan, tenaga kerja, uang, sarana, dan prasarana, serta pengelolaan administrasi surat, merupakan tugas pimpinan pendidikan sebagai administrator (Muspawi, 2020).

Berdasarkan argumen diatas, maka dapat dirumuskan kerangka pikir dengan menggunakan bagan sebagai berikut:



Gambar 2 1 Bagan Alur Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode dan Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian Fenomenologi. Sebagaimana menurut (Sugiyono, 2013) bahwa Metode deskriptif adalah salah satu yang menganalisis atau menggambarkan hasil studi tanpa menarik kesimpulan umum. Selain itu, penelitian kualitatif didefinisikan oleh Moleong (2014) sebagai penelitian yang menghasilkan proses analisis tanpa menggunakan analisis statistik atau kuantifikasi lainnya. Menurut skenario saat ini, sikap dan perspektif masyarakat, keterkaitan antara variabel yang muncul, konflik antara dua atau lebih kondisi, ketidaksesuaian antara fakta yang tersedia dan dampaknya terhadap suatu kondisi, dan faktor lainnya, penelitian ini menjelaskan dan mendefinisikan data yang bersangkutan.

Senada dengan pendapat Creswell, (2014) fenomenologi juga digunakan untuk menjelaskan pentingnya pengalaman pribadi atau kejadian. Interaksi antara orang-orang dan pengalaman yang mereka temui menentukan makna yang terkandung di dalamnya. Ketika sampai pada itu, fenomenologi adalah salah satu metodologi penelitian kualitatif yang berusaha memahami atau menjelaskan signifikansi suatu hal, gejala, atau peristiwa yang dialami orang dan kelompok secara sadar. Dengan penelitian fenomenologi ini, peneliti berusaha mengungkap tentang manajemen penyelenggaraan pendidikan inklusif di SDN 131 Kota Jambi.

Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini karena penulis

bermaksud mendeskripsikan dan menggambarkan secara apa adanya serta mendalam mengenai manajemen penyelenggaraan pendidikan inklusif di SDN 131 Kota Jambi.

Dalam penelitian ini peneliti terlebih dahulu telah melaksanakan *Preliminary research* (penelitian awal)/observasi awal melalui pengamatan terhadap semua kegiatan pada tanggal 5 September hingga 7 September 2022 di SDN 131 Kota Jambi untuk memperoleh beragam informasi yang bersumber subjek penelitian.

Tabel 3.1 Jadwal Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Bulan			
		Sept	Okt	Nov	Des
1.	Persiapan Penelitian	■			
	a. Pengajuan Judul Proposal				
	b. Observasi (pengamatan awal)				
	c. Penyusunan Proposal Penelitian (sesuai pedoman MMP)				
	d. Seminar Proposal				
	e. Revisi Seminar Proposal		■		
	f. Penyusunan Instrumen	■	■		
	g. Pengurusan Izin Penelitian		■		
2.	Pelaksanaan Penelitian				
	a. Pelaksanaan penelitian		■		
	b. Analisis Hasil penelitian		■		
3.	Pelaksanaan ujian dan Revisi				
	a. Pelaksanaan ujian			■	
	b. Pelaksanaan Revisi			■	

3.2 Lokasi dan Akses Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di SD negeri 131 Kota Jambi. yang berlokasi di JL. A.CHATIB, Pematang Suulur, kec. Telanai Pura, Kota Jambi. . Adapun alasan memilih lokasi tersebut sebagai lokasi penelitian karena berdasarkan observasi awal pada tanggal 5-7 September 2022 terdapat beberapa permasalahan mengenai penerapan kebijakan pendidikan inklusif. Sehingga penulis sangat tertarik untuk melakukan sebuah *research* di lokasi tersebut. Lebih lanjut untuk mendapatkan akses ke lokasi penelitian, peneliti menggunakan berbagai jaringan dan hubungan yang sudah terbangun sebelumnya.

3.3 Prosedur Sampling dan Peserta Penelitian

Menurut Sugiyono, (2013) dalam penelitian kualitatif teknik sampling yang paling sering digunakan adalah *snowball sampling* dan *purposive sampling*. *Snowball sampling* adalah metode pengumpulan sumber data di mana, jika ukuran sampel kecil dari sumber pada awalnya tidak dapat menawarkan data yang memadai, peneliti mencari sumber potensial berikutnya, meningkatkan ukuran sampel seiring berjalannya waktu. *Purposive sampling* adalah pendekatan pengambilan sampel yang mempertimbangkan faktor-faktor tertentu, seperti orang yang paling terlibat dan mengetahui tentang harapan peneliti untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan lebih representatif.

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan teknik *purposive sampling*. Adapun alasan memilih teknik sampling ini karena keterbatasan waktu, jaringan, serta uang untuk mendapat informan penelitian. Namun teknik ini tentunya tidak akan mengurangi kredibilitas data penelitian, serta teknik ini sangat cocok untuk

penelitian ini karena memberi peneliti kebebasan atau keleluasaan untuk mencari partisipan yang dapat memberi informasi data yang benar-benar akurat dalam menjawab pertanyaan penelitian.

Dalam purposive sampling ini kriteria yang diambil oleh peneliti adalah:

- a. Kepala sekolah sebagai pembuat kebijakan
- b. Ka subag TU
- c. Guru yang telah melakukan pelatihan pendidikan inklusif
- d. Guru yang memang mengajar di kelas inklusif
- e. Guru yang telah mengajar dikelas inklusif lebih dari 5 tahun

Sampel dan subjek penelitian dalam penelitian ini juga mencakup sejumlah individu yang terlibat dalam mempraktekkan kebijakan pendidikan inklusif. Partisipan dalam penelitian ini termasuk banyak instruktur yang mengajar pendidikan inklusif serta kepala sekolah yang berperan sebagai pemimpin.

Untuk memudahkan peneliti dalam mengeksplorasi objek/situasi sosial yang diteliti, yang tentunya juga termasuk keterlibatan subjek dalam implementasi kebijakan pendidikan inklusi, maka partisipan penelitian dalam penelitian ini dipilih berdasarkan subjek yang dianggap paling tahu. tentang apa yang akan dipelajari.

3.4 Prosedur Pengumpulan Data

Semua metode, prosedur, dan teknik yang digunakan dalam pengumpulan data. Setiap teknik pengumpulan data kualitatif, termasuk observasi, wawancara, dan dokumentasi, memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk melengkapi satu sama lain dan mengurangi kemungkinan perbedaan, berbagai metode pengumpulan data digunakan secara bersamaan dalam penelitian ini. Adapun prosedur pengumpulan data yang digunakan yaitu :

3.4.1 Observasi

Untuk mengumpulkan data, observasi memerlukan pengamatan dekat terhadap objek yang diteliti. Sesuai (Moleong, 2014), metode observasi adalah cara untuk mengumpulkan data dengan mengamati dan mendokumentasikan kejadian yang sedang diselidiki. Seperti yang dikemukakan oleh Stainback yang dikutip oleh Sugiyono (2013), Selama pendekatan observasi partisipatif, peneliti akan mengamati apa yang dilakukan orang, memperhatikan apa yang mereka katakan, dan terlibat dalam pengejaran mereka. Dengan menggunakan pendekatan observasi partisipatif, peneliti akan mengevaluasi, memantau, mencatat, dan merekam informasi penting yang berkaitan dengan metode observasi dalam penelitian ini.

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan observasi terfokus, yaitu observasi yang telah dibatasi untuk memusatkan perhatian pada unsur-unsur tertentu. Mengenai tata cara observasi penelitian, yaitu melakukan observasi tentang: manajemen penyelenggaraan pendidikan inklusif dilihat dari segi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi..

3.4.2 Wawancara

Metode wawancara sebagaimana menurut Moleong, (2014) bahwa wawancara merupakan percakapan dengan tujuan tertentu yang saling melibatkan kedua belah pihak, dimana dikenal dengan istilah pewawancara (*interviewer*) orang yang memberikan pertanyaan serta narasumber (*interviewees*) yaitu orang yang memberikan jawaban dari pewawancara melalui pertanyaan yang diberikan.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tipe wawancara terstruktur

(*structured interview*) dalam proses pengumpulan data. Bila menggunakan wawancara terstruktur, pewawancara sudah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan tertulis. Hal ini karena wawancara terstruktur digunakan ketika peneliti sudah mengetahui apa yang akan dipelajari. Selain itu, peneliti menggunakan teknik wawancara terbuka di mana subjek menyadari bahwa mereka sedang ditanyai serta alasan dan tujuan di baliknya.

Metode wawancara yang secara mendalam dilakukan peneliti dengan maksud untuk mengetahui berbagai informasi dan data pelengkap keadaan, kondisi sosial, budaya, kecendrungan sekitaran subjek mengenai Manajemen penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di SDN 131 Kota Jambi. Untuk lama durasi dan lokasi proses wawancara akan dilakukan penyesuaian kondisi peserta penelitian.

Adapun sebagai pewawancara dalam penelitian ini adalah penulis dan sebagai peneliti sedangkan untuk narasumber dalam penelitian ini meliputi: a. Kepala sekolah, b. ka subag TU, c. 4 orang guru yang mengajar dikelas inklusif, dan d. Orang tua murid ABK.

3.4.3 Dokumen

Dalam penelitian kualitatif, studi dokumen merupakan pelengkap penggunaan teknik observasi dan wawancara. Dokumen adalah catatan tentang apa pun. Dokumen bisa berupa tulisan, gambar, atau upaya kolosal seseorang (Sugiyono, 2013).

Untuk mengumpulkan informasi tentang implementasi kebijakan pendidikan inklusi dan dokumen lain yang dianggap relevan dengan data yang diperlukan untuk penelitian, peneliti menggunakan studi dokumen dalam penelitian ini. Untuk dapat mengumpulkan informasi tentang profil sekolah, visi

dan misi sekolah, tenaga pendidik dan kependidikan, struktur organisasi sekolah, dan siswa, peneliti menggunakan studi dokumentasi dalam dokumen ini.

3.5 Kredibilitas Data

Penelitian kualitatif harus memenuhi keabsahan data. Oleh karena itu penelitian ini menggunakan kriteria yaitu :

3.5.1 Derajat kepercayaan (Credibility)

Penerapan Validitas internal dari penelitian non-kualitatif dimaksudkan untuk digantikan dengan penggunaan kriteria derajat kepercayaan. Oleh karena itu, proses analisis data (pengumpulan, reduksi, penyajian, dan penarikan data) selalu dilandasi oleh:

1. Peneliti menyelesaikan pekerjaannya dalam waktu dua bulan, itupun mereka kembali ke lokasi penelitian untuk mengumpulkan informasi yang tertinggal. Jumlah waktu ini cukup untuk mengumpulkan berbagai item untuk mengatasi berbagai masalah dalam penelitian ini. Selain itu, SDN 131 Kota Jambi secara seksama, sengaja, dan berkesinambungan melakukan prosedur observasi.
2. Referensi yang cukup. Data yang telah dikumpulkan, diarsipkan, dan akhirnya diperoleh berfungsi sebagai referensi untuk menentukan apakah analisis atau kesimpulan yang dicapai akurat. Jika data dan kesimpulan sejalan, maka temuan tersebut valid.
3. *Member Check*. Dalam penelitian ini dilakukan pengecekan ulang terhadap berbagai data, kategori analitis, interpretasi, dan

kesimpulan yang diperoleh dari lokasi penelitian untuk memastikan keabsahan data yang terkumpul. Pemeriksaan ini rutin dilakukan, kadang formal dan kadang tidak. untuk menangkap secara objektif makna dan informasi yang ada di lokasi penelitian. Disamping itu, untuk mencegah bias dalam pengumpulan data yang tidak memiliki kepentingan dengan proses kegiatan belajar dan mengajar di lokasi penelitian.

Peneliti datang kembali ke sekolah pada tanggal 22 Desember 2022 dan melakukan member check terhadap narasumber wawancara, untuk memastikan jawaban wawancara sesuai dengan apa yang peneliti tulis dalam hasil dan pembahasan.

4. Evaluasi kasus yang tidak berhasil. Teknik analisis kasus negatif ini dimaksudkan untuk menyoroti ketidakpastian seputar temuan sebagai hasil dari beragam data yang telah dikumpulkan dan digunakan sebagai tolok ukur. Dengan tetap memperhatikan kasus-kasus buruk yang terpantau di lapangan, proses ini dilakukan.
5. Triangulasi. Dalam penelitian ini, digunakan dua bentuk prosedur triangulasi yang berbeda. Jenis pertama melibatkan membandingkan hasil wawancara dengan masing-masing peserta penelitian untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh akurat. Kedua teknik triangulasi metode dengan pengecekan hasil penelitian dengan teknik pengumpulan data yang berbeda yakni wawancara, observasi dan dokumentasi sehingga akan diperoleh tingkat kepercayaan data yang benar-benar akurat.

6. Diskusi diantara rekan kerja. Hal ini dilakukan untuk mengumpulkan umpan balik dan ide dari rekan-rekan tentang proses penelitian, desain penelitian, deskripsi, analisis, dan interpretasi data yang dikumpulkan, serta kesimpulan sementara yang dicapai oleh peneliti.

3.5.2 Keteralihan

Tujuan dari distraksi adalah untuk menciptakan pemahaman bersama antara peneliti dan pembaca atau pengunggah. Namun, dengan penelitian kualitatif, sejauh mana temuan dapat digunakan dalam konteks dan keadaan tertentu sebenarnya tergantung pada pembaca atau pengguna (Moleong, 2014). Akibatnya, ketika mempresentasikan temuan mereka dan metodologi studi, peneliti menggambarkan kejadian aktual dan data informan dengan sangat rinci. dianalisis dan dievaluasi berdasarkan teori dan konsep yang telah dikembangkan dengan harapan dapat diterapkan ke situs lain dengan kondisi lingkungan dan karakteristik masalah yang serupa.

3.5.3 Ketergantungan

Untuk memenuhi kriteria tersebut, seluruh langkah dalam menyusun kerangka penelitian, desain penelitian, hasil deskripsi, dan interpretasi data diuji kembali melalui proses pemeriksaan yang lebih cermat dan menyeluruh. Ketergantungan dikenal sebagai reliabilitas dalam istilah konvensional, yang merupakan persyaratan untuk validitas.

3.5.4 Kepastian

Dalam penelitian ini, kriteria kepastian mencoba untuk memastikan bahwa temuan penelitian tidak melenceng atau menyimpang dari rumusan masalah,

realitas saat ini, atau tujuan penelitian. Oleh karena itu, peneliti menggunakan pelacakan data, pelacakan, atau catatan pelacakan untuk memastikan akurasi. Peneliti kemudian akan mengumpulkan informasi yang diperlukan, termasuk data mentah, temuan analisis, dan catatan proses penelitian, untuk menyelesaikan pelacakan audit.

3.6 Analisis Data

Analisis data adalah proses pengumpulan data sehingga dapat dianalisis; mengumpulkan data memerlukan kemampuan untuk mengelompokkannya menurut tren, tema, atau klasifikasi. Sugiyono (2013) Mengatur data ke dalam kategori, membaginya menjadi unit-unit, menyusunnya menjadi pola, dan menentukan mana yang paling signifikan dan relevan adalah langkah-langkah dalam proses metodis pengumpulan data yang dikumpulkan dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Menarik kesimpulan dari apa yang ditemukan untuk membantu Anda lebih memahami diri sendiri dan orang lain. Analisis data kualitatif dalam penelitian ini dianalisis menggunakan teknik analisis data menurut Miles dan Huberman dikutip Sugiyono (2013) yang meliputi langkah- langkah berikut ini :

1. *Data Reduction* (Reduksi data) Reduksi data mengacu pada pengambilan inti atau inti dari data yang dikumpulkan. Hasilnya, Peneliti akan lebih mudah mengumpulkan informasi tambahan dan bahkan melakukan pencarian sesuai kebutuhan dengan bantuan data yang dipadatkan, yang akan memberikan gambaran yang lebih jelas. Hasil wawancara dengan kepala sekolah dan peneliti akan digunakan untuk mengumpulkan data lapangan untuk proyek ini. Dari seluruh data yang terkumpul selama tahap pengumpulan data, peneliti akan memisahkan materi yang dianggap penting dan yang mengarahkan

peneliti ke arah tujuan utama penelitian kualitatif ini. Dalam penelitian ini tujuan utama yang dimaksudkan yaitu mendeskripsikan mengenai manajemen penyelenggaraan pendidikan inklusif di SDN 131 Kota Jambi.

2. *Data Display* (Penyajian Data) Peneliti sekarang memberikan data setelah dipadatkan. Proses pengumpulan data seperti yang terlihat pada uraian berikut ini, agar lebih mudah menarik kesimpulan yang tepat dan untuk merencanakan penelitian selanjutnya, dikenal dengan istilah penyajian data. Data tersebut kemudian disajikan dalam bentuk prosa naratif. Pada tahap ini, peneliti akan menawarkan pedoman wawancara beserta data-data yang telah disortir oleh peneliti, khususnya data yang mengarahkan peneliti pada tujuan utama penelitian dengan menarasikan tentang bagaimana manajemen penyelenggaraan pendidikan inklusif di SDN 131 Kota Jambi.
3. *Conclusion Drawing/Verification* (Menarik Kesimpulan) Membuat pemeriksaan langkah terakhir data melibatkan verifikasi dan pengambilan kesimpulan. Kesimpulan awal yang dibuat bersifat tentatif dan dapat berubah. Akibatnya, temuan selalu diperiksa selama proses studi dan tidak diubah jika data yang cukup tidak dikumpulkan untuk mendukungnya di tahap selanjutnya. Namun, kesimpulan itu benar atau dapat dipercaya jika dikonfirmasi oleh bukti yang andal dan konsisten ketika peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif harus merupakan temuan baru yang belum pernah dibuat sebelumnya. Akibatnya, kesimpulan dapat mengambil bentuk deskripsi atau deskripsi item yang sebelumnya tidak jelas atau gelap, yang, setelah diamati lebih dekat, dapat mengungkapkan hubungan kausal dan interaksi, hipotesis, atau teori (Sugiyono, 2013).

3.7 Penyajian Hasil Data

Penyajian hasil data yang dilaksanakan dalam penelitian ini mengacu pada tahap atau prosedur menurut Bogdan dan dimodifikasi oleh (Moleong, 2014). Tahapan penelitian ini menyajikan tiga tahapan yaitu 1) tahap pra lapangan, 2) tahap pekerjaan lapangan dan 3) tahap analisis data :

1. Tahap pra lapangan

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah sebagai berikut :

- a. Meminta izin untuk melakukan penelitian di SDN 131 Kota Jambi
- b. Penyusunan pedoman observasi dan wawancara
- c. Membuat kesepakatan dengan kepala sekolah SDN 131 Kota Jambi
- d. mengenai waktu yang digunakan untuk penelitian

2. Tahap Pekerjaan lapangan

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan observasi dan wawancara serta dokumentasi untuk mengetahui bagaimana penerapan kebijakan pendidikan inklusif di Kota Jambi.

3. Tahap analisis data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis sesuai dengan teknik analisis data menurut Miles dan Huberman dikutip (Sugiyono, 2013) yaitu :

- a. *Data reduction* (reduksi data)
- b. *Data display* (pemaparan data/kategorisasi) dan
- c. *Conclusion drawing/verification* (penarikan kesimpulan).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada BAB IV ini Untuk mendeskripsikan penyelenggaraan pendidikan inklusi di SDN 131 Kota Jambi, peneliti akan memberikan penjelasan tentang topik utama penelitian. Menggunakan metodologi kualitatif deskriptif, penelitian ini. Peneliti harus hati-hati mempertimbangkan perasaan, pernyataan, dan tindakan sumber data saat menganalisis data. Dalam penelitian kualitatif, kesimpulan ditarik dari kejadian aktual, pengalaman partisipan, dan perasaan daripada perasaan peneliti.

4.1 Deskripsi Lokasi/Objek Penelitian

4.1.1 profil SDN 131 Kota Jambi

1. Identitas Sekolah

1	Nama Sekolah	:	SD NEGERI 131IV JAMBI
2	NPSN	:	10504496
3	Jenjang Pendidikan	:	SD
4	Status Sekolah	:	Negeri
5	Alamat Sekolah	:	JL. A. CHATIB
	RT / RW	:	14 / 0
	Kode Pos	:	36124
	Kelurahan	:	Pematang Sujur
	Kecamatan	:	Kec. Telanai Pura
	Kabupaten/Kota	:	Kota Jambi
	Provinsi	:	Prov. Jambi
	Negara	:	Indonesia
6	Posisi Geografis	:	-1,6064 Lintang 103,5703 Bujur

2. Data Pelengkap

7	SK Pendirian Sekolah	:	421.2/108/1981
8	Tanggal SK Pendirian	:	1981-12-21

9	Status Kepemilikan	: Pemerintah Daerah
10	SK Izin Operasional	: 421.2/108/1981
11	Tgl SK Izin Operasional	: 1981-12-21
12	Kebutuhan Khusus Dilayani	:
13	Nomor Rekening	: 1000198141
14	Nama Bank	: BPD JAMBI...
15	Cabang KCP/Unit	: BPD JAMBI CABANG SUTOMO...
16	Rekening Atas Nama	: DNBOS2018SDNEGERI131IVJAM BI...
17	MBS	: Ya
18	Memungut Iuran	: Tidak
19	Nominal/siswa	: 0
20	Nama Wajib Pajak	: SD Negeri 131/IV
21	NPWP	: 001202563331000

3. Kontak Sekolah

20	Nomor Telepon	:
21	Nomor Fax	:
22	Email	: sdn-131@yahoo.co.od
23	Website	: http://

4. Data Periodik

24	Waktu Penyelenggaraan	: Sehari Penuh/5 hari
25	Bersedia Menerima Bos?	: Ya
26	Sertifikasi ISO	: Belum Bersertifikat
27	Sumber Listrik	: PLN
28	Daya Listrik (watt)	: 1200
29	Akses Internet	: Telkom Speedy
30	Akses Internet Alternatif	: Telkom Speedy

4.1.2 Struktur organisasi

Bersifat sangat penting untuk sebuah organisasi yaitu untuk mempermudah pimpinan dalam mengkoordinasi, mengadakan pengawasan dan dalam pengambilan keputusan didalam satuan pendidikan tersebut. Tanpa adanya struktur organisasi akan sulit dalam menciptakan aktivitas, kegiatan program kerja, maupun tujuan organisasi. Jadi, sangat diperlukannya struktur organisasi yang dijadikan alat untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Struktur Organisasi SDN 131 Kota Jambi:

- a. Kepala Sekolah : Asiah S.Ag
- b. Wakil kepala sekolah : Ratumas Atiah A.Ma.Pd, S.Pd
- c. Kepala TU : Yentri Alfira S.H
Fitria Christiana
- d. Petugas keamanan : M.syarnubi John
- e. Tenaga kepastakaan : Ergasia Metra Kinesis. A

4.1.3 Data Pendidik dan Kependidikan SDN 131 Kota Jambi

Tenaga pendidik dan kependidikan mempunyai fungsi penting dalam meningkatkan mutu pendidikan, karena seorang pendidik adalah salah satu faktor penting dalam kegiatan proses belajar mengajar. Tenaga pendidik dan kependidikan yang berada di SDN 131 Kota Jambi jumlahnya sudah cukup memadai dengan jumlah kelas dan siswa yang ada di sekolah tersebut. Berikut rinciannya:

Tabel 4. 1 Data Tenaga Pendidik dan Kependidikan

No	Nama	Status kepegawaian	Jenis PTK
1.	Asiah	PNS	Kepala Sekolah
2.	Dian Savitri,s.pd	PNS	Guru Kelas
3.	Endang Widyastuti	Honor Daerah TK.II	Guru Kelas
4	Eni Hartati	PNS	Guru Kelas
5.	Enny Wahyuni	PNS	Guru Kelas
6.	Ergasia Metra Kinesis. A	Honor Daerah TK.II	Tenaga Perpustakaan
7.	Fitria Christiana	Tenaga Honor Sekolah	Tenaga Administrasi Sekolah
8.	Katri Rahayu	PNS	Guru Kelas
9.	Kiki Dwi Putri	Honor Daerah TK.II	Guru Kelas
10.	M.syarnubi John	Tenaga Honor Sekolah	Petugas Keamanan
11.	Nazirwan	PNS	Guru Mapel
12.	Nurfaidah	PNS	Guru Kelas
13.	Ratumas Atiah	PNS	Guru Kelas
14.	Rosmawarni	PNS	Guru Kelas

15.	Sri Wartini	PNS	Guru Kelas
16.	Supadi	Tenaga Honor Sekolah	Penjaga Sekolah
17.	Susmawati	PNS	Guru Kelas
18.	Wardeanty	Guru Honor Sekolah	Guru Mapel
19.	Wardiah	PNS	Guru Kelas
20.	Yentri Alfira	Tenaga Honor Sekolah	Tenaga Administrasi Sekolah
21.	Zikwan	Tenaga Honor Sekolah	Guru Mapel

(Sumber Dokumen SDN 131 Kota Jambi)

4.1.4 Deskripsi Partisipan Penelitian

Karena privasi partisipan menjadi taruhan dalam penelitian ini, maka peneliti akan menjamin kerahasiaan identitas partisipan dan hanya akan membahas latar belakang partisipan tanpa mengungkapkan identitas partisipan. Di SDN 131 Kota Jambi, kepala sekolah dan empat guru mengikuti wawancara ekstensif. Adapun partisipan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Partisipan A

Partisipan pertama merupakan wakil kepala sekolah SDN 131 Kota Jambi. Partisipan pertama ini merupakan sarjana pendidikan srata 1. Usia partisipan pertama adalah 52 tahun dengan lama bekerja 15 tahun 10 bulan. Wawancara dilakukan pada partisipan pertama hari selasa 29 november 2022 pukul 12:00 lokasi wawancara dilakukan di SDN 131 Kota Jambi. Partisipan pertama menjelaskan bahwa pendidikan inklusi sangat penting atau sangat diperlukan untuk menunjang kesamaan hak bagi setiap peserta didik.

Partisipan B

Partisipan kedua merupakan guru kelas yang mengajar di kelas inklusif. Usia partisipan kedua adalah 53 tahun dengan lulusan srata 1 PGSD. Partisipan

kedua sudah mengajar selama 21 tahun di SDN 131 Kota Jambi. Wawancara dilakukan pada tanggal 15 november 2022 dengan lokasi di SDN 131 Kota Jambi wawancara dilakukan pada siang hari. Menurut partisipan kedua pendidikan inklusi merupakan pendidikan yang akan memberikan kesempatan kepada siswa yang berkebutuhan khusus untuk dapat sekolah dengan siswa reguler.

Partisipan C

Partisipan ketiga merupakan guru yang mengajar di kelas inklusif. Dengan usia 42 tahun dan merupakan sarjana pendidikan Srata 1. Lama berkerja partisipan ketiga adalah 8 tahun di SDN 131 Kota Jambi. Wawancara dilakukan pada partisipan ketiga tanggal 15 November 2022 di SDN 131 Kota Jambi wawancara dilakukan pagi hari. Partisipan ketiga menjelaskan bahwa pendidikan inklusif sangat baik diterapkan karena siswa yang berkebutuhan khusus akan mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan undang-undang yang ada.

Partisipan D

Partisipan keempat merupakan guru kelas yang mengajar di kelas inklusif. Usia partisipan keempat adalah 33 tahun dengan lama bekerja 11 tahun 5 bulan dan merupakan srata 1 sarjana pendidikan. Wawancara dengan partisipan keempat dilakukan pada tanggal 15 November 2022 di SDN 131 Kota Jambi wawancara dilakukan pada pagi hari. Menurut partisipan keempat pendidikan inklusif merupakan pendidikan yang mengatur siswa berkebutuhan khusus untuk dapat bersekolah di sekolah umum.

Partisipan E

Partisipan kelima merupakan guru yang mengajar di kelas inklusif. Usia partisipan kelima adalah 57 tahun dengan lama bekerja 20 tahun dan merupakan sarjana pendidikan srata 1. Wawancara pada partisipan kelima dilakukan pada

tanggal 15 November 2022 di SDN 131 Kota Jambi wawancara dilakukan pada siang hari. Menurut partisipan kelima pendidikan inklusif adalah pendidikan yang dimodifikasi untuk anak berkebutuhan khusus tetapi dapat bersekolah di sekolah reguler.

4.2 Deskripsi Temuan Penelitian

Peneliti menggunakan data penelitian kualitatif dalam penelitian ini. Pada tahap ini, peneliti mengolah dan menganalisis data yang telah diperoleh dari temuan penyelidikan sebelumnya. Pendekatan utama pengumpulan data untuk membuat pilihan yang objektif dan berfungsi sebagai data adalah metode wawancara. Peneliti kemudian melengkapi data yang terkumpul melalui pendekatan dokumentasi dengan menggunakan metode observasi sebagai penunjang.

Penulis telah melalui langkah-langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan selama tahap analisis data. Untuk penelitian ini telah memberikan gambaran data yang lebih jelas dan memudahkan penulis untuk menyelesaikan langkah berikut. Peneliti terlebih dahulu memilah data yang merupakan data kunci dalam proses analisis data.

Setelah mengorganisir data primer pada tahap sebelumnya, penulis memberikan hasil pada tahap selanjutnya. Dengan pemberian materi ini, penulis dapat lebih mudah menyusun tahapan karya selanjutnya berdasarkan pemahamannya. Akhirnya, ketika datang untuk mencapai penilaian, Selama tahap analisis data, penulis menyelesaikan prosedur reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hal tersebut telah memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai data penelitian ini dan memudahkan penulis untuk melakukan tahapan-tahapan selanjutnya. Sebelum melakukan analisis data, peneliti terlebih dahulu

memilah data yang penting.

Penulis menyajikan hasil pada langkah berikut setelah mengorganisir data primer pada tahap sebelumnya. Dengan memberikan informasi ini, penulis akan lebih mampu merencanakan tahapan karya selanjutnya berdasarkan pemahamannya.

Peneliti mengelompokkan temuan penelitian ke dalam berbagai tema dan subtema penelitian yang berkaitan erat dengan judul penelitian agar lebih mudah menggambarkan temuan penelitian dan menjawab pertanyaan penelitian yang tercantum dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4.2 Tema dan Sub Tema

No	Tema	Sub Tema
1.	Manajemen penyelenggaraan pendidikan inklusif di SDN 131 Kota Jambi	Perencanaan, suatu proses apa yang ingin dicapai pada masa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Ada beberapa yang perlu diperhatikan dalam perencanaan yaitu; merumuskan tujuan, menetapkan tujuan, melakukan analisa kesempatan, melakukan analisa sumber daya, pengembangan alternatif, implementasi strategi, dan pelaksanaan keputusan. Pengorganisasian, merupakan proses pembagian kerja ke dalam tugas-tugas kecil, membebaskan tugas tersebut kepada yang sesuai dengan kemampuan, dan mengalokasikan

sumber daya, serta mengkoordinasikannya kedalam rangka efektif pencapaian tujuan organisasi.

Pelaksanaan, proses implementasi dari semua bentuk rencana, konsep dan ide, dan gagasan yang telah disusun sebelumnya dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Evaluasi, proses untuk melihat tentang sejauh mana suatu kegiatan tertentu telah tercapai, bagaimana perbedaan pencapaian tersebut dengan suatu standar tertentu untuk mengetahui apakah ada selisih diantara keduanya, serta bagaimana manfaat yang telah dikerjakan itu bila dibandingkan dengan harapan.

2. Faktor pendukung dan faktor penghambat manajemen penyelenggaraan pendidikan inklusif di SDN 131 Kota Jambi

Faktor pendukung, yaitu faktor yang mempengaruhi manajemen pendidikan diantaranya: pendidik, peserta didik, materi atau bahan didikan yaitu kurikulum, sarana dan prasarana, dan tujuan pendidikan.

Faktor penghambat, yaitu faktor yang sifatnya menghambat atau menghalangi kemajuan dan jalannya suatu kegiatan.

Hasil penelitian didapatkan oleh peneliti berdasarkan wawancara yang dilakukan secara langsung kepada kepala sekolah, dan guru mata pelajaran yang

bersangkutan dan berhubungan dengan pendidikan inklusif di SDN 131 Kota Jambi yang kemudian mengarah pada manajemen penyelenggaraan pendidikan inklusif. Yang menjadi fokus didalam penelitian ini ialah manajemen penyelenggaraan pendidikan inklusif yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi di SDN 131 Kota Jambi. Dari wawancara yang dilakukan di SDN 131 Kota jambi tersebut dapat diketahui bagaimana manajemen penyelenggaraan pendidikan inklusif di SDN 131 Kota Jambi.

4.2.1 Manajemen Kebijakan Pendidikan Inklusif Dilihat Dari Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan, dan Evaluasi

Pendidikan inklusif membantu siswa berkebutuhan khusus untuk mendapatkan pendidikan sesuai dengan undang-undang yang ada. Dan membeantu siswa berkebutuhan khusus untuk mendapatkan pendidikan di sekolah reguler atau umum.

a. Perencanaan

Dilihat dari segi perencanaan yaitu siswa yang diterima untuk bersekolah di SDN 131 Kota jambi dalam kategori siswa berkebutuhan khusus melalui asesmen diagnostik terlebih dahulu. Siswa tersebut akan melakukan terapi dengan psikolog terkait dengan siswa yang ingin bersekolah di sekolah reguler. Setelah psikolog memberikan surat rekomendasi untuk bersekolah di SDN 131 Kota Jambi maka sekolah akan dapat menerima siswa tersebut untuk bersekolah. Tujuan diagnosa oleh psikolog adalah untuk mengetahui siswa berkebutuhan khusus tersebut tingkat rendah, sedang atau berat. Jika siswa tersebut masih diategorikan tingkat rendah atau sedang akan dapat diterima tetapi jika tingkat berat maka akan disarankan sekolah di sekolah luar biasa yang adal di wilayah masing-masing.

“kalau untuk masuk ke sekolah atau penerimaan siswa baru itu harus dapat rekomendasi dulu dari psikolog bahwa siswa ini bisa sekolah di sekolah umum ini. Karena ya memang tidak mudah untuk mengajar siswa berkebutuhan khusus. Jadi memang harus ya rekomendasi asesmen diagnostiknya” (RA)

“kami menerima anak inklusi karena memang ditunjuk oleh dinas pendidikan kota untuk menjadi sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi. Tetapi memang untuk surat keputusan penunjukkan sekolah ini atau SDN 131 Kota Jambi ini sebagai sekolah inklusi itu tidak ada. Hanya diberitahukan saja kepada kami bahwa sekolah ini sebagai sekolah inklusi waktu itu pada tahun 2005. Karena memang semua sekolah reguler itu harus menerima siswa ABK untuk bisa bersekolah di sekolah umum. Itu sesuai sebenarnya dengan UU sistem pendidikan nasional ya. Jadi kami harus menerima ABK tetapi dengan catatan tertentu. Pihak kami akan meminta dan menidaklanjuti lagi persoalan surat tugas ini. Dan karena sekolah kami ini dekat dengan SLB jadi secara tidak langsung sekolah ini pun yang menjadi incaran para orang tua untuk memasukkan anaknya kesini(A)

Jadi dapat disimpulkan bahwa siswa yang berkebutuhan khusus untuk dapat diterima di bersekolah reguler harus membawa bukti asesmen diagnostik awal dari psikolog. Sehingga dapat mempermudah melihat apakah siswa tersebut dikategorikan siswa berkebutuhan khusus tingkat rendah, sedang atau berat. Karena untuk tingkat berat itu sendiri ada sekolah yang akan menampung siswa yaitu sekolah luar biasa.

Untuk surat keputusan yang menyatakan bahwa SDN 131 Kota Jambi adalah sekolah inklusi belum tersedia sampai saat ini. SDN 131 Kota Jambi hanya ditunjuk menjadi sekolah inklusi oleh Dinas Pendidikan Kota Jambi dan belum mendapatkan surat keputusan itu sendiri. Hal ini juga sejalan dengan pendapat (Muazza, et al., 2018) mengatakan, meski telah ditetapkan sebagai sekolah inklusif, pemerintah tidak memberikan perhatian lebih kepada sekolah tersebut. Selain itu, sekolah tidak memiliki Surat Keputusan (SK) yang mengidentifikasinya sebagai lembaga inklusif. Sekolah menerima ABK yang

membawa surat rekomendasi dari rumah sakit jiwa atau SLB dan melaksanakan pendidikan inklusi sesuai dengan kapasitasnya.

Mekanisme dan persyaratan pendaftaran yang dituangkan dalam pedoman pelaksanaan penerimaan siswa Kabupaten Kota digunakan untuk melaksanakan penerimaan siswa berkebutuhan khusus di sekolah inklusi melalui jalur inklusi; namun, sekolah tidak berkonsultasi dengan pakar terkait seperti dokter, psikolog, atau spesialis lainnya saat mengidentifikasi dan mengevaluasi siswa. lainnya.

Tak terlepas orang tua juga menjadi pokok utama dalam berjalannya pendidikan inklusi di SDN 131 Kota Jambi. Hal ini disampaikan oleh orang tua ABK sebagai berikut:

“saya yakin memasukkan anak saya kesekolah ini adalah karena saya mengetahui sekolah ini sekolah untuk ABK atau mau menerima ABK. Kemudian juga rumah saya dengan sekolah jaraknya tergolong dekat. Yang saya tahu bahwa sekolah ini sudah lama menampung siswa ABK. Kemudian juga dekat dengan SLB ya sehingga saya mudah untuk meminta rekomendasi dari SLB. Ya saya percaya bahwa sekolah ini mampu mendidik anak saya. Selama saya mendampingi anak sayapun saya merasakan hal itu”

Pendidikan inklusif merupakan pendidikan penyelenggaraan pendidikan yang akan memberikan kesempatan yang sama bagi siswa berkebutuhan khusus untu mampu bersekolah di sekolah reguler. Hal ini juga disampaikan oleh guru yang megajar dikelas inklusif:

“sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan ABK untuk bersekolah di sekolah reguler” (EH, 15-11-2022).

“pendidikan yang mengatur siswa ABK bersekolah di sekolah umum” (KDP, 15-11-2022).

“pendidikan yang memberikan kesempatan kepada siswa yang memiliki kondisi berbeda dengan siswa reguler atau sekolah umum” (KT, 15-11-2022).

“pendidikan yang mampu mengarahkan ABK untuk bersekolah

secara umum” (EW, 15-11-2022).

“pendidikan inklusif sangat diperlukan untuk menunjang pendidikan bagi seluruh anak. Baik yang umum maupun anak berkebutuhan khusus”(RA, 29-22-2022)

Hal tersebut terdapat pada Peraturan menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 70 Tahun 2009 Pasal 1 yang berbunyi: sebuah metode penyampaian pendidikan yang memberikan semua siswa—bahkan penyandang disabilitas—kesempatan untuk belajar atau terlibat dalam kegiatan pendidikan bersama anak-anak tanpa disabilitas yang juga memiliki potensi kecerdasan dan/atau kemampuan tertentu. Terbukti dari Peraturan Menteri Pendidikan di atas bahwa ABK berhak mendapatkan layanan pendidikan. baik melalui sekolah negeri yang menyelenggarakan pendidikan inklusi maupun sekolah luar biasa (SLB).

Ada beberapa tujuan dilaksanakannya pendidikan inklusif di sekolah reguler untuk ABK yaitu pemerataan pendidikan. Prakarsa pendidikan inklusif ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi siswa berkebutuhan khusus di kelas, memastikan tidak ada lagi siswa berkebutuhan khusus yang tidak terdaftar. Hal ini juga diungkapkan oleh pengajar di kelas inklusi, khususnya:

“pemerataan hak belajar” (EH, 15-11-2022).

“memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada anak berkebutuhan khusus”(KDP, 15-11-2022).

“memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada siswa ABK untuk memperoleh pendidikan yang dibutuhkan” (KR, 15-11-2022).

“peserta didik dapat belajar menerima adanya perbedaan, beradaptasi dan berinteraksi. Peserta didik menumbuhkan percaya diri” (EW, 15-11-2022).

“sangat bagus karena siswa yang normal dapat beradaptasi dengan siswa yang berkebutuhan khusus” (RA, 29-11-2022).

Hal tersebut di atas sejalan dengan pernyataan Sunardi & Sunaryo (2011)

bahwa pendidikan inklusif merupakan sarana terbaik untuk membina persahabatan antara anak berkebutuhan khusus dengan teman sebayanya. Menurut Lia & Rina (2019), pendidikan inklusif juga dapat dilihat sebagai upaya untuk memenuhi persyaratan belajar siswa yang lebih luas, dengan tujuan memungkinkan siswa dan instruktur merasa nyaman dalam keragaman dan memandang keragaman sebagai sebuah tantangan dan pengayaan di lingkungan. Mendidik diri sendiri; keragaman bukanlah masalah.

b. Pengorganisasian

Karena organisasi juga harus direncanakan, terkait erat dengan fungsi perencanaan. Proses aktif, pengorganisasian adalah fungsi manajerial. Untuk mengatur pekerjaan, mengkategorikan tugas, menugaskan pekerjaan kepada setiap karyawan, membuat departemen (subsistem), dan membentuk hubungan adalah contoh pengorganisasian.

Untuk guru yang mengajar di kelas inklusif tentu mengetahui siswa tersebut berkebutuhan khusus atau tidak agar mempermudah guru dalam melakukan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan ataupun evaluasi. Hal ini disampaikan oleh guru yang bersangkutan:

“ya saya mengetahui” (EH, 15-11-2022).

“iya saya tau” (KDP, 15-11-2022).

“Mengetahui, karena banyak memang peserta didik yang merupakan anak berkebutuhan khusus”(KR, 15-11-2022).

“mengetahui, karena dapat dilihat. Apalagi sekolah kami menerima peserta didik tersebut” (EW, 15-11-2022).

Sebagai akibat dari kelemahan fisik, emosional, mental, atau sosial mereka, serta potensi kecemerlangan dan kemampuan unik mereka, individu dengan kebutuhan khusus sering merasa kesulitan untuk berpartisipasi dalam

proses pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan lingkungan belajar yang mendukung untuk menumbuhkan kemampuan belajar siswa, meliputi ruang belajar, strategi pengajaran, sistem penilaian, sarana, dan prasarana. Tidak kalah pentingnya adalah tersedianya media pendidikan yang tepat dan disesuaikan dengan kebutuhan siswa (Lia & Rina , 2019).

Materi yang diberikan dalam proses pengelolaan kelas untuk anak berkebutuhan khusus akan disesuaikan dengan keadaan atau kondisi peserta didik tersebut. Hal ini di sampaikan oleh guru yang mengajar kelas inklusif yaitu:

“tindakan yang diberikan tentu berbeda ya anak reguler dengan anak berkebutuhan khusus” (KDP, 15-11-2022).

“dalam pengelolaan kelas anak ABK berbaur dengan teman lain tanpa ada perbedaan terutama dalam posisi tempat duduk” (KR, 15-11-2022).

“peserta didik berkebutuhan khusus dalam menerima pembelajaran dikelas tidak samakan dengan peserta reguler sesuai tingkat pemahamannya. Peserta didik berkebutuhan khusus didampingi oleh guru pendamping”. (EW,15-11-2022).

Menurut Karana, (2016) menempatkan siswa berkebutuhan khusus di kelas reguler di mana mereka dipaksa untuk mengikuti pelajaran guru yang dapat mereka pahami saja. Anak-anak berkebutuhan khusus menerima instruksi khusus dalam berbagai kursus dan diisolasi dari teman-teman mereka dalam hal mata pelajaran akademik.

Hal lain yang juga sangat penting dalam ketercapaiannya manajemen kebijakan pendidikan inklusif ini adalah sarana dan prasarana yang disediakan oleh pihak sekolah untuk siswa berkebutuhan khusus. Hal ini disampaikan oleh guru yaitu:

“untuk sarana prasarana disini belum memadai” (RA, 29-11-2022)’

“sebenarnya sarana prasarana disekolah ini belum memadai untuk

siswa berkebutuhan khusus” (KR, 15-11-2022).

“bisa dikatakan belum memadai ya sarana prasarananya. Tetapi memang sih siswa yang masuk disekolah inipun tidak dalam kategori berkebutuhan khusus tingkat berat jadi masih bisa berlangsung pembelajaran” (EW, 15-11-2022).

“belum memadai untuk anak berkebutuhan khusus” (KDP, 15-11-2022).

“sarana prasarana belum memadai” (EH, 15-11-2022).

Untuk sarana prasarana dapat dikategorikan belum sepenuhnya memadai untuk siswa yang berkebutuhan khusus. Dari observasi lapangan yang saya lakukan memang belum memadai untuk sarana prasarananya. Sebagai contohnya yaitu tidak ada jalan khusus untuk pengguna kursi roda. Siswa yang menggunakan kursi roda dibantu oleh guru dan teman sebayanya untuk masuk keruang kelas. Karena memang jalan untuk menuju kelas di semen dan dikeramik seperti biasa. Seharusnya sekolah juga menyediakan jalan khusus untuk pengguna kursi roda.

c. Pelaksanaan

Dalam pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus tentu mempunyai strategi tertentu yang akan mendukung proses pembelajaran. Menurut pendapat guru yaitu sebagai berikut:

“untuk srategi yang digunakan yaitu kelompok belajar”(KDP, 15-11-2022).

“strategi yanggg digunkan ya bekerja sama atau membuat kelompok gitu” (EW, 15-11-2022).

“kalau metode yang saya gunakan seperti ceramah, kuis juga diskusi, bekerjasama dengan teman. Itu ya yang menjadi strategi saya yaitu lebih kepada diskusi dan kerjasama antar siswa seperti pembagian kelompok” (KR, 15-11-2022).

“strategi khususnya ya mampu melihat kondisi siswa, jika memang kurang paham maka akan diulangi lagi. Siswa juga dibantu oleh peserta didik lainnya. dan kalau untkk mengerjakan tugas ya diberikan tambahan waktu” (EH, 15-11-2022).

Setiap kebutuhan yang unik untuk setiap siswan dan dipenuhi oleh penerapan ideologi pendidikan inklusi sekolah harus diperhatikan. Misalnya, memungkinkan berbagai gaya belajar dan memastikan bahwa pendidikan berkualitas tinggi tersedia untuk setiap siswa. Oleh karena itu, harus melibatkan manajemen yang baik, penerapan strategi pendidikan yang tepat, penerapan sumberdaya yang efektif, dan menjangkau penduduk lingkungan. Menurut Pasal 31 UUD 1945, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan pengajaran yang layak. Akibat undang-undang ini, negara wajib menyelenggarakan pendidikan dalam upaya mencerdaskan seluruh anak bangsa. Oleh karena itu, harus ada pendekatan yang disengaja untuk mencapai pendidikan yang setara, khususnya melalui sistem pendidikan yang terorganisir, terpadu, dan inklusif (Wiliyanto, 2022).

Di dalam proses pembelajaran akan lebih optimal jika dilaksanakan dengan prosedur yang sesuai dengan permasalahan yang ada. Dari kasus ini yaitu pembelajaran yang optimal bagi peserta didik khusus yaitu:

“peserta didik dibantu oleh guru pendampng” ((KR, 15-11-2022).

“kalau untuk prosedur pembelajarannya lebih ke desain pembelajaran. Seperti desain kolaboratif seperti itu. Yakninya fleksibel, pembelajarannya dimodifikasi sedikit, dan juga mendapatkan dukungan. Disini kami para guru juga bekerjasama dengan guru pendamping agar memperlancar proses pembelajaran”(EW, 15-11-2022).

“tentunya bekerjasama dengan segala pihak ya untuk tercapainya pembelajaran tersebut” (EH, 15-11-2022).

“jika berbicara prosedur pasti dilakukan dengan baik. Seperti contohnya saya menahan diri untuk memberikan bantuan kepada peserta didik. Kita arahkan terlebih dahulu baru dibantu. Terus melatih anak untuk belajar dari kesalahan. Catat perkembangan anak, ajari rasa percaya diri, kemudian pasti memberi kesempatan anak untuk berbaur dengan siswa lain. Dalam hal ini saya juga dibantu oleh orang tua siswa itu sendiri selaku guru pendamping dari anak berkebutuhan khusus” (RA, 29-11-2022).

“kami bekerjasama dengan guru pendamping” (KDP, 15-11-2022).

Guru harus memiliki sikap positif terhadap anak dan pendidikannya, menyadari kebutuhan ABK dan proaktif dalam menanganinya, peduli terhadap keberhasilan siswa dalam belajarnya, imajinatif, memiliki kompetensi yang memadai, dan terbuka untuk percakapan, menerima masukan, dan bekerja bersama. Membuat rencana, melakukan penilaian, dan bekerja sama memulai kolaborasi. pembagian peran, tugas, dan tanggung jawab dalam pembelajaran, bersama dengan pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran Kolaborasi dalam mengidentifikasi strategi praktis untuk meningkatkan standar pendidikan, serta penyediaan media dan penciptaan kondisi yang menguntungkan bagi ABK (Sunardi & Sunaryo, 2011).

Kurikulum merupakan salah satu faktor yang akan mempengaruhi manajemen kebijakan inklusi apakah dapat dikatakan berjalan dengan baik atau tidak. Dalam hal ini guru dituntut untuk mampu menyesuaikan kurikulum dengan anak berkebutuhan khusus. Hal ini sesuai dengan pernyataan guru yang mengajar di kelas inklusif yaitu:

“kurikulum yang digunakan di sekolah ini kurikulum k13, tetapi memang dimodifikasi lagi untuk anak berkebutuhan khusus” (KR, 15-11-2022).

“kurikulum yang dipakai k13”(EH, 15-11-2022).

“disini guru menggunakan kurikulum reguler yaitu k13, untuk anak berkebutuhan khusus dirancang sesuai dengan kebutuhannya” (EW, 15-11-2022).

“kurikulum sih seperti pada umumnya ya yaitu kurikulum k13”(KDP, 15-11-2022).

“kurikulum disini memang k13, tetapi khusus untuk ABK tentunya dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan siswa itu sendiri. Seperti

materi, metode dan evaluasinya disesuaikan dengan siswa itu sendiri. Tetapi secara umum menggunakan k13. Karena memang anak berkebutuhan khusus disini adalah tingkat rendah dan sedang jadi tidak begitu sulit untuk melaksanakan kurikulum ini” (RA, 29-11-2022).

Menurut Karana, (2016) Untuk memperhitungkan beragam kebutuhan dan kemampuan siswa, sekolah dan guru memodifikasi kurikulum dan metode pengajaran. Guru mengusulkan latihan pendidikan untuk semua siswa untuk diselesaikan bersama dan memberikan waktu luang yang diperpanjang. Anak-anak yang membutuhkan perbaikan atau perawatan harus menerima pendidikan lebih lanjut. Keadaan pendidikan semacam ini terjadi di institusi yang menawarkan pendidikan inklusif.

Kurikulum yang dimodifikasi dapat membantu siswa dalam proses pembelajaran berlangsung. Selain kurikulum guru juga membuat RPP yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Dalam hal ini yaitu anak berkebutuhan khusus. Sesuai dengan yang dipaparkan oleh guru yaitu:

“menurut saya kurikulum K13 ini bisa optimal dilaksanakan,dapat digunakan sesuai kemampuan atau tingkat kemampuan siswa. Dalam RPP juga dibuat sesuai kemampuan siswa” (KR, 15-11-2022).

“menurut saya kurikulumnya sudah sesuai dengan kebutuhan siswa. Dan RPP dirancang dengan pemahaman atau kemampuan mereka” (EW, 15-11-2022).

“RPP dibuat dan dirancang sesuai dengan kebutuhan ABK” (RA, 29-11-2022).

“ya, saya membuat RPP yang sesuai dengan kebutuhan siswa” (KDP, 15-11-2022).

“seperti pada umumnya saya juga membuat RPP untuk pembekalan proses pembelajaran” (EH, 15-11-2022).

Jadi dapat disimpulkan bahwa setiap guru yang mengajar di kelas inklusif akan membuat RPP sesuai dengan kebutuhan siswa tersebut. Melihat terlebih

dahulu kondisi dari siswa yang berkebutuhan khusus lalu disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing siswa.

Guru yang mengajar dikelas inklusif tentunya harus dapat melakukan interaksi dengan siswa yang berkebutuhan khusus. Dengan hal ini dapat membantu proses pembelajaran bagi siswa. Hal tersebut disampaikan oleh beberapa guru diantaranya:

“setiap hari kami saling berinteraksi seperti menyapa, bertanya, dan sesama teman saling bekerja sama” (KR, 15-11-2022).

“berinteraksi setiap disekolah ya, kami saling menyapa dll” (EW, 15-11-2022).

“sering melakukan interaksi. interaksi yang dilakukan ya seperti interaksi pada umumnya” (KDP, 15-11-2022).

“pasti melakukan interaksi jika dikelas ataupun diluar kelas” (EH, 15-11-2022).

Interaksi antar guru dan siswa sangat diperlukan untuk membangkitkan rasa percaya diri siswa yang berkebutuhan khusus agar dapat merasa diterima dilingkungan sekolah. Interaksi yang dilakukan adalah interaksi umum seperti dengan siswa pada umumnya. Selain guru siswa yang reguler juga melakukan interaksi dengan siswa berkebutuhan khusus. Dari penelitian yang saya lakukan saya mengamati bahwa siswa berinteraksi dengan baik dengan siswa berkebutuhan khusus seperti membantu mengambilkan kursi roda, mengobrol, dan bermain bersama.

Hal di atas sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Isabella, Emosda, & Suratno, (2014) Dari segi proses, pelaksanaan pendidikan inklusif bagi siswa berkebutuhan khusus SD Negeri 131/IV Kota Jambi dinilai memenuhi kriteria baik, dengan 71,43% subindikator memenuhi standar dan 28,57% subindikator tidak memenuhi persyaratan. mereka seharusnya. Sub-indikator

berikut sudah sesuai dengan standar:

- a) Kurikulum fleksibel telah digunakan dalam RPP; silabus dan RPP telah dibuat untuk siswa berkebutuhan khusus; dan PPI telah dibuat untuk siswa yang membutuhkannya;
- b) pembelajaran telah dilaksanakan sesuai jadwal tertentu; ada motivasi yang sesuai; dan ada catatan kemajuan belajar;
- c) Selama kegiatan evaluasi pembelajaran telah dilakukan secara berkesinambungan, pelaksanaannya sesuai dengan prinsip penilaian, terdapat penyesuaian waktu, penyesuaian metode, penyesuaian isi, menggunakan berbagai alat penilaian, dan ruang lingkup evaluasi meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Melakukan tindak lanjut dengan melakukan perbaikan implementasi, seluruh sub indikator telah memenuhi standar.

Pelaksanaan proses pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus dapat dilihat dari penerapan calistung. Guru memberikan metode khusus untuk anak berkebutuhan khusus untuk proses calistung. Hal ini disampaikan oleh guru yang mengajar di kelas inklusif yaitu:

“ada yang berbeda ada juga yang sama. Karena disini dilihat kembali siswa ini mempunyai kelainan apa. jika memang bisa mereka akan di ajarkan proses calistung sama dengan siswa reguler” (KDP, 15-11-2022).

“calistungnya berbeda sesuai dengan tingkat kemampuannya” (EW,15-11-2022).

“calistung sih berbeda ya dengan siswa reguler. Tapi disesuaikan dengan kemampuan siswa itu lagi bagaimana” (KR,15-11-2022).

“tergantung dengan siswanya ya” (EH, 15-11-2022).

Berarti untuk mengetahui proses calistung siswa memang berbeda dari siswa reguler pada umumnya. Tetapi dilihat terlebih dahulu siswa tersebut jenis keberkebutuhan yang seperti apa. jika memang fisiknya seperti harus menggunakan kursi roda dan tidak berpengaruh dengan IQ siswa akan diberlakukan sama dengan siswa reguler. Tetapi jika siswa tersebut memang mempunyai IQ yang rendah dan lamban dalam menerima pembelajaran maka akan di sesuaikan dengan kebutuhan siswa tersebut.

d. Evaluasi

Evaluasi dalam manajemen kebijakan pendidikan inklusif sangat penting adanya. Untuk melihat sejauh mana ketercapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Ada beberapa cara ataupun metode dalam melakukan evaluasi terhadap siswa keberkebutuhan khusus. Menurut beberapa guru diantaranya menyampaikan bahwa:

“ melakukan evaluasi sesuai tingkat kemampuan siswa. Metodenya sesuai dengan kebutuhan siswa. Sistem kenaikan kelas siswa inklusif tidak adanya tinggal kelas. Untuk kelulusan siswa yaitu pemberian ijazah” (KR,15-11-2022).

“dengan pengamatan, wawancara dan tes. Evaluasi yang digunakan evaluasi proses dan evaluasi hasil. Untuk sistem kenaikan kelas adanya pertimbangan sekolah, ketuntasan semua mata pelajaran, dan kehadiran. Untuk sistem lulus atau tidak lulus dilihat dari tuntas semua mapel dari jenjang kelas 1-6, ikut serta dalam ujian akhir. Sikap perilaku minimal baik” (RA, 29-11-2022).

“kalau evaluasi yaitu yang dilihat kognitif, afektif, psikomotor sesuai kemampuan siswa. Sistem kenaikan kelas peserta didik ABK tidak ada yang tinggal kelas” (EW, 15-11-2022).

Jadi kesimpulannya bahwa evaluasi tetap dilakukan untuk anak keberkebutuhan khusus. Tetapi dengan metode penilaian yang disesuaikan dengan siswa tersebut. Untuk melihat sistem kenaikan kelas untuk anak keberkebutuhan

khusus tidak adanya siswa yang tinggal kelas. Semua siswa ABK dinyatakan naik kelas. Dan sistem kelulusan anak berkebutuhan khusus dilihat dari berbagai aspek dan telah melalui jenjang kelas 1-6. Setelah itu siswa berkebutuhan khusus akan mendapatkan ijazah sesuai dengan yang dikeluarkan oleh dinas bersangkutan.

Agar terciptanya lingkungan sekolah yang baik tentunya layanan yang diberikan sekolah untuk siswa berkebutuhan khusus harus baik pula. Serta bagaimana sikap guru dalam menghadapi siswa berkebutuhan khusus sangat mempengaruhi dari kelancaran manajemen kebijakan pendidikan inklusif ini. Hal ini senada dengan pemaparan guru yang mengajar di kelas inkusif yaitu:

“pelayanannya tidak dibedakan dengan peserta didik reguler. Layanan yang diberikan sudah cukup baik” (KR, 15-11-2022).

“layanan sih tentunya kami berikan yang terbaik, seperti kalau orang tua siswa diterima kapanpun disekolah dan untuk konsultasi misalnya. Kalau kami memberikan pelayanan yang merata ya bagi semua peserta didik ya khususnya di sini ABK” (EW, 15-11-2022).

“pelayanan baik, sikap yang kami berikan yaitu sikap adil” (KDP, 15-11-2022).

“layanan yang diberikan sesuai dengan sebagaimana mestinya” (EH, 15-11-2022).

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk pelayanan dilakukan sebagaimana kebutuhan siswa dan orang tua anak berkebutuhan khusus. Semua peserta didik diberikan pelayanan yang sama dan baik. Serta sikap seorang guru terhadap siswa harus adil dan memperlakukan siswa dengan baik dengan kata lain tidak adanya perbedaan antara sikap guru ke siswa reguler dan sikap guru terhadap siswa berkebutuhan khusus. Dari pengamatan lapangan yang saya lakukan disekolah memang pelayanan yang diberikan sekolah sangat baik dapat dilihat dari sikap kepala tata usaha yang menerima tamu dengan baik, dan memproses

Cepat kebutuhan yang diinginkan oleh sang penerima layanan. Terlihat

juga tidak adanya pungli selama saya melakukan pengamatan. Sikap sopan dan santun sangat dijunjung tinggi di sekolah ini. Serta guru berbaur secara baik dengan siswa berkebutuhan khusus. Ini terlihat pada saat guru melatih siswa berkebutuhan khusus untuk tampil diacara seni, guru dengan sabar dan ramah mengajari siswa berkebutuhan khusus walaupun latihan tersebut dilakukan secara berulang-ulang karena memang siswa berkebutuhan khusus ini harus mendapatkan perlakuan yang lebih intens lagi.

Untuk memaksimalkan ketercapaian manajemen kebijakan pendidikan inklusif yaitu guru mendapatkan pelatihan khusus untuk mengajar siswa yang berkebutuhan khusus. Serta menjalin kerjasama dengan pihak terkait dan tenaga ahli lainnya. sesuai dengan pernyataan guru yaitu sebagai berikut:

“ada pelatihan tetapi untuk sekarang ini sudah lama tidak ada dilakukan pelatihan. Kami memang ada kerja sama dengan psikolog, SLB dan pihak terkait lainnya” (KR, 15-11-2022).

“pelatihan dilakukan ya, tetapi tidak sering adanya pelatihan. Kerjasama seperti kerjasama dengan SLB” (EW, 15-11-2022).

“ada, dan dilakukan jarang sekali. Dan kerjasama dengan guru pendamping atau orang tua siswa” (EH, 15-11-2022).

“ya, ada pelatihan untuk guru mengajar kelas inklusif. Dan kami bekerjasama dengan psikolog, terapis dan lain sebagainya. Harapan saya kedepannya semoga ada fasilitas pendukung lagi untuk siswa berkebutuhan khusus. Dan adanya guru khusus untuk siswa ABK seperti dari lulusan pendidikan luar biasa” (RA, 29-15-2022).

Dapat peneliti simpulkan bahwa adanya pelatihan untuk guru yang mengajar di kelas inklusif tetapi tidak sering dilakukan. Hal ini tentu akan mempengaruhi tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sekolah juga telah melakukan kerjasama dengan pihak terkait seperti SLB, psikolog, dan orang tua siswa itu sendiri.

Selain peserta didik dan tenaga pendidik tentu yang menjadi fokus

selanjutnya adalah evaluasi yang dilakukan oleh dinas setempat atau pemerintah daerah dalam hal ini adalah dinas pendidikan kota untuk melakukan evaluasi mengenai sekolah inklusi itu sendiri. Hal ini disampiakan oleh kepala sekolah yaitu:

“selama sekolah ini ditunjuk menjadi sekolah inklusi pada tahun 2005 itu sampai sekolah tidak ada evaluasi yang dilakukan oleh dinas pendidikan kota atau pemerintah daerah tentang terlaksananya pendidikan inklusi itu sendiri. Kami sangat menerima jika akan dilakukan evaluasi tapi nyatanya sampai sekolah belum ada evaluasi yang dilakukan. Disini hanya ada liputan seperti dari media seperti itu, untuk melihat terlaksananya pendidikan inklusi. Seperti pada tanggal 13 desember kemarin itu ada pelaksanaan hari ABK nasional jadi sekolah melaksanakan kebijakan itu. Kalau untuk evaluasi tidak ada tapi liputan oleh media itu sering ya. Bisa dilihat di google juga ada”

Hal ini juga sejalan dengan pendapat (Isabella, Emosda, & Suratno, 2014) SD Negeri 131/IV Kota Jambi merupakan salah satu sekolah yang memberikan kesempatan kepada siswa berkebutuhan khusus untuk mendapatkan bantuan pendidikan yang mereka butuhkan. Karena belum pernah dilakukan evaluasi terhadap program pendidikan inklusi di SD Negeri 131/IV Kota Jambi, tidak jelas apakah dilaksanakan sesuai dengan standar yang berlaku. Program ini sudah ada sejak tahun 2005.

Jadi dapat disimpulkan bahwa untuk evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk melihat sejauh mana sekolah telah melaksanakan pendidikan inklusi tidak pernah dilakukan.

4.2.2 Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Manajemen Kebijakan

Pendidikan Inklusif di SDN 131 Kota Jambi

Mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam proses pembelajaran khususnya untuk anak berkebutuhan khusus sanga perlu

dipertimbangkan agar manajemen kebijakan pendidikan inklusif dapat terlaksana sesuai dengan apa yang diharapkan. Menurut pendapat guru diantaranya adalah sebagai berikut:

“memang tidak ada kendala dalam melaksanakan pendidikan inklusif ini karena memang guru dibantu juga ya oleh guru pendamping. Faktor pendukung sih itu ya kami dibantu oleh guru pendamping. Dan faktor penghambat itu tadi ya kurangnya sarana prasarana” (KDP, 15-11-2022).

“kalau untuk faktor pendukung ya peran kepala sekolah lagi dalam memimpin sekolah yaitu memberikan kesempatan guru untuk memodifikasi proses pembelajaran sehingga sesuai dan tepat untuk siswa. Faktor penghambat sih lebih kepada sarana prasarana aja sih” (EW, 15-11-2022).

“ faktor pendukung sih adanya undang-undang pendidikan inklusif. Dan faktor penghambat paradigma orang tua. Serta siswa itu kalau kesekolah sesuai keinginan mereka saja, sering juga tidak hadir. Dan yang mengajar disinni untuk kelas inklusif itu guru lulusan PGSD atau pun sarjana pendidikan belum lulusan pendidikan luar biasa” (RA, 29-11-2022).

“kendala sih tidak terlalu ada karena memang ada guru pendamping, dan faktor penghambatnya sih sarana prasaranan tadi yang belum memadai” (KR, 15-11-2022).

“saya sendiri tidak begitu merasakan kendalanya ya. Tetapi sarana prasaran harus ditingkatkan lagi” (EH, 15-11-2022).

Jadi dapat peneliti simpulkan bahwa untuk faktor pendukung terlaksananya manajemen kebijakan pendidikan inklusif ini yaitu adanya guru pendamping bagi siswa yang berkebutuhan khusus serta adanya undang-undang yang menjelaskan tentang pendidikan inklusif itu sendiri. Dan untuk faktor penghambatnya yaitu belum tersedianya sarana prasarana yang memadai untuk siswa berkebutuhan khusus.

4.3 Pembahasan

Berdasarkan temuan dan hasil penelitian yang dilakukan bersama dengan 6 orang partisipan yang ada di SDN 131 Kota Jambi terkait dengan Manajemen

penyelenggaraan pendidikan inklusif yang ditinjau dari aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi, maka dapat dipaparkan hal-hal sebagai berikut:

4.3.1 Manajemen kebijakan pendidikan inklusif di SDN 131 Kota Jambi yang Ditinjau Dari Aspek Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan dan Evaluasi.

Untuk memajemen suatu kebijakan pendidikan terutama pendidikan inklusif tentu yang perlu diperhatikan adalah unsur perencanaan,, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi.

a. Perencanaan

SDN 131 Kota Jambi merupakan salah satu sekolah dasar yang telah menerapkan pendidikan inklusif. Yang bertujuan untuk kolaborasi antara siswa reguler dengan siswa berkebutuhan khusus. Sehingga tidak adanya alasan bagi anak berkebutuhan khusus untuk tidak mengenyam bangku sekolah. SDN 131 Kota Jambi menerima peserta didik dengan berkebutuhan khusus melalui berbagai pertimbangan diantaranya harus membawa surat rekomendasi dari SLB atau psikolog yang menangani anak berkebutuhan khusus tersebut. Hal ini diperlukan untuk mengetahui tingkat anak berkebutuhan khusus tersebut apakah dkategorikan ringan, sedang atau berat. Jika anak tersebut didiagnosa berkebutuhan khusus ringan dan sedang sekolah akan menerima anak tersebut. Tetapi jika didiagnosa tingkat berat maka sekolah tidak dapat menerima anak tersebut dikarenakan tidak akan maksimal tujuan yang diharapkan jika anak berkebutuhan khusus tingkat berat bersekolah di sekolah reguler. Karena memang ada sekolah khusus untuk anak berkebutuhan khusus tingkat berat seperti SLB. Namun, untuk Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Pemerintah daerah menunjukkan SDN 131 Kota Jambi sebagai sekolah inklusi belum tersedia.

Menurut pendapat Wati, (2014) Komponen pendidikan sekolah seperti peserta didik, kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, pembiayaan pendidikan, dan hubungan antara masyarakat dengan sekolah, sepenuhnya berada di bawah kendali kepala sekolah dalam pengelolaan sekolah inklusif. Semua siswa di kelas yang sama dapat ditampung di sekolah inklusi. Sekolah ini menawarkan program pendidikan yang sesuai, menuntut, namun disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan setiap siswa, serta bantuan dan dukungan yang dapat ditawarkan guru untuk memastikan keberhasilan anak-anak. Selain itu, sekolah inklusif adalah sekolah di mana setiap siswa merasa dilibatkan dan dapat berinteraksi dengan teman sebayanya dan anggota masyarakat lainnya untuk memenuhi kebutuhan unik mereka.

Kepala sekolah sebagai pemimpin yang mempunyai peran penting dalam terlaksananya pendidikan inklusif itu sendiri. Kepala sekolah mengaur dan merencanakan guru yang akan mengajar di kelas inklusif. Dan setiap siswa berkebutuhan khusus akan mendapatkan guru pendamping masing-masing yaitu orang tua dari siswa itu sendiri. Guru akan diberi kewenangan bebas dalam memodifikasi pembelajaran di kelas sesuai dengan kurikulum yang berlaku dan disesuaikan dengan kebutuhan siswa berkebutuhan khusus.

Proses perencanaan dipecah menjadi beberapa langkah:

1. lembaga perencanaan, termasuk visi, misi, peran organisasi, tujuan, dan metode untuk mencapai tujuan tersebut; dan
2. merencanakan bagaimana kurikulum akan digunakan dalam pendidikan inklusif.
3. Proses pendidikan berfungsi sebagai panduan untuk konten program, dan kurikulum berfungsi sebagai titik referensi untuk

proses pembelajaran.

4. mengenalkan anak dengan lingkungan tempat mereka akan belajar (infrastruktur untuk mendukung proses pembelajaran),
5. melakukan penilaian pembelajaran inklusi,
6. merencanakan strategi inklusi dalam pembelajaran secara umum, khususnya pembiayaan pendidikan,
7. merencanakan evaluasi pembelajaran, dan
8. perencanaan tindak lanjut pengadaaan hasil evaluasi (Mashun, 2020).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rina Hizriyani (2018) Pelibatan penuh anak berkebutuhan khusus dalam kehidupan komunal merupakan salah satu tujuan pendidikan inklusif. Tujuan lainnya adalah memberikan setiap anak kesempatan terbaik untuk menerima pendidikan yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka. Tujuan tambahannya antara lain mempercepat penyelesaian program wajib belajar yang bermutu, meningkatkan mutu pendidikan pada angka putus sekolah, dan mengembangkan sistem pendidikan yang inklusif, tidak diskriminatif, dan ramah pembelajaran.

Untuk memaksimalkan potensi setiap siswa, pendidikan inklusif melibatkan mendidik anak-anak berkebutuhan khusus bersama dengan siswa yang berkembang secara normal. Pendidikan anak usia dini sangat penting untuk mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas di usia muda karena periode waktu tersebut sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan generasi masa depan anak (golden age). Kesehatan, nutrisi, dan stimulasi psikologis juga harus dipupuk sejak usia muda untuk menentukan kualitas manusia.

b. Pengorganisasian

Untuk guru yang mengajar di kelas inklusif merupakan guru yang memiliki pemahaman tentang anak berkebutuhan khusus. Agar ketercapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya guru yang mengajar dikelas inklusif paling tidak harus mengetahui ciri anak berkebutuhan khusus dan harus mempunyai bekal bagaimana menghadapi siswa berkebutuhan khusus.

Dalam hal ini guru harus mampu mengetahui ciri-ciri anak berkebutuhan khusus diantaranya: Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 2010 pasal 129 ayat (3), peserta didik penyandang disabilitas sekurang-kurangnya harus memenuhi salah satu dari: a. buta; b. tuli; c. tuna wicara; d. tuna grahita; e. lumpuh; f. merdu; g. kesulitan belajar; h. pembelajar lambat; saya. autisme; j. memiliki gangguan motorik; k. menjadi korban penggunaan narkoba. Pesan senada disampaikan Danang (2015) bahwa anak berkebutuhan khusus terbagi menjadi tiga kategori menurut klasifikasi dan jenis kelainannya yaitu kelainan fisik, kelainan jiwa, dan ciri sosial.

masalah. Anak berkebutuhan khusus mungkin memiliki satu atau lebih kondisi berikut: 1) kebutaan; 2) gangguan pendengaran dan bicara; 3) disabilitas intelektual; 4) gangguan anggota tubuh (gangguan fisik), 5) gangguan perilaku dan emosi (tunalaras), 6) Anak gangguan belajar spesifik, 7) lamban belajar (slow Learn), 8) cerdas istimewa dan berbakat istimewa (CIBI), 9) Autis.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang relevan oleh Mashun, (2020) Pengorganisasian Pembagian tugas yang harus dilakukan oleh setiap peserta untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan merupakan inti dari pendidikan

inklusif. Dijelaskan bahwa organisasi tersebut meliputi (1) mengklasifikasikan instruktur PAUD ke dalam kategori yang berbeda berdasarkan peraturan ABK, dan (2) meningkatkan kompetensi guru melalui pendidikan dan pelatihan sesuai dengan persyaratan keahlian pendidik.

c. Pelaksanaan

Menurut Mashun, (2020) menjelaskan bahwa sekurang-kurangnya yang termasuk dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi adalah:

1. Administrasi kesiswaan mengutamakan pendidikan anak berkebutuhan khusus
2. Pengelola kurikulum mengadaptasi kurikulum sekolah konvensional berdasarkan fase perkembangan anak berkebutuhan khusus, dengan memperhatikan sifat dan tingkat spesialisasi. Akibatnya, kurikulum perlu beradaptasi, responsif, dan terintegrasi.
3. Kurikulum yang dapat diadaptasi, sistem manajemen pembelajaran yang ramah, dan desain pembelajaran yang fleksibel.
4. Penilaian manajemen pendidikan inklusi dilakukan untuk melihat apakah semua tindakan yang dilakukan telah berhasil mencapai tujuan yang diinginkan.
5. Manajemen pendidik dan karyawan, ahli di bidang instruksi, pembelajaran, menasihati, mengarahkan, dan pelatihan, menjelaskan bahwa yang termasuk dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi sekurang-kurangnya adalah: Administrasi kesiswaan mengutamakan pendidikan anak difabel. Pemanfaatan

manajemen kurikulum Guru, orang tua, wali/pengasuh, dan guru pembimbing khusus semuanya termasuk dalam kategori pendidik. Terapis, tenaga medis, dokter, psikolog, dan staf lab semuanya dianggap sebagai tenaga pendidikan. Guru berinteraksi dengan siswa selama kelas sebagai contoh pembelajaran yang menarik bagi anak berkebutuhan khusus.

6. Manajemen fasilitas infrastruktur melibatkan pengawasan peralatan dan perangkat lunak yang diperlukan untuk memastikan pendidikan inklusif berhasil dalam bidang studi tertentu.
7. Pemerintah pusat dan daerah, korporasi, lembaga lain, bahkan pemerintah asing dapat menyediakan dana untuk penyelenggaraan pendidikan inklusif.
8. Pengelolaan sumber daya masyarakat dalam hal ini peran orang dan masyarakat dalam memajukan pendidikan dengan berperan mengawasi proses pendidikan yang ada di lembaga pendidikan inklusi.

Guru akan selalu memberikan bantuan kepada siswa inklusif, baik selama maupun di luar jam pelajaran. Ketika seorang anak berkebutuhan khusus mengalami kesulitan belajar, penanganannya berupa memberikan bimbingan dan membantu anak tersebut berinteraksi dengan lingkungan dan teman-temannya. Rekan sebaya, mengulas mata pelajaran, dan menjelaskan hal-hal kepada teman semuanya dapat membantu siswa merasa diterima di kelas.

Dalam pelaksanaannya guru menggunakan strategi khusus dalam proses pembelajaran berlangsung. Salah satu bentuk strategi adalah membuat kelompok belajar. Dengan adanya kelompok belajar siswa berkebutuhan khusus dapat

berbaur dengan siswa reguler. Disamping itu guru akan mengarahkan siswa untuk mengerjakan tugas secara mandiri untuk menumbuhkan rasa percaya diri siswa.

Selain itu prosedur yang diterapkan dalam menjalankan pendidikan inklusif yaitu menerapkan desain pembelajaran yang menyenangkan untuk peserta didik. Menyamaratakan perlakuan terhadap peserta didik. Atau akan memberikan perlakuan khusus jika memang diperlukan bagi siswa berkebutuhan khusus serta guru didampingi oleh guru pendamping bagi siswa berkebutuhan khusus. Sebagai contoh yaitu pada proses calistung. Jika memang anak tersebut lamban maka guru akan mengulangi lagi pembelajaran.

Dalam melaksanakan pendidikan inklusif tentu kurikulum juga mempengaruhi proses pembelajaran. Disini kurikulum yang dipakai adalah K13 yang dimodifikasi untuk siswa berkebutuhan khusus. Serta guru akan membuat RPP yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa yang berkebutuhan khusus. Selain kurikulum dan RPP interaksi antara guru dan siswa, siswa reguler dan siswa berkebutuhan khusus juga perlu diperhatikan. Guru memberikan interaksi yang intens terhadap anak berkebutuhan khusus.



Dari gambar diatas, dapat dilihat bahwa dalam proses pembelajaran siswa reguler berinteraksi dengan siswa ABK dan saling tolong menolong. Siswa ABK juga melakukan kerjasama dalam proses pembelajaran. Sesuai dengan yang disampaikan oleh guru bahwa siswa ABK akan dicampur dengan siswa reguler dalam proses pemberian tugas kelompok. Dengan hal ini diharapkan tidak adanya deskriminatif terhadap siswa ABK.

Siswa berkebutuhan khusus dapat menunjukkan kemampuannya dalam kegiatan ekstrakurikuler seperti siswa lainnya. Pertunjukan seni yang diberikan pada 13 Desember 2022 oleh siswa berkebutuhan khusus menjadi buktinya. Dari segi pemikiran dan nilai, anak berkebutuhan khusus juga disikapi berbeda dengan anak pada umumnya, seperti dengan hitungan soal yang beragam dan standar ketuntasan minimal (KKM) yang berbeda. Memberi siswa kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler juga akan membantu mereka mengembangkan bakat dan prestasi mereka.

Hasil penelitian yang dilakukan peneliti sejalan dengan penelitian relevan yang dilakukan oleh Prastiyono (2013) Selain itu, ada faktor kunci yang harus diperhatikan dalam mendirikan sekolah inklusif:

1. Guru harus terampil mengajar siswa dari semua latar belakang dan keterampilan. Keterampilan ini dapat kita kembangkan dengan berbagai cara, antara lain dengan pelatihan, berbagi pengalaman, lokakarya, membaca buku, mengeksplorasi/mengeksplorasi sumber-sumber lain, dan kemudian mempraktikkannya di kelas.
2. Menurut Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh semua pemerintah nasional di dunia, semua anak berhak atas pendidikan, terlepas dari perbedaan fisik, mental, sosial, emosional, bahasa, atau lainnya. kemampuan.
3. Guru menghormati setiap siswa di kelas, terlibat dalam percakapan dengan mereka, mempromosikan interaksi teman sebaya, bekerja untuk membuat pembelajaran menjadi menyenangkan, memperhitungkan keragaman di kelas mereka, memberikan tugas individual untuk anak-anak, dan mempromosikan pembelajaran

aktif untuk semua siswa.

d. Evaluasi

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana anak berkebutuhan khusus mampu bersekolah di sekolah reguler. Dari penelitian yang telah dilakukan dapat dilihat bahwa setiap siswa berkebutuhan khusus akan dilakukan evaluasi berupa metode kognitif, affektif, psikomotor yang disesuaikan dengan anak berkebutuhan khusus. Untuk kenaikan kelas sendiri anak berkebutuhan khusus tidak ada yang tinggal kelas. Aspek yang diamati untuk penilaian kelulusan sekolah adalah tuntas semua mata pelajaran dari jenjang kelas 1-6. Ikut serta dalam melaksanakan ujian kenaikan kelas, ujian akhir, penilaian sikap dan perilaku.

Selain siswa perlu pengembangan terhadap guru agar dapat melaksanakan proses pembelajaran dengan baik. Salah satu bentuk untuk menjamin kualitas guru yang mengajar di kelas inklusif adalah mengikut sertakan guru dalam pelatihan khusus untuk siswa berkebutuhan khusus. Agar pemahaman guru semakin baik mengenai ABK. Selain siswa dan guru yang menjadi aspek penting lainnya adalah adanya keterlibatan orang tua, psikolog, dan tenaga ahli serta bekerja sama dengan SLB setempat. Untuk orang tua siswa yang berkebutuhan khusus akan sekaligus menjadi guru pendamping bagi siswa. Namun untuk evaluasi sekolah yang dilakukan oleh dinas pendidikan kota belum pernah dilakukan di SDN 131 Kota Jambi dari awal penunjukan sebagai sekolah inklusi sampai dengan sekarang.

Guru di kelas dan sekolah melakukan evaluasi terhadap program pendidikan inklusi. Sebagian besar waktu, kriteria evaluasi berkaitan dengan bagaimana perilaku anak-anak berkebutuhan khusus. Evaluasi dilakukan dengan

memberikan umpan balik, menunjukkan kegembiraan, dan menanamkan nilai-nilai kepada anak muda berkebutuhan khusus. Evaluasi proses belajar mengajar dilakukan untuk meningkatkan pendidikan inklusif.

Dalam evaluasi perlu memperhatikan hal sebagai berikut:

- a) metode, waktu, dan isi kurikulum harus disesuaikan;
- b) hasil penilaian harus menjadi pertimbangan;
- c) penggunaan self-referenced assessment harus diperhatikan;
- d) penerapan yang fleksibel, multimetode, dan berkelanjutan harus digunakan; dan
- e) hasilnya harus dikomunikasikan secara rutin kepada orang tua
(Sunardi & Sunaryo, 2011).

Hasil penelitian sesuai dengan penelitian yang relevan yang dilakukan oleh Ery Wati (2014) Kepala sekolah telah bekerja untuk mempraktekkan program yang telah disiapkan berkaitan dengan program pendidikan inklusi di SD Negeri 32 Kota Banda Aceh. Kepala sekolah dan pejabat dari Kantor PPO Kota Banda Aceh mengatur tindakan untuk perumusan program, pelaksanaan program, dan pengawasan program untuk menentukan hal tersebut. Pengawasan ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kemajuan program pendidikan inklusif di kelas (kurikulum, sarana dan prasarana pembelajaran, dan instruktur pendamping khusus), serta untuk memberikan evaluasi baik yang sudah dicapai maupun yang belum.

4.3.2 Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Manajemen Kebijakan Pendidikan Inklusif di SDN 131 Kota Jambi.

a. Faktor Pendukung

Menurut Sunardi & Sunaryo, (2011) Dari sisi pendidikan luar biasa,

pendidikan inklusif akan berhasil jika didukung oleh faktor-faktor berikut:

1. sikap, komitmen, dan keyakinan yang positif dari seluruh guru, personel sekolah, dan orang tua;
2. ketersediaan layanan khusus dan adaptasi lingkungan fisik dan peralatan;
3. sistem pendukung, seperti ketersediaan guru luar biasa; dan
4. kebijakan dan prosedur yang tepat untuk memantau perkembangan setiap siswa penyandang disabilitas, termasuk untuk memastikan keselamatan mereka.
5. kurikulum yang fleksibel,
6. strategi pengajaran yang efektif, dan
7. keterlibatan dan dukungan masyarakat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang relevan yaitu penelitian yang dilakukan oleh Mukhlis (2011) Elemen internal, seperti kebebasan berinteraksi, pemerataan akses, jangkauan, manajemen, dan isi kebijakan, serta faktor eksternal, seperti koordinasi dan suasana yang inklusif, semuanya mempengaruhi bagaimana kebijakan diimplementasikan.

Untuk faktor pendukung terlaksananya pendidikan inklusif yaitu adanya undang-undang yang mengatur tentang pendidikan inklusif. Dan adanya guru pendamping dalam menjalankan prose pembelajaran. Semua yang bersangkutan dengan telaksanakannya pendidikan inklusif harus mengupayakan semaksimal mungkin tindakan dan sikap yang seharusnya dilakukan.



Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa guru pendamping malakukan interaksi dengan siswa pada saat proses pembelajaran maupun proses ekstrakurikuler di sekolah. Gambar diatas merupakan guru pendamping sekaligus orang tua siswa ABK dalam melatih siswa ABK untuk bernyanyi dalam pementasan seni. Terlihat guru pendamping dengan sabar mengajari siswa walupun harus dilakukan berulang-ulang.

b. Faktor Penghambat

Untuk membantu instruktur memberikan perawatan yang lebih intensif kepada siswa berkebutuhan khusus, masih sangat dibutuhkan guru pendamping khusus. Penyelenggaraan pendidikan inklusi masih belum terlaksana dengan baik dan masih perlu pengembangan.

- a) Kurangnya sistem pendukung yang memadai saat ini. Peran pemerintah, fasilitas pendidikan khusus, profesional, dan orang tua masih dipandang kecil. Sekolah masih memiliki keterbatasan fasilitas.
- b) Pemerintah dianggap kurang memperhatikan dan berinisiatif mengatasi

permasalahan aktual di lapangan, padahal seharusnya menjadi yang terdepan dalam mendorong pelaksanaan inklusi secara baik dan benar melalui regulasi regulasi dan bantuan teknis .

- c) Jumlahnya masih relatif kecil dan belum tersebar secara merata, meskipun pemerintahan saat ini telah mendaftarkan instruktur dalam program pelatihan atau menawarkan bantuan materi atau uang.S
- d) Sekolah umumnya juga belum didukung fasilitas yang diperlukan untuk mendukung aksesibilitas dan keberhasilan pembelajaran secara memadai.

Hasil penelitian didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Zaini Sudarto (2016) Dalam implementasi kebijakan pendidikan inklusi di enam sekolah inklusi di tingkat SD dan SMP, ditemukan beberapa permasalahan yang cukup banyak diketahui antara lain kekurangan guru Pendidik Khusus (GPK), kurangnya ruangan yang diperuntukan untuk penanganan anak penyandang disabilitas. berkebutuhan khusus (ABK), kurangnya psikolog atau konselor bimbingan (BK), kurangnya sosialisasi tentang pendidikan inklusi pada masyarakat sekitar sekolah, dan kurangnya pengetahuan tentang pendidikan inklusi.

Penelitian terdahulu oleh Munajah, Marini dan Sumantri (2021) mencatat bahwa karena guru tidak terlatih dalam pendidikan khusus, masih kurangnya pemahaman tentang bagaimana menangani anak berkebutuhan khusus. Karena sebagian besar pengajar sekolah dasar adalah lulusan program studi pendidikan guru sekolah dasar, mereka biasanya tidak memiliki pengetahuan khusus tentang cara berinteraksi dengan siswa berkebutuhan khusus. Maka mengacu kepada temuan penlitian dan penelitian terdahulu dapat diketahui bahwa faktor penghambat telaksananya manajemen penyelenggaraan pendidikan inklusif di

SDN 131 Kota Jambi adalah belum adanya guru pendamping khusus untuk ABK dan belum memadainya sarana dan prasarana di sekolah tersebut

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat peneliti tarik kesimpulan bahwa sebagai berikut:

1. Manajemen kebijakan pendidikan inklusif di SDN 131 Kota Jambi dapat dilihat dari beberapa unsur yaitu:
 - a) Unsur perencanaan yaitu, terlebih dahulu menetapkan tujuan, menyusun struktur, merumuskan keadaan, mengelola SDM, dan pengembangan metode pembelajaran. Penerimaan siswa berdasarkan tingkat berkebutuhan khusus kategori rendah dan sedang. Dengan membawa surat rekomendasi dari psikolog dan rekomendasi dari SLB.
 - b) Unsur pengorganisasian yaitu, Pembagian tugas yang harus dilakukan oleh setiap peserta untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan merupakan inti dari pendidikan inklusif. Dijelaskan bahwa organisasi tersebut meliputi (1) mengklasifikasikan instruktur PAUD ke dalam kategori yang berbeda berdasarkan peraturan ABK, dan (2) meningkatkan kompetensi guru melalui pendidikan dan pelatihan sesuai dengan persyaratan keahlian pendidik.
 - c) Unsur pelaksanaan yaitu, Dalam melaksanakan pendidikan inklusif tentu kurikulum juga mempengaruhi proses pembelajaran. Disini

kurikulum yang dipakai adalah K13 yang dimodifikasi untuk siswa berkebutuhan khusus. Serta guru akan membuat RPP yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa yang berkebutuhan khusus. Selain kurikulum dan RPP interaksi antara guru dan siswa, siswa reguler dan siswa berkebutuhan khusus juga perlu diperhatikan. Guru memberikan interaksi yang intens terhadap anak berkebutuhan khusus.

- d) Unsur evaluasi yaitu, Evaluasi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana anak berkebutuhan khusus mampu bersekolah di sekolah reguler. Dari penelitian yang telah dilakukan dapat dilihat bahwa setiap siswa berkebutuhan khusus akan dilakukan evaluasi berupa metode kognitif, affektif, psikomotor yang disesuaikan dengan anak bekebutuhan khusus.

2. Faktor pendukung dan penghambat manajemen penyelenggaraan pendidikan inklusif di SDN 131 Kota Jambi sebagai berikut:

- a) Faktor pendukung yaitu adanya undang-undang yang mendasari pendidikan inklusif dan adanya guru pendamping.
- b) Faktor penghambat yaitu saran prasarana, guru yang mengajar kelas iklusif belum lulusan pendidikan luar biasa.

5.2 saran

Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat peneliti memberi saran bahwa sebagai berikut:

1. Manajemen kebijakan pendidikan inklusif di SDN 131 Kota Jambi dapat dilihat dari beberapa unsur yaitu:

- a) Perencanaan, sebaiknya perencanaan memang dibuat dengan sangat kompleks. Sehingga semua yang berpengaruh terhadap pendidikan inklusi dapat menjalankan sesuai dengan tupoksi.
- b) Pengorganisasian, diharapkan dalam pengelompokkan guru yang mengajar di kelas inklusif lebih diperhatikan lagi dengan adanya pelatihan yang lebih sering dilakukan.
- c) Pelaksanaan, semua aspek yang termasuk kedalam terlaksannya pendidikan inklusi harus mendapatkan perhatian khusus. Bukan hanya bagaimana menangani ABK pada saat proses pembelajaran. Tetapi juga aspek seperti orang tua, saranan prasana, pelaporan terhadap orang tua juga harus dipertimbangkan lagi.
- d) Evaluasi, sebaiknya evaluasi rutin dilakukan untuk melihat sejauh mana tujuan telah dicapai. Evaluasi disini bukan hanya untuk ABK tetapi juga untuk guru dan sekolah yang menjalankan pendidikan inklusi. Diharapkan pemerintah daerah mampu melakukan evaluasi sebagaimana mestinya.

2. Faktor pendukung dan penghambat manajemen penyelenggaraan pendidikan inklusif di SDN 131 Kota Jambi sebagai berikut:

- a. Faktor pendukung, walaupun undang-undang telah mengatur tentang pendidikan inklusi Sebaiknya dinas pendidikan, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat mengintervensi dan lebih fokus pada pendidikan inklusif. Dengan demikian, guru pendamping bagi siswa berkebutuhan khusus tidak perlu khawatir tentang tindakan apa yang akan diambil ke depannya.

b. Faktor penghambat. Sebaiknya infrastruktur dan fasilitas di sekolah inklusif dirancang dengan baik untuk kepentingan siswa berkebutuhan khusus sehingga siswa tersebut merasa nyaman. Bisa juga dikatakan bahwa infrastruktur dan fasilitas yang memadai memfasilitasi pendidikan inklusif yang efektif.

Daftar Pustaka

- Alhassan, A. M. (2014). Implementation of Inclusive Education in Ghanaian Primary Schools: A Look at Teachers` Attitudes. *American Journal of Educational Research*, 2(3), , 142-148.
- Ali, M. M., Mustapha , R., & Jelas, Z. M. (2006). An Empirical Study On Teachers` Perceptions Towards Inclusive Education In Malaysia. *International Journal Of Special Education*, 21(3), 36-44.
- Allen, K. C. (2000). *the exceptional child: inclusion in early childhood education*. USA: Delmar Cengage Learning.
- Barton, L. (2003). *Inclusive education and teacher education*. London: Institute of Education University of London.
- Danang, G. (2015). *Pengantar Pendidikan Inklusif*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar analisis kebijakan publik edisi kedua*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Grimes, P. (2010). *A quality education for all. a history of the lao PDR inclusive education project. 1993-2009*.
- Hasbullah , H. M. (2015). *Kebijakan Pendidikan; dalam Perspektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia* . Jakarta: Rajawali Pers.
- Hizriyani, R. (2018). Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif Pada Sekolah Paud Dan Ra. *JENDELA BUNDA*, 6(1), 37-47.
- Isabella, P., Emosda, & Suratno. (2014). Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi Bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus Di Sdn 131/Iv Kota Jambi. *Tekno-Pedagogi*, 4(2), 45-59.
- Karana, D. P. (2016). Implementasi Manajemen Pendidikan Inklusif Di Sd Negeri Gadingan Wates Dan Mi Ma'arif Pagerharjo Samigaluh. *Akuntabilitas*

- Manajemen Pendidikan*, 4(1), 63-76.
- Lia , R., & Rina , H. (2019). Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif Pada Sekolah Paud Implementation Of Inclusive Education Policy In Kindergarten. *Psikologi*, 2(1), 32-39.
- Mashun. (2020). Implementasi Manajemen Pendidikan Inklusi Pada SD Al Firdaus Surakarta dan SDN Karanganyar Yogyakarta: Suatu Evaluasi Program. *At-Tadbir STAI Darul Kamal NW Kembang kerang*, 4(1), 1-13.
- Mitiku, W., Alemu, Y., & Mengsitu, S. (2014). Challenges and Opportunities to Implement Inclusive Education. *Asian Business Consortium*, 1(2), 118-136.
- Moleong, L. (2014). *Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muazza, Hadiyanto, Delvia, Heny, Mukminin, A., Habibi , A., et al. (2018). Analisis Kebijakan Pendidikan Inklusi: Studi Kasus di Sekolah Dasar Jambi. *Kependidikan*, 2(1), 1-12.
- Mukhlis. (2011). Kebijakan Pendidikan Inklusif: Implementasinya Pada Satuan Pendidikan Dasar di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. *Administrasi Publik*, 2(1), 30-38.
- MUMBI, M. E. (2008). Challenges Facing The Implementation Of Inclusive Education In Public Primary Schools In Nyeri Town, Nyeri County, Kenya. *thesis*.
- Munajah, R., Marini, A., & Sumantri, M. S. (2021). Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar. *Basicedu*, 5(3), 1183-1190.
- Muspawi, M. (2020). Strategi Menjadi Kepala Sekolah Profesional. *Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(2), 402-409.
- Natalia, K., & Mundilarno. (2019). Manajemen Pembelajaran Inklusi dalam Mewujudkan Mutu Pendidikan. *Media Manajemen Pendidikan*, 2(1), 90-100.
- Palupi, I. (2019). Manajemen Pendidikan Inklusi Di Sd Negeri Secang 3

Kabupaten Magelang. *skripsi*.

Prastiyono. (2013). Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif (Studi di Sekolah Galuh Handayani Surabaya). *Administrasi Publik*, 11(1), 117 - 128.

Stubbs, S. (2008). *Inclusive Education: Where there are few resources 2008*. Manchester: The Atlas Alliance.

Sudarto, Z. (2016). Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif. *Pendidikan*, 1(1), 89 - 97.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sunardi , & Sunaryo. (2011). Manajemen Pendidikan Inklusif (Konsep, Kebijakan, dan Implementasinya). *jMJI_Anakku*, 10(2), 184-200.

Wati, E. (2014). Manajemen Pendidikan Inklusi Di Sekolah Dasar Negeri 32 Kota Banda Aceh. *Ilmiah DIDAKTIKA*, 14(2), 368-378.

Wiliyanto, N. R. (2022). Manajemen Pendidikan Inklusi Di Sman 1 Padangan. *Manajemen Pendidikan*, 4(1), 144-152.

Yuliah, E. (2020). Implementasi Kebijakan Pendidikan. *at-Tadbir*, 30(2), 129-153.

Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah DEPDIKNAS Jakarta Nomor: 30/C.C6/MN/2003

(PP) Nomor 17 Tahun 2010 Pasal 129 ayat (3)

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 70 Tahun 2009 Pasal 1

UU Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 5 ayat (2)

UUD 1945 Pasal 31 ayat (1)

UUSPN Nomor 20 Tahun 2003 Bab 1, Pasal (1)

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Observasi

Data yang akan diamati melalui metode observasi ada beberapa aspek, diantaranya yaitu kondisi lokasi penelitian, struktur organisasi, perencanaan, dari manajemen kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif, pengorganisasian dari manajemen kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif, pelaksanaan dari manajemen kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif, dan evaluasi dari manajemen kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif pertanyaan yang menjadi acuan dalam observasi, sebagai berikut :

No.	Aspek	Deskripsi
1.	Kondisi SDN 131 Kota Jambi a. Letak geografis b. Profil SDN 131 Kota Jambi	
2.	Struktur Organisasi SDN 131 Kota Jambi	
3.	Perencanaan dari manajemen kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif	
4.	Pengorganisasian dari manajemen kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif	
5.	Pelaksanaan dari manajemen kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif	
6.	Evaluasi dari manajemen kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif	

Lampiran 2 Pedoman Wawancara

(Pedoman wawancara kepala sekolah)

Nama :
 Jabatan :
 Hari/Tanggal/Jam :
 Tempat :
 Daftar Pertanyaan :

1. Sejak kapan ibu menjadi kepala sekolah di SDN 131 Kota Jambi?
2. Terdapat berapa jumlah ABK di SDN 131 Kota Jambi?
3. Bagaimana ibu dapat mengetahui bahwa siswa tersebut ABK?
4. Bagaimana menurut pendapat ibu tentang pendidikan inklusif?
5. Bagaimana tujuan dari pendidikan inklusif?
6. Bagaimana cara penerimaan peserta didik berkebutuhan khusus?
7. Bagaimana sarana dan prasana dalam penerapan kebijakan pendidikan inklusif di SDN 131 Kota Jambi?
8. Bagaimana penempatan kelas bagi mereka, apakah ada kelas khusus atau berbaur dengan kelas reguler?
9. Adakah perbedaan materi, metode dan evaluasi bagi peserta didik berkebutuhan khusus?
10. Bagaimana penyusunan RPP di kelas inklusif?
11. Bagaimana cara mengukur hasil belajar siswa terkait evaluasi dalam kelas inklusif?
12. Metode apa yang digunakan dalam mengukur evaluasi pembelajaran?
13. Bagaimana untuk sistem kenaikan kelas?
14. Dengan cara apa peserta didik dinyatakan tamat/lulus dari sekolah?
15. Apakah ada pelatihan untuk guru yang mengajar peserta didik berkebutuhan khusus?
16. Apakah sekolah menjalin kerjasama dengan tenaga ahli, misalnya: dokter, psikologis,, terapis, atau pekerja sosial?
17. Faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat pelaksanaan pendidikan inklusif?
18. Apa harapan kedepannya demi kemajuan penyelenggaraan pendidikan

inklusif di SDN 131 Kota Jambi?

(Pedoman wawancara beberapa guru)

Nama :
Jabatan :
Hari/Tanggal/Jam :
Tempat :
Daftar Pertanyaan :

1. Menurut pendapat bapak/ibu apa yang dimaksud dengan pendidikan inklusif?
2. Bagaimana tujuan dari pendidikan inklusif?
3. Apakah latar belakang pendidikan bapak/ibu?
4. Apakah bapak/ibu mengetahui peserta didik yang berkebutuhan khusus?
5. Bagaimana bapak/ ibu merencanakan pengelolaan kelas dalam setting pendidikan inklusif?
6. Bagaimana bapak/ibu merencanakan pengorganisasian bahan materi dalam setting pendidikan inklusif?
7. Strategi apa yang bapak/ibu gunakan dalam proses belajar mengajar?
8. Prosedur apa yang bapak/ ibu gunakan dalam proses belajar mengajar?
9. Kurikulum apa yang dipakai dalam proses belajar mengajar?
10. Apakah kurikulum tersebut sudah mengakomodasi kebutuhan anak berkebutuhan khusus?
11. Apakah bapak/ibu membuat RPP dan Silabus yang sesuai dengan kebutuhan anak berkebutuhan khusus?
12. Sesering apa bapak/ibu melakukan interaksi dengan anak berkebutuhan khusus?
13. Menurut bapak ibu bagaimana ketersediaan sarana prasarana untuk anak berkebutuhan khusus?
14. Apakah sekolah menyediakan media untuk anak berkebutuhan khusus?
15. Selama ini apakah terdapat kendala dalam melaksanakan kebijakan pendidikan inklusif itu sendiri?

16. Apa saja yang menjadi factor pendukung dan penghambat dari ketercapain penerapan kebijakan pendidikan inklusif di SDN 131 Kota Jambi?
17. Bagaimana bentuk pelayanan yang diberikan kepada siswa berkebutuhan khusus?
18. Bagaimana sikap guru dalam menghadapi siswa yang berkebutuhan khusus?
19. Bagaimana kemampuan calistung untuk siswa yang berkebutuhan khusus, apakah ada perbedaan dengan siswa normal? Dan bagaimana cara mengajar guru tentang calistung terhadap siswa yang berkebutuhan khusus?
20. Bagaimana cara mengukur hasil belajar siswa terkait evaluasi dalam kelas inklusif?
21. Metode apa yang digunakan dalam mengukur evaluasi pembelajaran?
22. Bagaimana untuk sistem kenaikan kelas?
23. Dengan cara apa peserta didik dinyatakan tamat/lulus dari sekolah?
24. Apakah ada pelatihan untuk guru yang mengajar peserta didik berkebutuhan khusus?
25. Apakah sekolah menjalin kerjasama dengan tenaga ahli, misalnya: dokter, psikologis,, terapis, atau pekerja sosial?

Lampiran 3 Surat Undangan Peserta Penelitian



Lampiran 4 Surat Ketersediaan Menjadi Responden

Responden 1

Lampiran 4. Surat Ketersediaan Penelitian

SURAT KESEDIAAN

Judul Penelitian : Manajemen kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif di SDN 131 Kota Jambi

Saya, Rika Syaf Putri, Mahasiswa Magister Manajemen Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Jambi bermaksud memohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/Saudari untuk berpartisipasi secara sukarela dalam penelitian Tesis S2 saya yang berjudul "Implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif di SDN 131 Kota Jambi". Adapun tujuan dalam penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus ini adalah untuk menganalisis Implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif di SDN 131 Kota Jambi. Dalam penelitian ini, Bapak/Ibu/Saudara/Saudari akan diundang untuk berpartisipasi dalam wawancara dan melengkapi angket demografik. Data hasil wawancara dan demografik Bapak/Ibu/Saudara/Saudari akan dirahasiakan dan akan disimpan di mana hanya peneliti yang bisa mengakses data tersebut. Selain itu, data Bapak/Ibu/Saudara/Saudari akan dimusnahkan setelah penelitian ini selesai dilaksanakan.

Kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/Saudari untuk terlibat dalam penelitian ini sepenuhnya sukarela. Bapak/Ibu/Saudara/Saudari setiap saat bisa mengundurkan diri atau tidak bersedia diwawancarai atau menjawab pertanyaan dalam penelitian ini. Juga keterlibatan dalam penelitian ini tidak akan berdampak finansial dan tidak membahayakan keselamatan Bapak/Ibu/Saudara/Saudari. Mohon Bapak/Ibu/Saudara/Saudari simpan salinan surat ini apabila memerlukan penjelasan tentang penelitian ini silahkan untuk menghubungi saya.

PERNYATAAN KESEDIAAN

Sudah membaca diskripsi tentang penelitian ini dan saya sudah diyakinkan oleh peneliti untuk mengajukan pertanyaan dimasa yang akan datang dan bisa mengundurkan diri. Dengan ini saya menyatakan bersedia ikut serta dalam penelitian ini dan saya akan menyimpan salinan surat kesediaan ini.

Tanda tangan peserta penelitian	Tempat dan Tanggal
	
Tanda tangan peneliti	Tempat dan Tanggal
	

Responden 2

Lampiran 4. Surat Ketersediaan Penelitian

SURAT KESEDIAAN

Judul Penelitian : Manajemen kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif di SDN 131 Kota Jambi

Saya, Rika Syaf Putri, Mahasiswa Magister Manajemen Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Jambi bermaksud memohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/Saudari untuk berpartisipasi secara sukarela dalam penelitian Tesis S2 saya yang berjudul "Implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif di SDN 131 Kota Jambi". Adapun tujuan dalam penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus ini adalah untuk menganalisis Implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif di SDN 131 Kota Jambi. Dalam penelitian ini, Bapak/Ibu/Saudara/Saudari akan diundang untuk berpartisipasi dalam wawancara dan melengkapi angket demografik. Data hasil wawancara dan demografik Bapak/Ibu/Saudara/Saudari akan dirahasiakan dan akan disimpan di mana hanya peneliti yang bisa mengakses data tersebut. Selain itu, data Bapak/Ibu/Saudara/Saudari akan dimusnahkan setelah penelitian ini selesai dilaksanakan.

Kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/Saudari untuk terlibat dalam penelitian ini sepenuhnya sukarela. Bapak/Ibu/Saudara/Saudari setiap saat bisa mengundurkan diri atau tidak bersedia diwawancarai atau menjawab pertanyaan dalam penelitian ini. Juga keterlibatan dalam penelitian ini tidak akan berdampak finansial dan tidak membahayakan keselamatan Bapak/Ibu/Saudara/Saudari. Mohon Bapak/Ibu/Saudara/Saudari simpan salinan surat ini apabila memerlukan penjelasan tentang penelitian ini silahkan untuk menghubungi saya.

PERNYATAAN KESEDIAAN

Sudah membaca diskripsi tentang penelitian ini dan saya sudah diyakinkan oleh peneliti untuk mengajukan pertanyaan dimasa yang akan datang dan bisa mengundurkan diri. Dengan ini saya menyatakan bersedia ikut serta dalam penelitian ini dan saya akan menyimpan salinan surat kesediaan ini.

Tanda tangan peserta penelitian



Tempat dan Tanggal

Tanda tangan peneliti



Tempat dan Tanggal

Responden 3

Lampiran 4. Surat Ketersediaan Penelitian

SURAT KESEDIAAN

Judul Penelitian : Manajemen kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif di SDN 131 Kota Jambi

Saya, Rika Syaf Putri, Mahasiswa Magister Manajemen Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Jambi bermaksud memohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/Saudari untuk berpartisipasi secara sukarela dalam penelitian Tesis S2 saya yang berjudul "Implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif di SDN 131 Kota Jambi"; Adapun tujuan dalam penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus ini adalah untuk menganalisis Implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif di SDN 131 Kota Jambi. Dalam penelitian ini, Bapak/Ibu/Saudara/Saudari akan diundang untuk berpartisipasi dalam wawancara dan melengkapi angket demografik. Data hasil wawancara dan demografik Bapak/Ibu/Saudara/Saudari akan dirahasiakan dan akan disimpan dimana hanya peneliti yang bisa mengakses data tersebut. Selain itu, data Bapak/Ibu/Saudara/Saudari akan dimusnahkan setelah penelitian ini selesai dilaksanakan.

Kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/Saudari untuk terlibat dalam penelitian ini sepenuhnya suka rela. Bapak/Ibu/Saudara/Saudari setiap saat bisa mengundurkan diri atau tidak bersedia diwawancarai atau menjawab pertanyaan dalam penelitian ini. Juga keterlibatan dalam penelitian ini tidak akan berdampak finansial dan tidak membahayakan keselamatan Bapak/Ibu/Saudara/Saudari. Mohon Bapak/Ibu/Saudara/Saudari simpan salinan surat ini apabila memerlukan penjelasan tentang penelitian ini silahkan untuk menghubungi saya.

PERNYATAAN KESEDIAAN

Sudah membaca diskripsi tentang penelitian ini dan saya sudah diyakinkan oleh peneliti untuk mengajukan pertanyaan dimasa yang akan datang dan bisa mengundurkan diri. Dengan ini saya menyatakan bersedia ikut serta dalam penelitian ini dan saya akan menyimpan salinan surat kesediaan ini.

Tanda tangan peserta penelitian _____ Tempat dan Tanggal _____


Rika Syaf Putri, S.Pd
Tanda tangan peneliti _____ Tempat dan Tanggal _____



Responden 4

Lampiran 4. Surat Ketersediaan Penelitian

SURAT KESEDIAAN

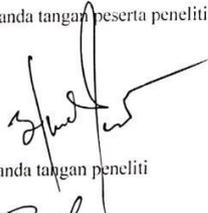
Judul Penelitian : Manajemen kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif di SDN 131 Kota Jambi

Saya, Rika Syaf Putri, Mahasiswa Magister Manajemen Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Jambi bermaksud memohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/Saudari untuk berpartisipasi secara sukarela dalam penelitian Tesis S2 saya yang berjudul "Implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif di SDN 131 Kota Jambi": Adapun tujuan dalam penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus ini adalah untuk menganalisis Implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif di SDN 131 Kota Jambi. Dalam penelitian ini, Bapak/Ibu/Saudara/Saudari akan diundang untuk berpartisipasi dalam wawancara dan melengkapi angket demografik. Data hasil wawancara dan demografik Bapak/Ibu/Saudara/Saudari akan dirahasiakan dan akan disimpan di mana hanya peneliti yang bisa mengakses data tersebut. Selain itu, data Bapak/Ibu/Saudara/Saudari akan dimusnahkan setelah penelitian ini selesai dilaksanakan.

Kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/Saudari untuk terlibat dalam penelitian ini sepenuhnya sukarela. Bapak/Ibu/Saudara/Saudari setiap saat bisa mengundurkan diri atau tidak bersedia diwawancarai atau menjawab pertanyaan dalam penelitian ini. Juga keterlibatan dalam penelitian ini tidak akan berdampak finansial dan tidak membahayakan keselamatan Bapak/Ibu/Saudara/Saudari. Mohon Bapak/Ibu/Saudara/Saudari simpan salinan surat ini apabila memerlukan penjelasan tentang penelitian ini silahkan untuk menghubungi saya.

PERNYATAAN KESEDIAAN

Sudah membaca diskripsi tentang penelitian ini dan saya sudah diyakinkan oleh peneliti untuk mengajukan pertanyaan dimasa yang akan datang dan bisa mengundurkan diri. Dengan ini saya menyatakan bersedia ikut serta dalam penelitian ini dan saya akan menyimpan salinan surat kesediaan ini.

Tanda tangan peserta penelitian	Tempat dan Tanggal
	
Tanda tangan peneliti	Tempat dan Tanggal
	

Responden 5

Lampiran 4. Surat Ketersediaan Penelitian

SURAT KESEDIAAN

Judul Penelitian : Manajemen kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif di SDN 131 Kota Jambi

Saya, Rika Syaf Putri, Mahasiswa Magister Manajemen Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Jambi bermaksud memohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/Saudari untuk berpartisipasi secara sukarela dalam penelitian Tesis S2 saya yang berjudul "Implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif di SDN 131 Kota Jambi". Adapun tujuan dalam penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus ini adalah untuk menganalisis Implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif di SDN 131 Kota Jambi. Dalam penelitian ini, Bapak/Ibu/Saudara/Saudari akan diundang untuk berpartisipasi dalam wawancara dan melengkapi angket demografik. Data hasil wawancara dan demografik Bapak/Ibu/Saudara/Saudari akan dirahasiakan dan akan disimpan di mana hanya peneliti yang bisa mengakses data tersebut. Selain itu, data Bapak/Ibu/Saudara/Saudari akan dimusnahkan setelah penelitian ini selesai dilaksanakan.

Kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/Saudari untuk terlibat dalam penelitian ini sepenuhnya sukarela. Bapak/Ibu/Saudara/Saudari setiap saat bisa mengundurkan diri atau tidak bersedia diwawancarai atau menjawab pertanyaan dalam penelitian ini. Juga keterlibatan dalam penelitian ini tidak akan berdampak finansial dan tidak membahayakan keselamatan Bapak/Ibu/Saudara/Saudari. Mohon Bapak/Ibu/Saudara/Saudari simpan salinan surat ini apabila memerlukan penjelasan tentang penelitian ini silahkan untuk menghubungi saya.

PERNYATAAN KESEDIAAN

Sudah membaca diskripsi tentang penelitian ini dan saya sudah diyakinkan oleh peneliti untuk mengajukan pertanyaan dimasa yang akan datang dan bisa mengundurkan diri. Dengan ini saya menyatakan bersedia ikut serta dalam penelitian ini dan saya akan menyimpan salinan surat kesediaan ini.

Tanda tangan peserta penelitian

Tempat dan Tanggal



Tanda tangan peneliti

Tempat dan Tanggal



Lampiran 5 Demografik Peserta Penelitian

ANGKET DEMOGRAFIK PESERTA PENELITIAN

**Judul Penelitian : Manajemen kebijakan penyelenggaraan pendidikan
inklusif di SDN 131 Kota Jambi**

DEMOGRAFIK PESERTA PENELITIAN	
Nama	
Umur	
Pekerjaan	
Lama Bekerja	
Jabatan	
Pendidikan Terakhir	
Jenis Kelamin	

WAWANCARA		
Kesediaan untuk diwawancarai	Ya	Tidak
Kemungkinan waktu yang tepat untuk di wawancarai jika bersedia	Pagi/ Siang	Sore/ Malam
Kemungkinan lokasi wawancara yang nyaman	Sekolah	Rumah
Lama wawancara jika bersedia	15-30 Menit	30-45 Menit

Lampiran 6 Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Kampus Pinang Masak Jalan Raya Jambi - Ma. Bulian, KM. 15, Mendalo Indah, Jambi
Kode Pos. 36361, Telp. (0741)583453 Laman www.fkip.unja.ac.id Email. fkip@unja.ac.id

Nomor : 4945/UN21.3/PT.01.04/2022
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

2 November 2022

Yth. **Kepala SD Negeri 131 Kota Jambi**

di-

Tempat

Dengan hormat,

Dengan ini diberitahukan kepada Saudara, bahwa mahasiswa kami atas nama:

Nama : **Rika Syaf Putri**
NIM : P2A221017
Program Studi : Manajemen Pendidikan
Jurusan : Ilmu Pendidikan.

akan melaksanakan penelitian guna penyusunan tesis yang berjudul:
"Manajemen Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di SD Negeri 131 Kota Jambi"

Berkenaan dengan hal tersebut mohon kiranya mahasiswa yang bersangkutan dapat diizinkan melakukan penelitian di tempat yang Saudara pimpin.

Penelitian akan dilaksanakan pada tanggal **31 Oktober s.d 30 November 2022**

Demikian atas bantuan dan kerjasamanya di ucapkan terima kasih

a.n. Dekan
Wakil Dekan BAKSI,



Delita Sariika, S.S., M.IT.S., Ph.D
NIP.198110232005012002



Lampiran 7 Surat Telah Melakukan Penelitian



PEMERINTAH KOTA JAMBI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SD NEGERI 131 KOTA JAMBI

Jln. Kapten A. Khatib Rt. 14 Kel. Pematang Sulur Kec. Telanaipura Kota Jambi

TER AKREDITASI : A Kode Pos : 36124 NIS : 10110040102 NPJN : 10504496 ✉ sdnegeri131kotajambi@gmail.com



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: ASIAH, S.Pd.I
NIP	: 19730704 199406 2 001
Pangkat/Golongan	: Pembina / IV.a
Jabatan	: Kepala Sekolah
Unit Kerja	: SD Negeri 131/IV Kec. Telanaipura

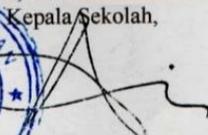
Menerangkan bahwa :

Nama	: Rika Syaf Putri
NIM	: P2A221017
Program Studi	: Manajemen Pendidikan
Jurusan	: Ilmu Pendidikan

Telah melaksanakan penelitian pada tanggal **03 Oktober s.d 30 November 2022** dengan Judul ” **Manajemen Kebijakan Penyelenggaraan Inklusif di SD Negeri 131 Kota Jambi) “**

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jambi, 15 Desember 2022
Kepala Sekolah,



ASIAH, S.Pd.I
NIP. 19790317 200501 1 005

Lampiran 8 Dokumentasi Foto Penelitian

Foto wawancara





Foto siswa ABK

Dalam foto dibawah ini dapat kita lihat interaksi yang dilakukan oleh siswa reguler terhadap siswa ABK. Dimana siswa reguler membantu siswa ABK dalam melakukan latihan.













Lampiran 9 1 Hasil Wawancara

(Pedoman wawancara kepala sekolah)

1. Terdapat berapa jumlah ABK di SDN 131 Kota Jambi?

Jawaban:

“Untuk siswa ABK ad 32 orang. Dan kondisi siswa ini berbeda-beda, ada yang lamban atau IQ rendah ataupun kelainan fisik. Yang diterima juga tidak yang begitu parah. “kalau untuk masuk kesekolah atau penerimaan siswa baru itu harus dapat rekomendasi dulu dari psikolog bahwa siswa ini bisa sekolah di sekolah umum ini. Karena ya memang tidak mudah untuk mengajar siswa berkebutuhan khusus. Jadi memang harus ya rekomendasi asesmen diagnostiknya” (RA, 29-11-2022)

2. Bagaimana ibu dapat mengetahui bahwa siswa tersebut ABK?

Jawaban:

“Melalui itu tadi assesmen diagnostik awal oleh psikolog”(RA, 29-11-2022).

3. Bagaimana menurut pendapat ibu tentang pendidikan inklusif?

Jawaban:

“pendidikan inklusif sangat diperlukan untuk menunjang pendidikan bagi seluruh anak. Baik yang umum maupun anak berkebutuhan khusus”

4. Bagaimana tujuan dari pendidikan inlusif?

Jawaban:

“sangat bagus karena siswa yang normal dapat berdaptasi dengan siswa yang berkebutuhan khusus” (RA, 29-11-2022).

5. Bagaimana cara penerimaan peserta didik berkebutuhan khusus?

Jawaban:

“Siswa datang membawa surat rekomendasi dari SLB dan membawa rekomendasi dari psikolog” (RA,29-11-2022)

6. Bagaimana sarana dan prasana dalam penerapan kebijakan pendidikan inklusif di SDN 131 Kota Jambi?

Jawaban:

“untuk sarana prasarana disini belum memadai” (RA, 29-11-2022).

7. Bagaimana penempatan kelas bagi mereka, apakah ada kelas khusus atau berbaur dengan kelas reguler?

Jawaban:

“jika berbicara prosedur pasti dilakukan dengan baik. Seperti contohnya saya menahan diri untuk memberikan bantuan kepada peserta didik. Kita arahkan terlebih dahulu baru dibantu. Terus melatih anak untuk belajar dari kesalahan. Catat perkembangan anak, ajari rasa percaya diri, kemudian pasti memberi kesempatan anak untuk berbaur dengan siswa lain. Dalam hal ini saya juga dibantu oleh orang tua siswa itu sendiri selaku guru pendamping dari anak berkebutuhan khusus” (RA, 29-11-2022).

8. Adakah perbedaan materi, metode dan evaluasi bagi peserta didik berkebutuhan khusus (Kurikulum)?

Jawaban:

“kurikulum disini memang k13, tetapi khusus untuk ABK tentunya dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan siswa itu sendiri. Seperti materi, metode dan evaluasinya disesuaikan dengan siswa itu sendiri. Tetapi secara umum menggunakan k13. Karena memang anak berkebutuhan khusus disini adalah tingkat rendah dan sedang jadi tidak begitu sulit untuk melaksanakan kurikulum ini” (RA, 29-11-2022).

9. Bagaimana penyusunan RPP di kelas inklusif?

Jawaban:

“RPP dibuat dan dirancang sesuai dengan kebutuhan ABK” (RA, 29-11-2022).

10. Bagaimana cara mengukur hasil belajar siswa terkait evaluasi dalam kelas inklusif?

Jawaban:

“Evaluasi yang digunakan evaluasi proses dan evaluasi hasil. ” (RA, 29-11-2022).

11. Metode apa yang digunakan dalam mengukur evaluasi pembelajaran?

Jawaban:

“dengan pengamatan, wawancara dan tes. Evaluasi yang digunakan evaluasi proses dan evaluasi hasil.” (RA, 29-11-2022).

12. Dengan cara apa peserta didik dinyatakan tamat/lulus dari sekolah?

Jawaban:

“Untuk sistem lulus atau tidak lulus dilihat dari tuntas semua mapel dari jenjang kelas 1-6, ikut serta dalam ujian akhir. Sikap perilaku minimal baik” (RA, 29-11-2022).

13. Apakah ada pelatihan untuk guru yang mengajar peserta didik berkebutuhan khusus?

Jawaban:

“ya, ada pelatihan untuk guru mengajar kelas inklusif. Dan kami bekerjasama dengan psikolog, terapis dan lain sebagainya. Harapan saya kedepannya semoga ada fasilitas pendukung lagi untuk siswa berkebutuhan khusus. Dan adanya guru khusus untuk siswa ABK seperti dari lulusan pendidikan luar biasa” (RA, 29-15-2022).

14. Apakah sekolah menjalin kerjasama dengan tenaga ahli, misalnya: dokter, psikologis, terapis, atau pekerja sosial?

Jawaban:

“kami melakukan kerja sama dengan psikolog dan SLB terdekat terkait dengan ABK” (RA, 29-15-2022).

15. Faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat pelaksanaan pendidikan inklusif?

Jawaban:

“ faktor pendukung sih adanya undang-undang pendidikan inklusif. Dan faktor penghambat paradigma orang tua. Serta siswa itu kalau kesekolah sesuai keinginan mereka saja, sering juga tidak hadir. Dan yang mengajar disinni untuk kelas inklusif itu guru lulusan PGSD atau pun sarjana pendidikan belum lulusan pendidikan luar biasa” (RA, 29-11-2022).

16. Apa harapan kedepannya demi kemajuan penyelenggaraan pendidikan inklusif di SDN 131 Kota Jambi?

Jawaban:

“adanya fasilitas untuk anak berkebutuhan khusus, dan adanya guru pendamping yang memang lulusan SLB.

(Pedoman wawancara beberapa guru)

1. Menurut pendapat bapak/ibu apa yang dimaksud dengan pendidikan inklusif?

Jawaban:

“sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan ABK untuk bersekolah di sekolah reguler” (EH, 15-11-2022).

“pendidikan yang mengatur siswa ABK bersekolah di sekolah umum” (KDP, 15-11-2022).

“pendidikan yang memberikan kesempatan kepada siswa yang memiliki kondisi berbeda dengan siswa reguler atau sekolah umum” (KT, 15-11-2022).

“pendidikan yang mampu mengarahkan ABK untuk bersekolah secara umum” (EW, 15-11-2022).

2. Bagaimana tujuan dari pendidikan inklusif?

Jawaban:

“pemerataan hak belajar” (EH, 15-11-2022).

“memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada anak berkebutuhan khusus”(KDP, 15-11-2022).

“memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada siswa ABK untuk memperoleh pendidikan yang dibutuhkan” (KR, 15-11-2022).

“peserta didik dapat belajar menerima adanya perbedaan, beradaptasi dan berinteraksi. Peserta didik menumbuhkan percaya diri” (EW, 15-11-2022).

3. Apakah bapak/ibu mengetahui peserta didik yang berkebutuhan khusus?

Jawaban:

“ya saya mengetahui” (EH, 15-11-2022).

“iya saya tau” (KDP, 15-11-2022).

“Mengetahui, karena banyak memang peserta didik yang merupakan anak berkebutuhan khusus”(KR, 15-11-2022).

“mengetahui, karena dapat dilihat. Apalagi sekolah kami menerima peserta didik tersebut” (EW, 15-11-2022).

4. Bagaimana bapak/ ibu merencanakan pengelolaan kelas dalam setting pendidikan inklusif?

Jawaban:

“tindakan yang diberikan tentu berbeda ya anak reguler dengan anak berkebutuhan khusus” (KDP, 15-11-2022).

“dalam pengelolaan kelas anak ABK berbaur dengan teman lain tanpa ada perbedaan terutama dalam posisi tempat duduk” (KR, 15-11-2022).

“peserta didik berkebutuhan khusus dalam menerima pembelajaran dikelas tidak samakan dengan peserta reguler sesuai tingkat pemahamannya.

Peserta didik berkebutuhan khusus didampingi oleh guru pendamping”. c

5. Bagaimana bapak/ibu merencanakan pengorganisasian bahan materi dalam setting pendidikan inklusif?

Jawaban:

“dalam pengelolaan kelas peserta didik berkebutuhan khusus berbaur dengan teman yang lainnya tanpa ada perbedaan misalnya penempatan posisi tempat duduk” “peserta didik dibantu oleh guru pendamping” ((KR, 15-11-2022).

“kalau materi ya sama dengan siswa reguler lainnya. hanya saya dimodifikasi lagi di bagian RPPnya ya. Maksudnya disesuaikan lagi dengan siswa. Materi sama tapi perlakuan saja mungkin ada yang lebih dari satu kali pengulangan materi ajar” (KR, 15-11-2022).

“sama sih seperti siswa pada umumnya” (EH, 15-11-2022).

“materi seperti biasa saja ya, paling ngejelasinnya aja yang agak lebih dari siswa umum” (KDP, 15-11-2022).

6. Strategi apa yang bapak/ibu gunakan dalam proses belajar mengajar?

Jawaban:

“untuk srategi yang digunakan yaitu kelompok belajar”(KDP, 15-11-2022).

“strategi yanggg digunakan ya bekerja sama atau membuat kelompok gitu” (EW, 15-11-2022).

“kalau metode yang saya gunakan seperti ceramah, kuis juga diskusi, bekerjasama dengan teman. Itu ya yang menjadi strategi saya yaitu lebih kepada diskusi dan kerjasama antar siswa seperti pembagian kelompok” (KR, 15-11-2022).

“strategi khususnya ya mampu melihat kondisi siswa, jika memang kurang paham maka akan diulangi lagi. Siswa juga dibantu oleh peserta didik lainnya. dan kalau untkk mengerjakan tugas ya diberikan tambahan waktu” (EH, 15-11-2022).

7. Prosedur apa yang bapak/ ibu gunakan dalam proses belajar mengajar?

Jawaban:

“peserta didik dibantu oleh guru pendampng” ((KR, 15-11-2022).

“kalau untuk prosedur pembelajarannya lebih ke desain pembelajaran. Seperti desain kolaboratif seperti itu. Yakninya fleksibel, pembelajarannya dimodifikasi sedikit, dan juga mendapatkan dukungan. Disini kami para guru juga bekerjasama dengan guru pendamping agar memperlancar proses pembelajaran”(EW, 15-11-2022).

“tentunya bekerjasama dengan segala pihak ya untuk tercapainya pembelajaran tersebut” (EH, 15-11-2022).

“peserta didik dibantu oleh guru pendampng” ((KR, 15-11-2022).

8. Kurikulum apa yang dipakai dalam proses belajar mengajar?

Jawaban:

“kurikulum yang digunakan di sekolah ini kurikulum k13, tetapi memang dimodifikasi lagi untuk anak berkebutuhan khusus” (KR, 15-11-2022).

“kurikulum yang dipakai k13”(EH, 15-11-2022).

“disini guru menggunakan kurikulum reguler yaitu k13, untuk anak berkebutuhan khusus dirancang sesuai dengan kebutuhannya” (EW, 15-11-2022).

“kurikulum sih seperti pada umumnya ya yaitu kurikulum k13”(KDP, 15-11-2022).

9. Apakah kurikulum tersebut sudah mengakomodasi kebutuhan anak berkebutuhan khusus?

Jawaban:

“ya sudah “(KR, 15-11-2022).

“sudah sih menurut saya” (EW, 15-11-2022).

“sudah cukup bisa ya mengakomodasikannya” (EH, 15-11-2022).

10. Apakah bapak/ibu membuat RPP dan Silabus yang sesuai dengan kebutuhan anak berkebutuhan khusus?

Jawaban:

“Dalam RPP juga dibuat sesuai kemampuan siswa” (KR, 15-11-2022).

“menurut saya kurikulumnya sudah sesuai dengan kebutuhan siswa. Dan RPP dirancang dengan pemahaman atau kemampuan mereka” (EW, 15-11-2022).

“ya, saya membuat RPP yang sesuai dengan kebutuhan siswa” (KDP, 15-11-2022).

11. Sesering apa bapak/ibu melakukan interaksi dengan anak berkebutuhan khusus?

Jawaban:

“setiap hari kami saling berinteraksi seperti menyapa, bertanya, dan sesama teman saling bekerja sama” (KR, 15-11-2022).

“berinteraksi setiap disekolah ya, kami saling menyapa dll” (EW, 15-11-2022).

“sering melakukan interaksi. interaksi yang dilakukan ya seperti interaksi pada umumnya” (KDP, 15-11-2022).

“pasti melakukan interaksi jika dikelas ataupun diluar kelas” (EH, 15-11-2022).

12. Menurut bapak ibu bagaimana ketersediaan sarana prasarana untuk anak berkebutuhan khusus?

Jawaban:

“sebenarnya sarana prasarana disekolah ini belum memadai untuk siswa berkebutuhan khusus” (KR, 15-11-2022).

“bisa dikatakan belum memadai ya sarana prasarannya. Tetapi memang sih siswa yang masuk disekolah inipun tidak dalam kategori berkebutuhan khusus tingkat berat jadi masih bisa berlangsung pembelajaran” (EW, 15-11-2022).

“belum memadai untuk anak berkebutuhan khusus” (KDP, 15-11-2022).

“sarana prasarana belum memadai” (EH, 15-11-2022).

13. Apakah sekolah menyediakan media untuk anak berkebutuhan khusus?

Jawaban:

“ada sih tapi itu tadi belumm memadai” (KR, 15-11-2022).

“ya ada” ” (EW, 15-11-2022).

“ada beberapa” (KDP, 15-11-2022).

14. Selama ini apakah terdapat kendala dalam melaksanakan kebijakan pendidikan inklusif itu sendiri?

Jawaban:

“memang tidak ada kendala dalam melaksanakan pendidikan inklusif ini karena memang guru dibantu juga ya oleh guru pendamping. Faktor pendukung sih itu ya kami dibantu oleh guru pendamping. Dan faktor penghambat itu tadi ya kurangnya sarana prasarana” (KDP, 15-11-2022).

“kalau untuk faktor pendukung ya peran kepala sekolah lagi dalam memimpin sekolah yaitu memberikan kesempatan guru untuk memodifikasi proses pembelajaran sehingga sesuai dan tepat untuk siswa. Faktor penghambat sih lebih kepada sarana prasarana aja sih” (EW, 15-11-2022).

“kendala sih tidak terlalu ada karena memang ada guru pendamping, dan faktor penghambatnya sih sarana prasaranan tadi yang belum memadai” (KR, 15-11-2022).

“saya sendiri tidak begitu merasakan kendalanya ya. Tetapi sarana prasaran harus ditingkatkan lagi” (EH, 15-11-2022).

15. Apa saja yang menjadi factor pendukung dan penghambat dari ketercapaian penerapan kebijakan pendidikan inklusif di SDN 131 Kota Jambi?

Jawaban:

“Faktor pendukung sih itu ya kami dibantu oleh guru pendamping. Dan faktor penghambat itu tadi ya kurangnya sarana prasarana” (KDP, 15-11-2022).

“kalau untuk faktor pendukung ya peran kepala sekolah lagi dalam memimpin sekolah yaitu memberikan kesempatan guru untuk memodifikasi proses pembelajaran sehingga sesuai dan tepat untuk siswa. Faktor penghambat sih lebih kepada sarana prasarana aja sih” (EW, 15-11-2022).

“faktor penghambatnya sih sarana prasaranan tadi yang belum memadai” (KR, 15-11-2022).

“saya sendiri tidak begitu merasakan kendalanya ya. Tetapi sarana prasaran harus ditingkatkan lagi” (EH, 15-11-2022).

16. Bagaimana bentuk pelayanan yang diberikan kepada siswa berkebutuhan khusus?

Jawaban:

“pelayanannya tidak dibedakan dengan peserta didik reguler. Layanan yang diberikan sudah cukup baik” (KR, 15-11-2022).

“layanan sih tentunya kami berikan yang terbaik, seperti kalau orang tua siswa diterima kapanpun disekolah dan untuk konsultasi misalnya. Kalau kami memberikan pelayanan yang merata ya bagi semua peserta didik ya khususnya di sini ABK” (EW, 15-11-2022).

“pelayanan baik, sikap yang kami berikan yaitu sikap adil” (KDP, 15-11-2022).

“layanan yang diberikan sesuai dengan sebagaimana mestinya” (EH, 15-11-2022).

17. Bagaimana sikap guru dalam menghadapi siswa yang berkebutuhan khusus?

Jawaban:

“tentu tidak membedakan siswa ABK dengan siswa reguler” (EW, 15-11-2022).

“sikap yang kami berikan yaitu sikap adil” (KDP, 15-11-2022).

“sikap seperti biasanya berinteraksi dengan siswa umum llainnya” (KR, 15-11-2022).

“jika salah kami akan menegur dan jika benar akan diapresiasi” (EH, 15-11-2022).

18. Bagaimana kemampuan calistung untuk siswa yang berkebutuhan khusus, apakah ada perbedaan dengan siswa normal? Dan bagaimana cara mengajar guru tentang calistung terhadap siswa yang berkebutuhan khusus?

Jawaban:

“ada yang berbeda ada juga yang sama. Karena disini dilihat kembali siswa ini mempunyai kelainan apa. jika memang bisa mereka akan di ajarkan proses calistung sama dengan siswa reguler” (KDP, 15-11-2022).

“calistungnya berbeda sesuai dengan tingkat kemampuannya” (EW,15-11-2022).

“calistung sih berbeda ya dengan siswa reguler. Tapi disesuaikan dengan kemampuan siswa itu lagi bagaimana” (KR,15-11-2022).

“tergantung dengan siswanya ya” (EH, 15-11-2022).

19. Bagaimana cara mengukur hasil belajar siswa terkait evaluasi dalam kelas inklusif?

Jawaban:

“ melakukan evaluasi sesuai tingkat kemampuan siswa. Metodenya sesuai dengan kebutuhan siswa. Sistem kenaikan kelas siswa inklusif tidak adanya tinggal kelas. Untuk kelulusan siswa yaitu pemberian ijazah” (KR,15-11-2022).

“kalau evaluasi yaitu yang dilihat kognitif, afektif, psikomotor sesuai kemampuan siswa. Sistem kenaikan kelas peserta didik ABK tidak ada yang tinggal kelas” (EW, 15-11-2022).

20. Metode apa yang digunakan dalam mengukur evaluasi pembelajaran?

Jawaban:

“ melakukan evaluasi sesuai tingkat kemampuan siswa. Metodenya sesuai dengan kebutuhan siswa.

“kalau evaluasi yaitu yang dilihat kognitif, afektif, psikomotor sesuai kemampuan siswa.

21. Bagaimana untuk sistem kenaikan kelas?

Jawaban:

Sistem kenaikan kelas peserta didik ABK tidak ada yang tinggal kelas” (EW, 15-11-2022).

“Sistem kenaikan kelas siswa inklusif tidak adanya tinggal kelas. Untuk kelulusan siswa yaitu pemberian ijazah” (KR,15-11-2022).

22. Dengan cara apa peserta didik dinyatakan tamat/lulus dari sekolah?

Jawaban:

“Untuk sistem lulus atau tidak lulus dilihat dari tuntas semua mapel dari jenjang kelas 1-6, ikut serta dalam ujian akhir. Sikap perilaku minimal baik” (RA, 29-11-2022).

23. Apakah ada pelatihan untuk guru yang mengajar peserta didik berkebutuhan khusus?

Jawaban:

“ada pelatihan tetapi untuk sekarang ini sudah lama tidak ada dilakukan pelatihan. Kami memang ada kerja sama dengan psikolog, SLB dan pihak terkait lainnya” (KR, 15-11-2022).

“pelatihan dilakukan ya, tetapi tidak sering adanya pelatihan. Kerjasama seperti kerjasama dengan SLB” (EW, 15-11-2022).

“ada, dan dilakukan jarang sekali. Dan kerjasama dengan guru pendamping atau orang tua siswa” (EH, 15-11-2022).

24. Apakah sekolah menjalin kerjasama dengan tenaga ahli, misalnya: dokter, psikologis,, terapis, atau pekerja sosial?

Jawaban:

“ya kami melakukan kerja sama dengan SLB, dan psikolog setempat” ” (EW, 15-11-2022).

“Kami memang ada kerja sama dengan psikolog, SLB dan pihak terkait lainnya” (KR, 15-11-2022).

“Dan kerjasama dengan guru pendamping atau orang tua siswa” (EH, 15-11-2022).